



Laporan KINERJA

Triwulan I 2026

**PELABUHAN PERIKANAN
SAMUDERA BUNGUS**

JL. RAYA PADANG – PAINAN KM. 16, 25245 PADANG
SUMATERA BARAT TELEPON/FAX: (0751) 751122
EMAIL: PPS.BUNGUS@KKP.GO.ID

KATA PENGANTAR



Widodo, S.Pi, M.Sc

Kepala Pelabuhan Perikanan
Samudera Bungus

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas izin dan rahmat-Nya penyusunan "Laporan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus Triwulan I Tahun 2026" dapat terselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dimaksudkan sebagai bentuk pertanggung-jawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus. Disamping itu, laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja baik keberhasilannya maupun hal-hal lain yang harus dilakukan peninjauan kembali agar dapat mencapai keberhasilan, sekaligus merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Sebagai media pertanggung jawaban, laporan ini berisikan tentang Rencana Strategis tahun 2026, Rencana Kinerja tahun 2026, dan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026. Seluruh hasil realisasi pelaksanaan kegiatan pada Triwulan I Tahun 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus, dituangkan secara transparan dan akuntabel dalam Laporan ini. Kami menyadari bahwa laporan ini masih belum sempurna seperti yang diharapkan, untuk itu kami akan terus berupaya menyempurnakan sistem AKIP dan penyajian Laporan Kinerja di masa yang akan datang.

Demikianlah laporan ini kami susun untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan dukungannya kami ucapkan terima kasih.

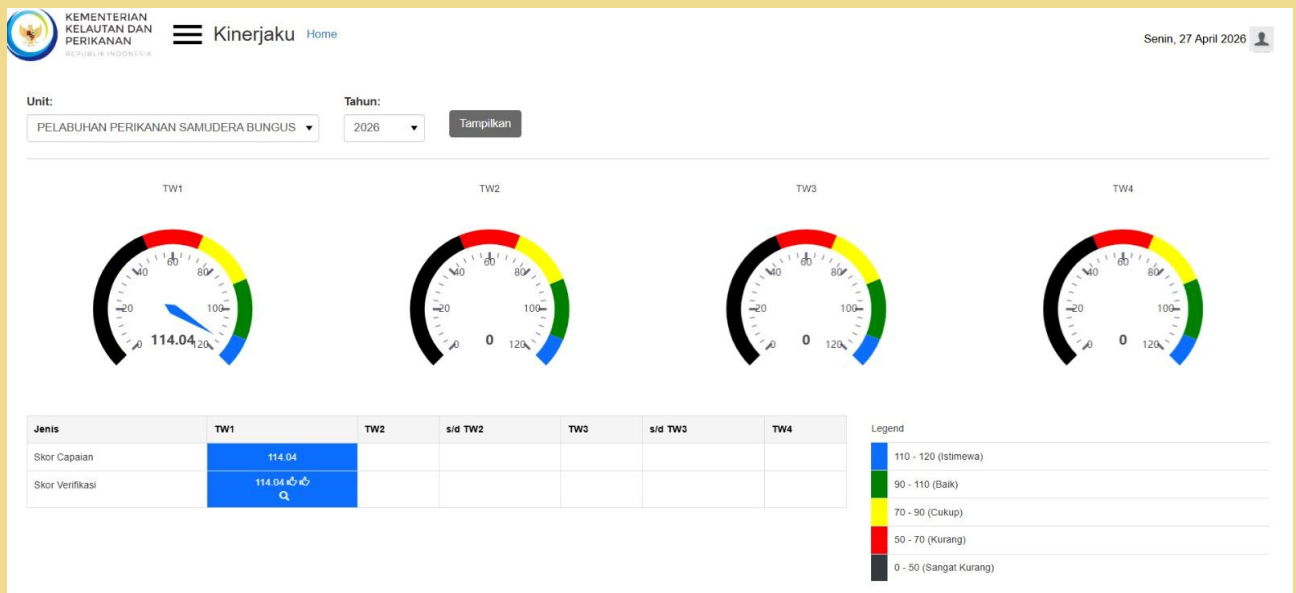
Bungus, 10 April 2026

Kepala Pelabuhan Perikanan
Samudera Bungus



Ringkasan Eksekutif

Dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 12.891.683.000,- untuk Tahun 2026 dimana yang terealisasi sebesar Rp. 2.864.193.680,- dengan persentase sebesar 22,21% sampai dengan akhir triwulan I tahun 2026. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja PPS Bungus sampai dengan triwulan I tahun 2026 melalui pencapaian target indikator kinerja yang diinput kedalam Sistem Pengelolaan Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (KINERJAKU), diperoleh Nilai Pengukuran Sasaran Strategis (NPSS) Ditjen Perikanan Tangkap sebesar 114,04%.



Gambar 1. Nilai Pengukuran Sasaran Strategis (NPSS) PPS Bungus triwulan I tahun 2026

Dari hasil pengukuran kinerja Dirjen Perikanan Tangkap dan UPT PPS Bungus Triwulan I tahun 2026 melalui pencapaian target indikator kinerja yang di input ke dalam Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan KINERJAKU, diperoleh Nilai target Triwulan I tahun 2026 yang mencapai angka lebih atau diatas 100% di semua Indikator Kinerja yang ditargetkan (Indikator Kinerja Triwulan I tahun 2026 Terlampir).

Pengukuran kinerja berbasis BSC merupakan hasil suatu penilaian yang didasarkan pada capaian indikator kinerja utama (pencapaian Output) yang telah diidentifikasi untuk tercapainya sasaran strategis (pencapaian outcome). Sasaran Strategis (SS) tersebut kemudian dipetakan dalam suatu Peta Strategis berupa kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategis organisasi. Peta Strategis Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus Triwulan I tahun 2026 dapat disajikan pada diagram diatas, berdasarkan Dashboard Peta Strategis s/d triwulan I pada Aplikasi Kinerja: www.kinerjaku.kkp.go.id.

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	i
Ringkasan Eksekutif.....	ii
Daftar Isi.....	iii
Daftar Gambar.....	v
Daftar Tabel.....	vi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
Latar Belakang	2
Tugas Dan Fungsi.....	3
Fungsi Pemerintahan	3
Fungsi Pengusahaan	3
Peranan Pelabuhan Perikanan	3
Struktur Organisasi.....	4
Sistematika Penyajian	4
BAB II PERENCANAAN KINERJA	6
Visi Dan Misi Pembangunan Perikanan Tangkap.....	7
Tujuan Dan Sasaran Strategis	7
Indikator Kinerja Tahun 2026	8
Rencana Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus Tahun 2025	10
Rencana Aksi.....	10
BAB III Akuntabilitas Kinerja	13
Capaian Kinerja Organisasi.....	14
Analisa Capaian Kinerja.....	16
▪ Indikator Kinerja (IK) 1 – Penerimaan PNBP Non SDA di PPS Bungus	16
▪ Indikator Kinerja (IK) 2 – Volume Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus.....	19
▪ Indikator Kinerja (IK) 3 – Persentase Permohonan Pengusahaan yang Dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Persen)	22
▪ Indikator Kinerja (IK) 4 – Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus.....	23
▪ Indikator Kinerja (IK) 5 – Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus.....	25
▪ Indikator Kinerja (IK) 6 – Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus.....	25
▪ Indikator Kinerja (IK) 7 – Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus.....	26
▪ Indikator Kinerja (IK) 8 - Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan	28
▪ Indikator Kinerja (IK) 9 – Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan...	29
▪ Indikator Kinerja (IK) 10 – Nilai Capaian Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	30
▪ Indikator Kinerja (IK) 11 – Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus.....	32
▪ Indikator Kinerja (IK) 12 – Nilai PM Sakip Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	33
▪ Indikator Kinerja (IK) 13 – Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus.....	35
▪ Indikator Kinerja (IK) 14 – Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada	

SIRUP di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	37
▪ Indikator Kinerja (IK) 15 – Persentase Pengelolaan BMN di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus.....	38
▪ Indikator Kinerja (IK) 16 – Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus.....	40
▪ Indikator Kinerja (IK) 17 – Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus.....	41
▪ Indikator Kinerja (IK) 18 – Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Lingkup Pelabuhan Perikanan Samudera.....	41
Akuntabilitas Keuangan	43
BAB IV PENUTUP	44
Kesimpulan.....	45
Rekomendasi Tindak Lanjut	46
Lampiran	47

Daftar Gambar

Gambar 1. Nilai Pengukuran Sasaran Strategis (NPSS) PPS Bungus triwulan I tahun 2026.....	ii
Gambar 2. Struktur Organisasi PPS Bungus Tahun 2026.....	4
Gambar 3. Penerimaan PNBP TW I Tahun 2026	5
Gambar 4. Capaian Volume Produksi.....	20
Gambar 5. Capaian Tingkat Kinerja Pelabuhan.....	26
Gambar 6. Skor Penilaian aplikasi SELARASKAN Triwulan I tahun 2026.....	27
Gambar 7. Capaian Kapal Perikanan Izin Daerah.....	28
Gambar 8. Nilai Pengukuran Sasaran Strategis (NPSS)	45

Daftar Tabel

Tabel 1. Informasi Cascading/Turunan Indikator Kinerja Utama (IKU) 2026.....	8
Tabel 2. Rencana Kinerja Tahunan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus Tahun 2026.....	10
Tabel 3. Capaian IKU PPS Bungus hasil Balanced Scorecard (BSC) Tahun 2026.....	14
Tabel 4. Target dan Realisasi Nilai PNBPN di PPS Bungus	16
Tabel 5. Capaian Penerima PNBPN Non SDA di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus.....	17
Tabel 6. Capaian Volume Produksi Perikanan Tangkap di PPS Bungus TW I Tahun 2026.....	19
Tabel 7. Capaian Volume Produksi Perikanan Tangkap di PPS Bungus.....	20
Tabel 8 Capaian Persentase Permohonan Pengusahaan yang Dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	22
Tabel 9. Capaian Tingkat Operasional Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	24
Tabel 10 Capaian Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	25
Tabel 11 Capaian Indikator Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus.....	26
Tabel 12 Capaian Indikator Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus.....	27
Tabel 13 Capaian Indikator Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan	28
Tabel 14 Capaian Indikator Persentase Peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Perlindungan Nelayan/Awak Kapal Perikanan	30
Tabel 15 Capaian Indikator Nilai Capaian Pembangunan Zona Integritas menuju WBK Pelabuhan Perikanan.....	31
Tabel 16 Capaian IK “Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja” Tahun 2026.....	32
Tabel 17 Capaian Indikator Nilai PM Sakip Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	34
Tabel 18 Capaian Indikator Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	36
Tabel 19 Capaian Indikator Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus.....	37
Tabel 20 Capaian Indikator Persentase Pengelolaan BMN di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus.....	39
Tabel 21 Capaian Kinerja Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	40
Tabel 22 Capaian Indikator Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus.....	41
Tabel 23. Capaian Indikator Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Lingkup Pelabuhan Perikanan Samudera.....	42
Tabel 24. Realisasi Penyerapan Anggaran Untuk Pelaksanaan Kegiatan PPS Bungus Tahun 2026.	43



2026

BAB 1

PENDAHULUAN



LATAR BELAKANG

Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus adalah salah satu dari 22 buah pelabuhan perikanan yang merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap. Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus terletak di Jl. Raya Padang-Painan KM. 16 Kec. Bungus Teluk Kabung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat.

Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus mempunyai visi Pusat Pertumbuhan Ekonomi Perikanan Terpadu yang Berdaya Saing, Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan. Sedangkan Misinya adalah 1) Mengembangkan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Memadai dan Ramah Lingkungan, 2) Meningkatkan Produktifitas, Nilai Tambah (*Value Added*) dan Daya Saing Produk Perikanan Untuk Kesejahteraan Nelayan, 3) Meningkatkan Pengembangan Sistem Data/Informasi Perikanan yang Akurat dan Update. Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut maka disusunlah Rencana Strategis, yang didalamnya tercantum rencana pelaksanaan program dan kegiatan serta dukungan pembiayaan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan perencanaan.

Rencana Starategis yang telah disusun, selanjutnya menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan dan program dalam kurun waktu lima tahunan. Mengacu pada Renstra tersebut, dibuat perencanaan tahunan guna mencapai indikator sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan program yang termuat dalam Renstra. Dalam rangka mengimplementasikan Renstra, maka disusunlah dokumen Perencanaan Kinerja (RENJA) yang didalamnya tercantum rencana pelaksanaan program dan kegiatan serta dukungan pembiayaan yang dibutuhkan setiap tahun anggaran. RENJA tersebut juga memuat target dan indikator sasaran yang diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan.

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ditindaklanjuti dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mengatur bahwa segala pelaksanaan pembangunan oleh instansi pemerintah agar dilaporkan secara akuntabel sesuai dengan perjanjian kinerja yang ditetapkan meliputi pertanggungjawaban penggunaan anggaran, keberhasilan yang dihasilkan, kegagalan pelaksanaan serta permasalahan yang dihadapi yang disertai dengan tindaklanjut pelaksanaan ditahun mendatang. Tujuan dari pelaporan kinerja ini yakni : (1) untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandate atas kinerja yang telah dan seharusnya tercapai serta (2) sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Mencakup hal tersebut diatas, pada tahun 2026 Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus melakukan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah setiap triwulan dengan menggunakan indikator kinerja sebagaimana yang tercantum pada RENSTRA 2026-2030. Laporan ini menggambarkan pencapaian kinerja PPS Bungus secara bertahap dari Triwulan I sampai dengan triwulan IV dan akan dilanjutkan dengan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2026 sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mendukung pelaksanaan pembangunan perikanan tangkap selama periode tahun 2026.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan salah satu bentuk pertanggung-jawaban instansi pemerintah dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan berdasarkan Rencana Strategis maupun Rencana Kerja tahunan yang dibuat sebelumnya. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah juga merupakan sarana untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja berdasarkan indikator sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Laporan Kinerja Triwulan I tahun 2026 ini akan menginformasikan keberhasilan dalam pencapaian indikator selama Triwulan I tahun 2026 sebagaimana target yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja tahunan (RKT) 2026 dan Perjanjian Kinerja.

TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 66/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan, bahwa pelabuhan perikanan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pelayanan pemanfaatan sumberdaya ikan, serta keselamatan operasional kapal perikanan. Sedangkan dalam rangka melaksanakan fungsinya berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan, Pelabuhan Perikanan menyelenggarakan fungsi pemerintahan dan perusahaan sebagai berikut:

Fungsi Pemerintahan

- | | |
|---|---|
| 1) Pelayanan pembinaan mutu dan pengolahan hasil perikanan; | 7) Tempat pelaksanaan fungsi karantina ikan; |
| 2) Pengumpulan data tangkapan dan hasil perikanan; | 8) Publikasi hasil pelayanan sandar dan labuh kapal perikanan dan kapal pengawas kapal perikanan; |
| 3) Tempat pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan masyarakat nelayan; | 9) Tempat publikasi hasil penelitian kelautan dan perikanan; |
| 4) Pelaksanaan kegiatan operasional kapal perikanan; | 10) Pemantauan wilayah pesisir; |
| 5) Tempat pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sumberdaya ikan; | 11) Pengendalian lingkungan; |
| 6) Pelaksanaan kesyahbandaran; | 12) Kepabeanan; dan/atau |
| | 13) Keimigrasian. |

Fungsi Perusahaan

- | | |
|--|---|
| 1) Pelayanan tambat dan labuh kapal perikanan; | 6) Pelayanan perbaikan dan pemeliharaan kapal perikanan; |
| 2) Pelayanan bongkar muat ikan; | 7) Pelayanan logistik dan perbekalan kapal perikanan; |
| 3) Pelayanan pengolahan hasil perikanan; | 8) Wisata bahari; dan/atau; |
| 4) Pemasaran dan distribusi ikan; | 9) Penyediaan dan/atau pelayanan jasa lainnya sesuai dengan peraturan perundang undangan. |
| 5) Pemanfaatan fasilitas dan lahan di pelabuhan perikanan; | |

PERANAN PELABUHAN PERIKANAN

Pelabuhan perikanan memiliki peranan strategis dalam mendukung pembangunan sektor kelautan dan perikanan secara berkelanjutan. Merujuk pada fungsi-fungsi utamanya, pelabuhan perikanan tidak hanya berfungsi sebagai tempat pendaratan dan distribusi hasil tangkapan, tetapi juga menjadi pusat kegiatan ekonomi, sosial, dan pelayanan publik yang secara langsung mendorong peningkatan produksi perikanan.

Pembangunan dan pengelolaan pelabuhan perikanan bertujuan untuk menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru, khususnya bagi masyarakat pesisir dan nelayan. Keberadaan pelabuhan mendorong aktivitas ekonomi yang lebih dinamis, mulai dari perdagangan ikan, perbengkelan kapal, penyediaan bahan bakar, es, air bersih, hingga jasa logistik dan pengolahan hasil perikanan. Dengan demikian, pelabuhan menjadi lokus penting dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi wilayah.

Pelabuhan perikanan juga diharapkan mampu menjadi unit kerja yang produktif secara ekonomi, dengan mengoptimalkan potensi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui pelayanan jasa kepelabuhanan, seperti tambat labuh, jasa listrik, air bersih, cold storage, hingga penyewaan lahan dan bangunan. Pendapatan ini tidak hanya berkontribusi bagi negara dan pemerintah daerah, tetapi juga memperkuat kapasitas fiskal untuk pembangunan sektor kelautan yang lebih luas.

Lebih jauh, aktivitas di pelabuhan menciptakan efek berganda (multiplier effect) bagi masyarakat sekitar. Selain meningkatkan kesejahteraan nelayan secara langsung melalui layanan pelabuhan yang lebih efisien dan murah, pelabuhan juga membuka peluang usaha baru di sektor pendukung, seperti jasa transportasi, kuliner, perhotelan, koperasi, dan usaha kecil menengah lainnya.

Oleh karena itu, peran pelabuhan perikanan tidak hanya bersifat teknis operasional, tetapi juga strategis dalam memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat pesisir, mendorong pembangunan daerah, serta mempercepat realisasi visi ekonomi biru yang berkelanjutan.

STRUKTUR ORGANISASI



Gambar 2. Struktur Organisasi PPS Bungus Tahun 2026

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi pelabuhan perikanan tersebut, maka disusun struktur organisasi Pelabuhan Perikanan Samudera berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 60/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan, sebagai berikut :

Subbagian Umum

Melakukan urusan hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, persuratan, kearsipan, dokumentasi, dan rumah tangga, serta pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan.

Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan masing-masing. Dalam pelaksanaan tugas tersebut ditetapkan Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap. Tugas koordinator tersebut adalah mengkoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan masing-masing fungsional sesuai dengan bidang tugasnya.

Maka sesuai dengan tugas dan fungsi tersebut diatas PPS Bungus dengan struktur organisasinya berkewajiban memberikan kinerja yang terbaik bagi perwujudan visi Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan yang berdaya saing dan berkelanjutan untuk kesejahteraan yang di implementasikan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan dievaluasikan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

SISTEMATIKA PENYAJIAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Triwulan I Tahun 2026 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja yang dilakukan dengan transparan serta sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja pada tahun berikutnya. Capaian kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus Triwulan I tahun 2026 akan dibandingkan dengan Rencana Kinerja 2026 yang telah ditargetkan sebagai tolak ukur keberhasilan organisasi. Dari analisis atas capaian

kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan dilakukannya proses identifikasi terhadap sejumlah celah kinerja yang ada bagi perbaikan kinerja di masa datang. Adapun kaitan dari sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus tahun 2026 sebagai berikut :

Ringkasan Eksekutif

Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya. Disebutkan juga langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

Bab I Pendahuluan

Pada bab Pendahuluan ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas

a. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

- 1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- 2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- 3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
- 4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
- 5) Analisis penyebab keberhasilan atau kegagalan atau peningkatan atau penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
- 6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- 7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

b. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup

Bab Penutup ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran

Isi dari pada lampiran merupakan kumpulan dari Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja yang telah di tandatangani oleh Kepala Pelabuhan dan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap.



2026

BAB 2 PERENCANAAN KINERJA



VISI DAN MISI PEMBANGUNAN PERIKANAN TANGKAP

Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap selaku penanggung jawab Program memiliki peran strategis, yakni sebagai: (I) penyedia bahan pangan dari perairan yang mempunyai nilai tinggi dari, ditinjau dari aspek nutrisi maupun ekonomi, (II) penyedia lapangan kerja bagi masyarakat di daerah pesisir, (III) salah satu bidang andalan dalam kegiatan ekonomi berbasis kelautan dan perikanan yang turut serta dalam menjaga kedaulatan bangsa di laut, (IV) penyumbang potensial untuk mendorong peningkatan penerimaan negara, serta (V) identitas budaya negara maritim yang perlu dijaga dan dilestarikan.

Untuk menjalankan peran strategis tersebut, visi pembangunan perikanan tangkap ditetapkan sebagai berikut: ***“Terwujudnya Pembangunan Perikanan Tangkap yang Berdaulat, Mandiri, Berdaya Saing dan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Nelayan”*** dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Berdaulat diartikan sebagai kemampuan penuh untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya perikanan untuk digunakan sebesar-besarnya dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat demi mewujudkan kedaulatan.
2. Mandiri diartikan sebagai keadaan untuk dapat berdiri sendiri tanpa bergantung dengan pihak lain dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya perikanan yang ada untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Berdaya saing diartikan sebagai keunggulan dan kapasitas yang dimiliki untuk menghadapi persaingan dalam peta kompetisi global dalam pengelolaan sumber daya perikanan.
4. Berkelanjutan dimaksudkan sebagai upaya untuk mengelola dan melindungi sumber daya ikan agar dapat dimanfaatkan secara berkesinambungan oleh generasi saat ini dan generasi mendatang.
5. Kesejahteraan diartikan bahwa pengelolaan sumber daya perikanan adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, khususnya nelayan.

Misi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan oleh peraturan perundang-undangan serta merupakan penjabaran dari misi pembangunan nasional. Misi yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Turut serta dalam mewujudkan kedaulatan di laut dengan mengembangkan kegiatan kegiatan yang mempunyai nilai strategis secara sosial, ekonomi, budaya, dan pertahanan dan keamanan;
2. Mewujudkan kemandirian dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan;
3. Meningkatkan kapasitas dan daya saing dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya ikan;
4. Mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan yang berkelanjutan;
5. Mewujudkan peningkatan kesejahteraan nelayan.

Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis telah menyusun rencana kerja yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai guna menjalankan Rencana Strategis yang telah dicanangkan.

Dalam rangka mencapai visi yang tertuang dalam Renstra, Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus menetapkan visi, misi, rencana strategis, tujuan, dan sasaran strategis yang terukur dan dilaksanakan setiap tahun. Selanjutnya, sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ditindaklanjuti dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, pelaksanaan rencana kerja tersebut harus dipertanggungjawabkan setiap tahun dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan perikanan tangkap nasional, yaitu

meningkatkan efisiensi dan produktivitas usaha perikanan tangkap secara berdaulat, bertanggung jawab, dan berkelanjutan guna mendorong peningkatan kesejahteraan nelayan, Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus menetapkan arah strategis yang terukur.

Dalam kerangka tersebut, Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus mengimplementasikan pendekatan Balanced Scorecard (BSC) sebagai alat untuk menjamin penyelarasan antara strategi, pelaksanaan program, dan evaluasi kinerja. Sasaran strategis yang ditetapkan berfungsi sebagai panduan dalam penyusunan program, pengalokasian sumber daya, serta pengukuran hasil kinerja jangka menengah (5 tahunan).

Adapun Sasaran Strategis Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus Tahun 2026 terdiri dari lima sasaran utama dengan total 8 indikator kinerja utama (IKU), sebagai berikut:

1. Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus.
 - a. Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Rp. Juta).
2. Produktivitas perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus meningkat.
 - a. Volume produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Ton).
3. Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus yang optimal dan bertanggung jawab.
 - a. Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (nilai).
 - b. Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (nilai).
4. Pengelolaan awak kapal perikanan, kapal perikanan dan alat penangkapan ikan berkelanjutan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus.
 - a. Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan (kapal).
5. Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus.
 - a. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Persen).
 - b. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (persen)
 - c. Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Samudera (Indeks).

INDIKATOR KINERJA TAHUN 2026

Untuk mengukur realisasi dan rencana strategis, Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus menetapkan indikator kinerja dan target untuk masing-masing sasaran yang harus dicapai sehingga lebih terarah dan terkendali.

Target ini dituangkan dalam perjanjian kinerja. Hal ini ditetapkan untuk setiap indikator kinerja baik untuk indikator kinerja tingkat sasaran maupun indikator kinerja tingkat kegiatan yang merupakan penjabaran dari program-program yang telah disusun sebelumnya, guna pencapaian sasaran yang sejalan dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Adapun indikator kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus tahun 2026 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1. Informasi Cascading/Turunan Indikator Kinerja Utama (IKU) 2026

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja	Target	Frekuensi	Pola Perhitungan	Penanggung Jawab
1.	Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	1	Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Rp. Juta)	2.227,89	Triwulan	Nilai Posisi Akhir Tim Kerja Pelayanan Usaha
2.	Produktivitas perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus meningkat	2	Volume produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Ton)	10.090,69	Triwulan	Nilai Posisi Akhir Tim Kerja Operasional Pelabuhan

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Frekuensi	Pola Perhitungan	Penanggung Jawab
3. Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus yang optimal dan bertanggung jawab	3. Persentase permohonan pengusaha yang dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (persen)	100	Tahunan	Nilai Posisi Akhir	Tim Kerja Pelayanan Usaha
	4. Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (nilai)	86,25	Triwulan	Rata-Rata	Tim Kerja Operasional Pelabuhan
	5. Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (persen)	83	Tahunan	Nilai Posisi Akhir	Tim Kerja Kesyahbandaran Pelabuhan
	6. Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (persen)	70	Tahunan	Nilai Posisi Akhir	Tim Kerja Tata Kelola Sarana dan Prasarana
	7. Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (nilai)	33	Triwulan	Rata-Rata	Tim Kerja Tata Kelola Sarana dan Prasarana
4. Pengelolaan awak kapal perikanan, kapal perikanan dan alat penangkapan ikan berkelanjutan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	8. Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan (kapal)	1.152	Triwulan	Nilai Posisi Akhir	Tim Kerja Kesyahbandaran Pelabuhan
	9. Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan (nilai)	0,28	Semesteran	Nilai Posisi Akhir	Tim Kerja Kesyahbandaran Pelabuhan
5. Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	10. Nilai Pembangunan Zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (nilai)	45,5	Tahunan	Nilai Posisi Akhir	Tim Kerja Dukungan Manajerial
	11. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Persen)	86	Triwulan	Nilai Posisi Akhir	Tim Kerja Dukungan Manajerial
	12. Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (nilai)	88,2	Tahunan	Nilai Posisi Akhir	Tim Kerja Dukungan Manajerial
	13. Indeks Profesionalitas ASN Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Indeks)	84,5	Semesteran	Nilai Posisi Akhir	Tim Kerja Dukungan Manajerial
	14. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (persen)	77	Triwulan	Nilai Posisi Akhir	Tim Kerja Dukungan Manajerial
	15. Persentase Pengelolaan BMN di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (persen)	82	Tahunan	Nilai Posisi Akhir	Tim Kerja Dukungan Manajerial
	16. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (nilai)	92,1	Semesteran	Nilai Posisi Akhir	Tim Kerja Dukungan Manajerial
	17. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Nilai)	71,75	Tahunan	Nilai Posisi Akhir	Tim Kerja Dukungan Manajerial
	18. Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Samudera (Indeks)	88,8	Triwulan	Nilai Posisi Akhir	Tim Kerja Dukungan Manajerial

RENCANA KINERJA PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BUNGUS TAHUN 2025

Dalam rangka mengimplementasikan strategi pencapaian sasaran jangka menengah dan memastikan pelaksanaan program yang efektif, Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bungus menetapkan Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2026 sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan dan pengukuran kinerja selama satu tahun anggaran. Rencana kinerja ini disusun untuk mengarahkan upaya pencapaian indikator kinerja utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja, baik pada level sasaran strategis maupun pada tingkat operasional kegiatan. Setiap indikator ditetapkan dengan target yang terukur, relevan dengan visi dan misi organisasi, serta disesuaikan dengan kapasitas anggaran yang tersedia.

Penyusunan Rencana Kinerja Tahun 2026 juga bertujuan untuk menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, serta mendukung penerapan prinsip akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) melalui pendekatan berbasis hasil (*result-based management*). Strategi ini diharapkan dapat memastikan bahwa setiap program yang dijalankan memberikan kontribusi langsung terhadap peningkatan pelayanan, pengelolaan sumber daya, dan kesejahteraan masyarakat perikanan. Adapun alokasi anggaran untuk mendukung pelaksanaan rencana kinerja tersebut tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 2. Rencana Kinerja Tahunan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus Tahun 2026

No	Kegiatan	Anggaran
1	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	1.319.549.000
2	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	11.572.134.000
Total Anggaran PPS Bungus Tahun 2026		12.891.683.000

Anggaran di atas mencerminkan komitmen PPS Bungus dalam menjalankan program secara efisien dan tepat sasaran. Setiap kegiatan diarahkan untuk mendukung pencapaian lima sasaran strategis yang telah ditetapkan sebelumnya, termasuk peningkatan PNBPN, produktivitas perikanan, tata kelola pelabuhan, keberlanjutan sumber daya, dan penguatan manajemen internal.

RENCANA AKSI

Rencana Aksi merupakan turunan operasional dari target-target indikator kinerja utama (IKU) yang telah ditetapkan, khususnya untuk perspektif Internal Proses dan Pembelajaran & Pertumbuhan (*Learning and Growth*) dalam kerangka *Balanced Scorecard*. Rencana ini menjadi dokumen penting untuk memastikan pelaksanaan program dan kegiatan berjalan efektif, terukur, dan akuntabel.

Secara fungsional, rencana aksi digunakan sebagai:

- Alat pemantauan triwulanan terhadap capaian indikator output kegiatan.
- Instrumen identifikasi permasalahan teknis maupun administratif yang menghambat kinerja.
- Dasar penetapan tindak lanjut dan langkah korektif pada triwulan berikutnya agar target tetap tercapai.

Rencana aksi PPS Bungus tahun 2026 mencakup rincian kegiatan, unit penanggung jawab (*tim kerja*), alokasi anggaran, serta jadwal pelaksanaan yang tersebar dalam empat triwulan. Fokus utama diarahkan pada pencapaian indikator terkait tata kelola pelabuhan, pelayanan internal, dukungan manajerial, serta peningkatan kompetensi dan efisiensi organisasi.

Berikut adalah tabel rencana aksi Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus Tahun 2026:

MATRIKS RENCANA AKSI
PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BUNGLUS
DIREKTORAT JENDRAL PERIKANAN TANGKAP
TAHUN 2026

NO.	SASARAN/INDIKATOR	Unit P/J (Tim Kerja)	Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp.)	Target Kegiatan	Skuat target Kegiatan	TARGET														
							Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec			
1. Misi PPSB Sektor Perikanan Tangkap Meningkatkan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bunglus.																					
1	Penerimaan PHBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Samudera Bunglus.	Tim Kerja Pelayanan Usaha	-	-	1	Laporan															
2. Produktivitas perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Bunglus meningkat.																					
2	Volume produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Bunglus.	Tim Kerja Operasional Pelabuhan	Pelebaran Tata Kelola dan Operasional Serfifikasi Hasil Tangkapan Ikan (SHTE) di Pelabuhan Perikanan (2338 B/GA/02/02)	Rp860.000	1	Paket		Rp6.880	Rp13.720	Rp14.120	85.280	Rp249.960	Rp20.880	Rp24.900	Rp20.580	Rp229.320	Rp151.900	Rp39.200			
			Operasionalisasi Lembaga Pengelola Perikanan WPPNRI dalam mendukung Penangkapan Ikan Terukur (2341 O/GA/001/051)	-	1	Lembaga															
			Pelebaran tata kelola dan operasional cara penangkapan ikan yang baik (CPB) dan Inspeksi Pembongkaran Ikan di pelabuhan perikanan. (2338 B/GA/02/05)	-	1	Paket															
			Layanan Data Statistik Kelautan dan Perikanan (2342 EBA/953/03.A)	-	1	Layanan															
			Efisiensi Pemantauan dan evaluasi pengelolaan data statistik Tangkapan Perikanan Tangkap. (2342 EBA/953/03.B)	-	1	Layanan															
3. Peningkatan Pelabuhan Perikanan Samudera Bunglus yang optimal dan bertanggung jawab.																					
3	Peningkatan pemeliharaan pengapungan yang disertai dengan evaluasi di Pelabuhan Perikanan Samudera Bunglus.	Tim Kerja Pelayanan Usaha	Pelebaran tata kelola dan operasional pengapungan di pelabuhan perikanan. (2338 B/GA/02/04)	Rp496.403.000	1	Paket	Rp0	Rp3.475.241	Rp6.950.482	Rp7.490.672	Rp43.192.281	Rp125.108.670	Rp10.425.723	Rp12.411.575	Rp10.425.723	Rp116.172.342	Rp70.951.793	Rp19.858.520			
			Pelebaran tata kelola dan operasional SPDN di pelabuhan perikanan (2338 B/GA/02/06)	Rp744.811.000	1	Paket	Rp0	Rp5.212.277	Rp10.424.554	Rp107.223.942	Rp4.781.157	Rp187.641.972	Rp15.038.831	Rp18.615.275	Rp15.036.831	Rp174.238.974	Rp115.414.705	Rp29.784.440			
4	Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bunglus.	Tim Kerja Operasional Pelabuhan	Pelebaran tata kelola dan operasional PPP di pelabuhan perikanan. (2338 B/GA/02/07)	Rp1.762.000	1	Paket	Rp0	Rp12.334	Rp24.668	Rp25.778	Rp153.294	Rp44.024	Rp37.002	Rp44.000	Rp37.002	Rp412.308	Rp273.110	Rp70.480			
			Pelebaran tata kelola dan operasional Layanan Perikanan/Pembayaran Galangan Tangkapan (2342 EBA/951.A)	Rp1.204.497.000	1	Layanan	Rp28.482.454	Rp85.969.969	Rp1.171.800.908	Rp85.969.969	Rp85.969.969	Rp1.171.800.908	Rp85.969.969	Rp85.969.969	Rp85.969.969	Rp85.969.969	Rp85.969.969	Rp85.969.969	Rp85.969.969	Rp85.969.969	
			Biaya Pos dan Onm. (2342 EBA/951.B)	Rp420.000	1	Layanan	Rp14.045	Rp35.835	Rp35.835	Rp42.451	Rp38.205	Rp42.451	Rp35.835	Rp35.835	Rp35.835	Rp50.374	Rp28.393	Rp24.856			
5	Tingkat Pelayanan Kelayakan Pelabuhan Perikanan Samudera Bunglus.	Tim Kerja Kesejahteraan	Pelebaran Tata Kelola dan Operasional Kelayakan di pelabuhan perikanan (2338 B/GA/02/08)	Rp22.069.900	1	Paket	Rp0	Rp14.663	Rp30.336	Rp3.182.256	Rp132.813	Rp6.966.941	Rp44.079	Rp92.476	Rp44.079	Rp5.171.168	Rp1.423.361	Rp83.960			
			Pengumpulan dan Verifikasi Data Log Book penangkapan ikan (2341 O/GA/001/051)	-	100	Laporan															

NO.	SASARAN/INDIKATOR	Unit P/J (Tim Kerja)	Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp.)	Target Kegiatan	Skuat target Kegiatan	TARGET												
							Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	
6	Peningkatan Pengelolaan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Bunglus.	Tim Kerja Sarana dan Prasarana	Perawatan Gedung Kantor. (2342 EBA/994/02.A)	Rp32.000.000	1	Layanan	Rp1.070.080	Rp2.730.288	Rp2.730.288	Rp3.234.332	Rp2.814.688	Rp3.234.332	Rp2.730.288	Rp2.730.288	Rp3.838.039	Rp2.183.257	Rp1.883.902		
			Perawatan Jaring, Jalen dan Mesh (2342 EBA/994/02.B)	Rp252.888.000	1	Layanan	Rp4.458.511	Rp21.578.440	Rp21.578.440	Rp25.960.076	Rp23.033.867	Rp25.960.076	Rp21.578.440	Rp21.578.440	Rp33.330.820	Rp17.085.948	Rp14.968.803		
			Pemeliharaan Prasarana Fasilitas Perikanan (2342 EBA/994/02.C)	Rp19.985.000	1	Layanan	Rp654.223	Rp1.671.008	Rp1.671.008	Rp1.979.525	Rp1.783.880	Rp1.671.008	Rp1.671.008	Rp1.671.008	Rp2.349.000	Rp1.323.961	Rp1.159.128		
			Langganan Daya dan Jasa. (2342 EBA/994/02.D)	Rp1.034.980.000	1	Layanan	Rp4.593.704	Rp88.269.502	Rp88.269.502	Rp104.966.611	Rp44.231.858	Rp104.966.611	Rp88.269.502	Rp88.269.502	Rp88.269.502	Rp124.083.829	Rp49.938.114	Rp61.229.753	
			Efisiensi Operasional dan Pemeliharaan Kantor. (2342 EBA/994/02.H)	-	1	Layanan													
			Pengadaan dan Rehabilitasi prasarana perikanan. (2342 EBB/671/051)	-	1	Unit													
7	Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bunglus.	Tim Kerja Sarana dan Prasarana	Pelebaran tata kelola dan operasional K5 di Pelabuhan Perikanan (2338 B/GA/02/09)	Rp5.834.000	1	Paket	Rp0	Rp375.438	Rp750.876	Rp7.722.296	Rp4.688.188	Rp13.515.788	Rp1.128.314	Rp1.340.850	Rp1.128.314	Rp12.850.368	Rp8.313.270	Rp2.145.960	
4. Peningkatan awak kapal perikanan, kapal perikanan dan alat penangkapan ikan bertanggung jawab di Pelabuhan Perikanan Samudera Bunglus.																			
8	Kapal Perikanan (di daerah yang menurut kelayakan)	Tim Kerja Kesejahteraan	-	-	40	Kapal													
9	Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan.	Tim Kerja Kesejahteraan	-	-	1	Dokumen													
5. Tersedianya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di Tingkatan Pelabuhan Perikanan Samudera Bunglus.																			
10	Nilai Pengembangan Zone Integritas Wilayah Bebas dan Koneksi (WYBK) Pelabuhan Perikanan Samudera Bunglus.	Tim Kerja Dukungan manajerial	Forum Konsultasi Publik dan Pemantauan Pengembangan Zone Integritas (2342 EBA/960/051.A)	Rp124.369.000	1	Layanan	Rp0	Rp670.513	Rp1.341.026	Rp17.907.598	Rp10.819.233	Rp1.138.488	Rp2.611.539	Rp5.108.075	Rp2.611.539	Rp20.100.008	Rp19.276.945	Rp4.974.960	
11	Peningkatan Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Peltukan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bunglus.	Tim Kerja Dukungan manajerial	-	-	4	Laporan													
12	Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Samudera Bunglus.	Tim Kerja Dukungan manajerial	Morev dan Pelaporan Program Pengelolaan Perikanan Tangkap. (2342 EBO/953/052.A)	-	1	Layanan													
			Efisiensi Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran. (2342 EBO/953/052.B)	-	1	Layanan													
13	Indeks Profesionalitas ASN Pelabuhan Perikanan Samudera Bunglus.	Tim Kerja Dukungan manajerial	Efisiensi Evaluasi dan Peningkatan Organisasi di Lingkungan KKP. (2342 EBA/950/051.B)	-	1	Layanan													
			Pengadaan Pakan Dinas Pegawai. (2342 EBA/950/051.C)	-	1	Layanan													
			Pencapaian, Pengembangan dan Pembinaan Disiplin Pegawai. (2342 EBC/954/051)	-	1	Layanan													
14	Peningkatan Rencana Umum Pengapungan (RU) yang diumumkan pada SARUP di Pelabuhan Perikanan Samudera Bunglus.	Tim Kerja Dukungan manajerial	-	-	4	Laporan													
15	Peningkatan Pengapungan BMR di Pelabuhan Perikanan Samudera Bunglus.	Tim Kerja Dukungan manajerial	Pengadaan Perangkat Perangkat Data dan Komunikasi. (2342 CAN/955/051)	Rp7.500.000	1	Layanan				Rp7.500.000									
			Pengadaan sarana perantara. (2342 EBB/951/051)	Rp58.862.000	1	Unit											Rp58.862.000		

NO.	SASARAN/INDIKATOR	Unit P.J. (Tim Kerja)	Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp.)	Target Kegiatan	Sasaran target Kegiatan	TARGET													
							Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec		
16	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (KPA) Pelaksanaan Perikanan Sumatera Bungus.	Tim Kerja Dukungan managerial	Operasional Perkantoran. (2342.EBA.894.002.F)	Rp1.783.824.000	1	Layanan	Rp68.851.104	Rp152.197.317	Rp152.197.317	Rp180.287.383	Rp162.477.814	Rp180.287.383	Rp152.197.317	Rp152.197.317	Rp152.197.317	Rp213.949.814	Rp120.569.707	Rp105.574.470		
			Pelaporan Keuangan Lingkup Ditem Perikanan Tangkap. (2342.EBO.859.004.A)	-	1	Layanan														
			Efisiensi Pelaporan keuangan lingkup Ditem Perikanan Tangkap. (2342.EBO.859.004.B)	-	1	Layanan														
17	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pelaksanaan Perikanan Sumatera Bungus.	Tim Kerja Dukungan managerial	Penyusunan Pemecanaan Program dan Anggaran Serta Rencana. (2342.EBO.852.053.A)	-	1	Layanan														
			Efisiensi Penyusunan arsitektur informasi kinerja, sosialisasi dan bimbingan teknis perencanaan dan anggaran. (2342.EBO.852.053.B)	-	1	Layanan														
18	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelaksanaan Perikanan Sumatera Bungus.	Tim Kerja Dukungan managerial	-	-	4	Laporan														

Ditetapkan di : Padang
 Pada Tanggal : Januari 2026
 Kepala Pelabuhan Perikanan
 Sumatera Bungus,



Widodo



2026

BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Dengan beralihnya sistem pengelolaan kinerja di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menuju pendekatan Balanced Scorecard (BSC), setiap unit kerja diharapkan mampu menyelaraskan perencanaan dan pelaksanaan kerjanya dengan arah strategis organisasi. Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bungus sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) turut berperan aktif dalam mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan DJPT melalui pelaksanaan sasaran strategis (SS) dan indikator kinerja utama (IKU) yang telah diturunkan dari tingkat pusat.

Selain mengacu pada IKU yang ditetapkan oleh DJPT, PPS Bungus juga menetapkan indikator kinerja tambahan yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan lokal. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi UPT berjalan secara efektif, akuntabel, serta selaras dengan kebijakan nasional, sehingga dapat memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kinerja sektor perikanan tangkap secara menyeluruh.

Tabel 3. Capaian IKU PPS Bungus hasil Balanced Scorecard (BSC) Tahun 2026

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TARGET 2026	TARGET TW I	REALISASI TW I	% CAPAIAN TW I
1.	Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	1	Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Rp. Juta)	2.227,89	400	577,08	144,27%
2.	Produktivitas perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus meningkat	2	Volume produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Ton)	10.090,69	2.018	2.643,86	131%
3.	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus yang optimal dan bertanggung jawab	3	Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (persen)	100	-	-	-
		4	Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (nilai)	86,25	86,25	92,75	107,54%
		5	Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (persen)	83	-	-	-
		6	Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (persen)	70	-	-	-
		7	Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (nilai)	33	33	80,28	243,27%
4.	Pengelolaan awak kapal perikanan, kapal perikanan dan alat penangkapan ikan berkelanjutan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	8	Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan (kapal)	1.152	1.112	1.149	103,33%
		9	Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan (nilai)	0,28	-	-	-
5.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera	10	Nilai Pembangunan Zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (nilai)	45,5	-	-	-

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2026	TARGET TW I	REALISASI TW I	% CAPAIAN TW I
Bungus	11 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Persen)	86	86	100	116,28%
	12 Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (nilai)	88,2	-	-	-
	13 Indeks Profesionalitas ASN Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Indeks)	84,5	-	-	-
	14 Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (persen)	77	77	100	129,87%
	15 Persentase Pengelolaan BMN di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (persen)	82	-	-	-
	16 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (nilai)	92,1	-	-	-
	17 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Nilai)	71,75	-	-	-
	18 Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Samudera (Indeks)	88,8	88,8	94,78	106,73%

Pembahasan masing-masing indikator akan dicantumkan pada sub bab berikut sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014, sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi Kinerja triwulan berjalan;
2. Membandingkan antara realisasi Kinerja serta capaian Kinerja triwulan berjalan dengan triwulan tahun sebelumnya atau triwulan sebelumnya (jika ada);
3. Membandingkan antara realisasi Kinerja sampai dengan triwulan berjalan dengan target tahunan;
4. Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan Kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan; dan
5. Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan.

ANALISA CAPAIAN KINERJA

Pada Triwulan III Tahun 2025, Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bungus telah melaksanakan berbagai kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan, baik dalam aspek pelayanan operasional pelabuhan, pengelolaan sumber daya, maupun peningkatan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Untuk menilai sejauh mana capaian tersebut telah terealisasi, dilakukan evaluasi dan analisis terhadap masing-masing sasaran kegiatan. Uraian evaluasi per sasaran kegiatan disampaikan sebagai berikut:

Sasaran Kinerja (SK) 1: Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

Sasaran kinerja pertama (SK-1) yang ingin dicapai adalah meningkatnya nilai PNBP sektor perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bungus. Capaian ini diukur melalui indikator penerimaan PNBP yang merupakan seluruh pendapatan non-pajak hasil pelaksanaan fungsi perusahaan PPS Bungus sebagai UPT Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. Dasar hukum penerimaan ini mengacu pada PP Nomor 75 Tahun 2015 yang diperbarui dengan PP Nomor 85 Tahun 2021, serta Peraturan Dirjen Perikanan Tangkap Nomor 4/PER-DJPT/2017.

PNBP di PPS Bungus terdiri atas dua jenis: penerimaan umum dan penerimaan fungsional. Penerimaan fungsional mencakup berbagai layanan, antara lain: penggunaan tanah dan bangunan, peralatan dan mesin, peralatan pengolahan, transportasi, jasa tambat kapal (perikanan dan non-perikanan), docking, perbaikan kapal, penyediaan air, bengkel, pas masuk (harian dan berlangganan), kebersihan kawasan dan kolam pelabuhan, serta jasa layanan lainnya.

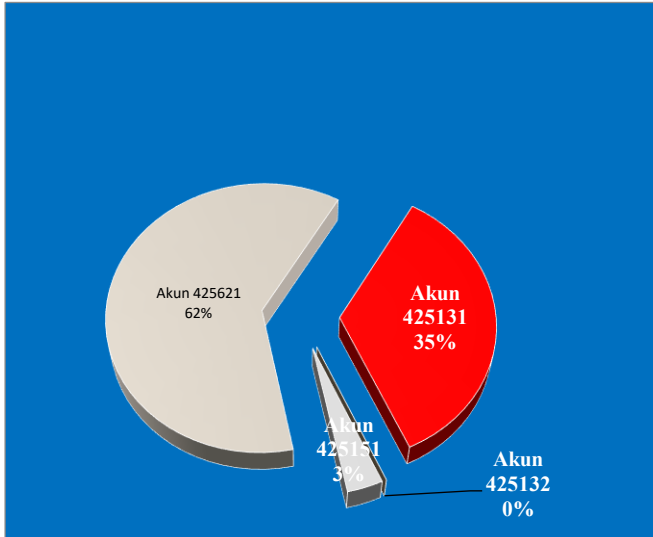
Indikator Kinerja (IK) 1 – Penerimaan PNBP Non SDA di PPS Bungus

Target dan Realisasi

Indikator nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan pendapatan yang diperoleh pelabuhan yang berasal dari pelayanan jasa yang berada di Pelabuhan Perikanan.

Tabel 4. Target dan Realisasi Nilai PNBP di PPS Bungus

Anggaran	Jenis Jasa	Target 2026 (Rp.)	Realisasi Triwulan I (Rp.)
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	-	201.536.000
425131	Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin	-	-
425132	Pelayanan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	-	-
425151	Pelayanan Penggunaan Tanah dan Bangunan	277.000.000	4.826.659
425151	Pelayanan Penggunaan Peralatan dan Mesin	99.725.000	10.166.625
425621	Pelayanan tambat untuk Kapal Perikanan	105.000.000	36.348.050
425621	Pelayanan Tambat untuk Kapal Non Perikanan	1.050.000.000	34.324.500
425621	Pelayanan Docking dengan Pekerja	200.000.000	29.600.000
425621	Pelayanan Perbaikan Kapal	72.500.000	41.266.000
425621	Pelayanan Pengadaan Air	36.000.000	28.210.000
425621	Pelayanan Bengkel	2.800.000	280.000
425621	Pelayanan Pas Masuk Harian	111.500.000	5.905.000
425621	Pelayanan Pas Masuk Berlangganan	102.000.000	8.310.000
425621	Pelayanan Kebersihan di Kawasan Pelabuhan	13.200.000	3.773.594
425621	Pelayanan Kebersihan Kolam Pelabuhan	93.100.000	5.753.950
425621	Pendapatan Jasa Lainnya	35.500.000	161.636.153
TOTAL PENERIMAAN		Rp2.227.893.000	Rp577.076.416



Pada Triwulan I Tahun 2026, realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bungus mencapai Rp577.076.416 dari target tahunan sebesar Rp2.227.893.000, atau sekitar 25,9%. Pendapatan terbesar berasal dari Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan dengan realisasi Rp201.536.000. Kontributor utama lainnya adalah Pendapatan Jasa Lainnya yang mencapai Rp161.636.153 dari target Rp35.500.000 atau sekitar 455,3%, menunjukkan capaian yang jauh melampaui target. Selain itu, beberapa layanan juga menunjukkan kinerja cukup baik, seperti Pelayanan Tambat untuk Kapal Perikanan

sebesar Rp36.348.050 dari target Rp105.000.000 (34,6%), Pelayanan Tambat untuk Kapal Non Perikanan sebesar Rp34.324.500 dari target Rp1.050.000.000 (3,3%), serta Pelayanan Docking dengan Pekerja sebesar Rp29.600.000 dari target Rp200.000.000 (14,8%).

Layanan lain yang berkontribusi antara lain Pelayanan Perbaikan Kapal sebesar Rp41.266.000 (56,9%), Pelayanan Penggunaan Peralatan dan Mesin sebesar Rp10.166.625 (10,2%), dan Pelayanan Pengadaan Air sebesar Rp28.210.000 (78,4%). Sementara itu, beberapa layanan masih menunjukkan capaian rendah, seperti Pelayanan Penggunaan Tanah dan Bangunan (1,7%), Pelayanan Pas Masuk Berlangganan (8,1%), serta Pelayanan Kebersihan Kolam Pelabuhan (6,2%). Terdapat pula layanan yang belum terealisasi, yaitu Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin.

Secara umum, capaian PNBP pada Triwulan I masih berada pada tahap awal (25,9%), namun terdapat beberapa jenis layanan yang telah melampaui target secara signifikan. Hal ini menunjukkan potensi peningkatan penerimaan pada triwulan berikutnya apabila optimalisasi layanan dan pemanfaatan fasilitas pelabuhan terus ditingkatkan.

Tabel 5. Capaian Penerima PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

SK 1 Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus								
IK 1 Penerimaan PNBP Non SDA di PPS Bungus								
Tahunan 2026			Triwulan I			Triwulan I Tahun Sebelumnya (2025)		
Target	Capaian	%	Target	Capaian	%	Target	Capaian	%
2.227,89	577,08	25,90%	400	577,08	144,27%	400	390,97	97,74%

Berdasarkan Tabel 5, capaian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Non-Sumber Daya Alam (Non-SDA) di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bungus hingga Triwulan I Tahun 2026 menunjukkan kinerja yang sangat baik. Realisasi penerimaan mencapai Rp577,08 juta dari target triwulan sebesar Rp400 juta, atau sebesar 144,27%. Capaian ini menunjukkan bahwa target triwulan berhasil terlampaui secara signifikan, yang mencerminkan peningkatan efektivitas layanan serta optimalisasi pemanfaatan fasilitas pelabuhan.

Jika dibandingkan dengan target tahunan sebesar Rp2.227,89 juta, capaian hingga Triwulan I telah mencapai sekitar 25,90%. Persentase ini menunjukkan bahwa kinerja awal tahun berada pada jalur yang cukup baik dalam mendukung pencapaian target akhir tahun, meskipun masih diperlukan upaya konsisten pada triwulan berikutnya.

Namun, jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, terlihat adanya peningkatan kinerja. Pada Triwulan I Tahun 2025, realisasi penerimaan tercatat sebesar Rp390,97 juta dari target Rp400 juta, atau sebesar 97,74%. Dengan demikian, capaian Triwulan I Tahun 2026 mengalami peningkatan sebesar Rp186,11 juta atau sekitar 47,6% dibandingkan tahun sebelumnya.

Peningkatan ini mengindikasikan adanya perbaikan aktivitas ekonomi di kawasan pelabuhan, terutama pada layanan jasa kepelabuhanan seperti tambat kapal, penggunaan fasilitas, serta layanan pendukung lainnya.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis seperti meningkatkan efektivitas penagihan dan kepatuhan pengguna jasa, mengoptimalkan pemanfaatan fasilitas pelabuhan yang berpotensi meningkatkan pendapatan, serta melakukan monitoring dan evaluasi rutin terhadap layanan yang memberikan kontribusi signifikan terhadap PNBP.

Upaya-upaya tersebut diharapkan dapat menjaga tren positif penerimaan PNBP Non-SDA pada triwulan berikutnya serta memastikan tercapainya target tahunan yang telah ditetapkan.

Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

Analisa Keberhasilan

- 1 **Capaian Triwulan Melampaui Target**
Realisasi PNBP Non-SDA Triwulan I Tahun 2026 sebesar **144,27%** (Rp577,08 juta dari target Rp400 juta) menunjukkan bahwa PPS Bungus mampu melampaui target triwulanan secara signifikan. Hal ini mencerminkan kinerja yang sangat baik dalam pengelolaan layanan serta efektivitas pemungutan PNBP.
- 2 **Peningkatan Dibanding Tahun Sebelumnya**
Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya (97,74%), capaian tahun 2026 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Realisasi meningkat dari Rp390,97 juta menjadi Rp577,08 juta atau naik sekitar **47,6%**, yang menunjukkan adanya perbaikan aktivitas layanan dan optimalisasi penerimaan.
- 3 **Kontribusi Layanan Utama Stabil dan Optimal**
Layanan seperti penggunaan peralatan dan mesin, tambat kapal perikanan, serta jasa kepelabuhanan lainnya tetap menjadi kontributor utama penerimaan. Kinerja sektor ini menunjukkan tren positif dan menjadi penopang utama capaian yang melampaui target.
- 4 **Kesiapan Administratif dan Sistem Penarikan PNBP**
Proses administrasi, penagihan, dan pelaporan PNBP berjalan dengan baik, tercermin dari tingginya realisasi penerimaan di awal tahun. Hal ini menunjukkan adanya tata kelola yang semakin tertib dan efektif.

Analisa Kegagalan

- 1 **Capaian Tahunan Masih Relatif Awal**
Meskipun capaian triwulan sangat tinggi, realisasi terhadap target tahunan baru mencapai **25,90%**. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja masih perlu dijaga konsistensinya pada triwulan berikutnya agar target tahunan Rp2.227,89 juta dapat tercapai.
- 2 **Ketergantungan pada Jenis Layanan Tertentu**
Penerimaan masih didominasi oleh beberapa jenis layanan utama. Ketergantungan ini berpotensi menjadi risiko apabila terjadi penurunan aktivitas pada sektor tersebut.
- 3 **Belum Optimalnya Pemanfaatan Layanan Lain**
Masih terdapat beberapa layanan yang kontribusinya relatif rendah, seperti pemanfaatan fasilitas tertentu atau layanan tambahan lainnya, yang menunjukkan adanya potensi penerimaan yang belum tergarap secara maksimal.
- 4 **Potensi Pengaruh Faktor Eksternal**
Keberlanjutan capaian tetap dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti jumlah kunjungan kapal, aktivitas usaha perikanan, serta kondisi ekonomi yang dapat memengaruhi permintaan layanan pelabuhan.

Analisa Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja

Salah satu program yang berkontribusi signifikan terhadap keberhasilan pencapaian IKU “Penerimaan PNBP Non-SDA di PPS Bungus” adalah kegiatan pendampingan dan supervisi operasional. Program ini berperan penting dalam memastikan seluruh layanan pelabuhan berjalan sesuai SOP, tarif, dan ketentuan yang berlaku.

Pendampingan yang dilakukan secara rutin memungkinkan identifikasi dini terhadap kendala teknis maupun administratif dalam proses pelayanan. Selain itu, supervisi lapangan membantu memastikan optimalisasi layanan seperti tambat kapal, penggunaan fasilitas, dan peralatan, yang merupakan sumber utama PNBP. Program ini juga mendorong peningkatan kepatuhan pengguna jasa dalam melakukan pembayaran serta memperkuat koordinasi antarunit kerja.

Namun demikian, pelaksanaan kegiatan ini masih menghadapi beberapa kendala, seperti keterbatasan SDM pengawas yang menyebabkan belum optimalnya cakupan supervisi, serta belum maksimalnya digitalisasi sistem monitoring PNBP secara real-time. Hal ini berpotensi memengaruhi akurasi data dan optimalisasi penerimaan.

Selain itu, program pendukung lain seperti optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana, peningkatan sistem penagihan, serta promosi layanan pelabuhan masih perlu diperkuat guna memperluas basis penerimaan.

Secara keseluruhan, capaian Triwulan I Tahun 2026 yang telah melampaui target triwulan menunjukkan bahwa program yang dijalankan sudah berada pada jalur yang tepat. Namun, untuk memastikan target tahunan tercapai, diperlukan langkah lanjutan berupa peningkatan intensitas supervisi, penguatan sistem digitalisasi, serta optimalisasi seluruh potensi layanan agar kinerja tetap terjaga secara berkelanjutan.

Sasaran Kinerja (SK) 2: Produktivitas Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus Meningkatkan

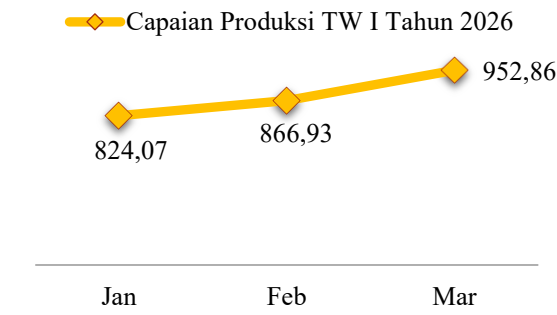
Sasaran kinerja kedua (SK-2) yang akan dicapai adalah “Produktivitas Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus meningkat”. Pencapaian sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja berikut:

Indikator Kinerja (IK) 2 – Volume Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

Volume produksi perikanan tangkap mencerminkan total hasil tangkapan yang didaratkan di PPS Bungus dalam periode tertentu. Proses pengumpulan data dilakukan oleh petugas pendataan melalui pencatatan langsung terhadap setiap aktivitas pendaratan ikan menggunakan formulir monitoring harian. Data yang terkumpul kemudian melalui tahapan verifikasi untuk memastikan keakuratan dan kelengkapan, sebelum diolah oleh petugas pengelola data. Hasil pengolahan tersebut selanjutnya disusun dan dilaporkan secara rutin dalam bentuk laporan harian, bulanan, hingga triwulanan sebagai gambaran realisasi produksi perikanan tangkap di PPS Bungus.

Tabel 6. Capaian Volume Produksi Perikanan Tangkap di PPS Bungus TW I Tahun 2026

No	Bulan	Volume Jumlah Produksi (Ton)	Nilai Produksi (Rp. Juta)
1	Januari	824,07	Rp. 9.505.352.000
2	Februari	866,93	Rp. 8.141.037.000
3	Maret	952,86	Rp. 9.062.210.000
Total		2.643,86	



Gambar 3 Capaian Volume Produksi

Berdasarkan Tabel 6, total volume produksi perikanan tangkap di PPS Bungus hingga akhir Triwulan I Tahun 2026 mencapai 2.643,86 ton dengan nilai produksi sebesar sekitar Rp26,71 miliar. Selama periode Januari hingga Maret 2026, volume produksi menunjukkan tren yang relatif stabil dengan kecenderungan meningkat, yaitu 824,07 ton pada Januari, 866,93 ton pada Februari, dan 952,86 ton pada Maret.

Tren peningkatan ini mencerminkan bahwa aktivitas penangkapan dan pendaratan ikan di PPS Bungus berjalan dengan baik dan mengalami penguatan secara bertahap pada awal tahun. Kenaikan produksi dari bulan ke bulan menunjukkan adanya peningkatan intensitas operasi penangkapan serta dukungan kondisi operasional yang cukup kondusif.

Faktor pendukung seperti kesiapan armada penangkapan, optimalnya pelayanan pelabuhan, serta kondisi cuaca yang relatif mendukung turut berperan dalam menjaga stabilitas sekaligus mendorong peningkatan produksi. Selain itu, pemanfaatan fasilitas pelabuhan yang semakin baik juga memberikan kontribusi terhadap kelancaran aktivitas bongkar muat hasil tangkapan.

Meskipun belum terjadi lonjakan yang sangat signifikan, tren positif pada Triwulan I ini menjadi modal awal yang baik untuk peningkatan produksi pada triwulan berikutnya. Hal ini sejalan dengan upaya PPS Bungus dalam mengoptimalkan layanan dan operasional pelabuhan guna meningkatkan produktivitas perikanan tangkap secara berkelanjutan serta mendukung peningkatan kontribusi sektor perikanan.

Tabel 7. Capaian Volume Produksi Perikanan Tangkap di PPS Bungus

SK 2 Produktivitas Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus Meningkat								
IK 2 Volume Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus								
Tahunan 2026			Triwulan I (Tahun 2026)			Triwulan I Tahun Sebelumnya (2025)		
Target	Capaian	%	Target	Capaian	%	Target	Capaian	%
10.090,69	2.643,86	26,20%	2.018,14	2.643,86	131,00%	2.050	2.424,1	118,25%

Berdasarkan Tabel 7, produktivitas perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bungus pada Triwulan I Tahun 2026 menunjukkan capaian yang sangat baik dan melampaui target yang telah ditetapkan. Realisasi volume produksi tercatat sebesar 2.643,86 ton atau mencapai 131,00% dari target triwulan sebesar 2.018,14 ton. Capaian ini mencerminkan kinerja operasional yang efektif serta tingginya aktivitas pendaratan ikan di PPS Bungus pada awal tahun.

Secara kumulatif terhadap target tahunan 2026 sebesar 10.090,69 ton, capaian hingga Triwulan I telah mencapai 26,20%. Persentase ini menunjukkan bahwa kinerja produksi berada pada jalur yang cukup baik dalam mendukung pencapaian target akhir tahun, meskipun masih diperlukan konsistensi pada triwulan berikutnya.

Jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya, kinerja produksi mengalami peningkatan. Pada Triwulan I Tahun 2025, realisasi volume produksi tercatat sebesar 2.424,1 ton dengan capaian 118,25% dari target 2.050 ton. Dengan demikian, terjadi peningkatan volume produksi sebesar 219,76 ton atau sekitar 9,07% pada tahun 2026. Peningkatan ini menunjukkan adanya pertumbuhan aktivitas penangkapan dan pendaratan ikan yang lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya.

Secara keseluruhan, capaian ini mengindikasikan bahwa aktivitas perikanan tangkap di PPS Bungus berjalan optimal, didukung oleh faktor operasional yang stabil, kondisi perikanan yang mendukung, serta efektivitas layanan pelabuhan. Tren positif ini diharapkan dapat terus dipertahankan guna memastikan tercapainya target produksi tahunan secara maksimal.

Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

Analisa Keberhasilan

1 Capaian Produksi Melampaui Target

Kinerja produksi perikanan tangkap pada Triwulan I Tahun 2026 menunjukkan hasil yang sangat baik dengan capaian sebesar **131,00%** dari target triwulan. Realisasi volume produksi yang mencapai 2.643,86 ton mencerminkan tingginya aktivitas penangkapan dan pendaratan ikan di PPS Bungus serta efektivitas pengelolaan operasional pelabuhan.

2 Peningkatan Dibanding Tahun Sebelumnya

Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2025 (118,25%), terjadi peningkatan capaian baik dari sisi volume maupun persentase. Hal ini menunjukkan adanya pertumbuhan produktivitas serta perbaikan kinerja operasional secara berkelanjutan.

3 Stabilitas Aktivitas Produksi

Produksi perikanan tangkap pada awal tahun menunjukkan tren yang stabil, didukung oleh kesinambungan aktivitas melaut dan pendaratan ikan. Koordinasi yang baik antara nelayan dan pengelola pelabuhan turut menjaga ritme produksi tetap optimal.

4 Dukungan Layanan Pelabuhan yang Optimal

Pelayanan pelabuhan seperti tambat labuh, bongkar muat, penyediaan BBM dan air bersih, serta fasilitas pendukung lainnya berjalan dengan baik. Hal ini memberikan kemudahan bagi nelayan dalam melakukan aktivitas penangkapan dan pendaratan hasil tangkapan.

Analisa Kegagalan / Tantangan

1 Capaian Tahunan Masih Awal

Meskipun capaian triwulan tinggi, realisasi terhadap target tahunan baru mencapai **26,20%**, sehingga masih diperlukan upaya berkelanjutan untuk menjaga konsistensi produksi pada triwulan berikutnya.

2 Keterbatasan Fasilitas Rantai Dingin

Kapasitas cold storage yang masih terbatas menyebabkan hasil tangkapan belum dapat disimpan secara optimal, sehingga berpotensi mengurangi efisiensi dan nilai tambah produksi.

3 Fluktuasi Aktivitas dan Faktor Eksternal

Produktivitas perikanan sangat dipengaruhi oleh kondisi cuaca, musim penangkapan, serta ketersediaan sumber daya ikan. Perubahan faktor-faktor tersebut dapat memengaruhi stabilitas produksi pada periode berikutnya.

4 Potensi Tidak Tercatatnya Seluruh Produksi

Sebagian hasil tangkapan nelayan berpotensi tidak tercatat apabila didaratkan di pelabuhan lain atau tidak dilaporkan, sehingga memengaruhi akurasi data capaian produksi.

Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja

Analisa Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan

Beberapa program yang mendukung capaian positif indikator kinerja volume produksi pada Triwulan I Tahun 2026 antara lain:

1 Pemantauan dan Evaluasi Pengelolaan serta Statistik Perikanan Tangkap

Kegiatan ini berperan dalam memastikan data produksi tercatat secara akurat dan tepat waktu. Monitoring rutin membantu dalam mengidentifikasi tren produksi serta kendala yang dihadapi di lapangan.

2 Pelaksanaan Pendataan Produksi Perikanan

Pendataan yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan mendukung tersedianya data yang valid dan akuntabel. Hal ini tidak hanya menunjang capaian indikator kinerja, tetapi juga

menjadi dasar dalam perumusan kebijakan dan optimalisasi PNBPN.

Kedua program tersebut berkontribusi dalam meningkatkan keandalan data, memperkuat pengawasan aktivitas produksi, serta mendukung peningkatan produktivitas perikanan tangkap.

Catatan Tantangan atau Potensi Kegagalan

Meskipun program/kegiatan telah mendukung pencapaian kinerja, terdapat beberapa tantangan teknis yang dapat menjadi titik lemah apabila tidak diantisipasi, di antaranya:

- 1 Keterbatasan SDM Pendata**
Jumlah dan kapasitas petugas pendata di lapangan masih terbatas, terutama saat aktivitas pendaratan tinggi, sehingga berpotensi menyebabkan keterlambatan atau ketidaklengkapan data.
- 2 Tingkat Kepatuhan Pelaporan Nelayan**
Masih terdapat nelayan yang belum sepenuhnya patuh dalam melaporkan hasil tangkapannya, yang berdampak pada belum optimalnya pencatatan produksi secara keseluruhan.
- 3 Belum Optimalnya Digitalisasi Sistem**
Sistem pencatatan dan pelaporan produksi belum sepenuhnya terintegrasi secara real-time, sehingga berpotensi menimbulkan perbedaan data dan menghambat proses monitoring secara cepat dan akurat.

Sasaran Kinerja (SK) 3: Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus yang Optimal dan Bertanggung Jawab

Sasaran kinerja keenam (SK-3) yang akan dicapai adalah “Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus yang Optimal dan Bertanggung Jawab”. Pencapaian sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja berikut:

Indikator Kinerja (IK) 3 – Persentase Permohonan Pengusahaan yang Dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Persen)

Sesuai dengan Permen KP Nomor 8 Tahun 2012, pelabuhan perikanan mempunyai fungsi pemerintahan dan pengusahaan. Fungsi pengusahaan fungsi untuk melaksanakan pengusahaan berupa penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal perikanan dan jasa terkait di Pelabuhan Perikanan.

Sesuai dengan PP 85 Tahun 2021 jenis PNBPN yang berlaku di KKP diantaranya meliputi penerimaan dari Pelabuhan Perikanan, diantaranya melalui sewa laha/gedung/bangunan yang mana dalam prosesnya diperlukan analisis atau evaluasi permohonan pengusahaan.

Target dan Realisasi

Indikator Persentase permohonan pengusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi merupakan perhitungan dari usulan pengusahaan baik baru ataupun perpanjangan yang dianalisa dan/atau dievaluasi dibandingkan dengan total jumlah usulan pengusahaan yang masuk di PPS Bungus. Realisasi indikator ini disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 8 Capaian Persentase Permohonan Pengusahaan yang Dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

SK 3		Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus yang Optimal dan Bertanggung Jawab						
IK 3		Persentase Permohonan Pengusahaan yang Dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Persen)						
Tahunan 2026			Triwulan I (Tahun 2026)			Triwulan I Tahun Sebelumnya (2025)		
Target	Capaian	%	Target	Capaian	%	Target	Capaian	%
100	-	-	-	-	-	-	-	-

Berdasarkan Tabel 8, indikator “Persentase Permohonan Pengusahaan yang Dianalisa dan/atau Dievaluasi” memiliki target 100% yang ditetapkan secara tahunan. Pada Triwulan I Tahun 2026 belum terdapat data capaian karena indikator ini bersifat kumulatif dan pengukurannya dilakukan di akhir periode. Oleh karena itu, capaian belum dapat dihitung pada awal tahun dan evaluasi kinerja akan lebih relevan dilakukan pada Semester II atau akhir tahun setelah seluruh permohonan diproses.

Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

Pada Triwulan I Tahun 2026, indikator persentase permohonan pengusahaan yang dianalisis dan/atau dievaluasi belum dapat diukur karena target ditetapkan secara tahunan dan belum terdapat data capaian. Oleh karena itu, analisa keberhasilan maupun kegagalan belum dapat dilakukan secara kuantitatif.

Namun demikian, secara potensi, faktor yang mendukung pencapaian indikator ini antara lain kesiapan tindak lanjut terhadap setiap permohonan yang masuk, ketersediaan peluang investasi, serta dukungan lahan dan fasilitas di PPS Bungus. Di sisi lain, masih terdapat tantangan berupa belum optimalnya pemanfaatan lahan dan bangunan yang tersedia, serta potensi rendahnya jumlah permohonan pengusahaan pada awal tahun.

Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja

Program yang mendukung pencapaian indikator ini adalah pelaksanaan tata kelola dan operasional pengusahaan pelabuhan yang baik. Penerapan prosedur yang jelas serta koordinasi antarunit kerja menjadi kunci agar setiap permohonan dapat diproses secara tepat waktu dan akurat.

Selain itu, kegiatan sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha juga menjadi penting untuk meningkatkan minat pengusahaan di PPS Bungus. Dengan penguatan aspek tata kelola, operasional, dan promosi layanan, diharapkan capaian indikator ini dapat terealisasi secara optimal pada akhir tahun.

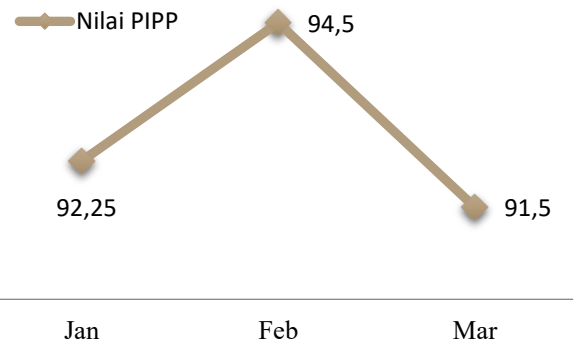
Indikator Kinerja (IK) 4 – Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

IKU Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus merupakan penilaian kegiatan operasional pelabuhan perikanan sesuai keputusan Dirjen No 20/2015 tentang pedoman evaluasi kinerja operasional pelabuhan perikanan yang ada pada aplikasi PIPP. Sebagai bagian dari kegiatan manajemen untuk menilai kinerja Pelabuhan Perikanan. Acuan dalam meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat perikanan. Ruang lingkup meliputi : 1) administrasi dan sistem informasi; 2) fasilitas pelabuhan perikanan; 3) pelayanan umum; 4) investasi dan industri.

IKU ini juga merupakan nilai atas capaian tingkat operasional laporan yang mendukung kegiatan-kegiatan operasional UPT PPS Bungus berupa pengumpulan data, informasi, publikasi, dan kegiatan pembangunan pelabuhan perikanan yang di nilai setiap bulan dari eselon I DJPT (EVKIN) yang meliputi 27 jenis kriteria yaitu: Frekuensi Pengiriman Data (PIPP), ELogbook, Aplikasi SPB-online, SHTI, Realisasi Penyerapan Anggaran, Pendapatan Pelabuhan, Ketersediaan SDM Pengelola Pelabuhan Perikanan, Kapasitas Daya Tampung Kolam Pelabuhan, Panjang Dermaga, Kedalaman Kolam, Sarana Perbaikan (Docking, bengkel), Kelengkapan Fasilitas Pemasaran & Distribusi Ikan, Ketersediaan Lahan Pelabuhan, Pelayanan Tambat Labuh, Produksi Perikanan, Frekuensi Kunjungan Kapal, STBLKK, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis, Fasilitasi Penyuluhan, Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Ikan, Perkarantinaan Ikan, Publikasi, Pelaksanaan K5, Penyaluran Air Bersih (kapal dan industri pengolahan), Penyaluran Es (kapal), Penyaluran BBM (kapal), Pelayanan Pengolahan Hasil Perikanan di WKOPP, Pemanfaatan Lahan Pelabuhan, Penyerapan Tenaga Kerja, Perubahan Jumlah Investor di Pelabuhan Perikanan.

Target dan Realisasi

Berdasarkan data capaian nilai kinerja bulanan, Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bungus mencatat rata-rata tingkat kinerja sebesar 92,75 selama Triwulan I Tahun 2026. Nilai tersebut diperoleh dari capaian Januari sebesar 92,25, Februari 94,5, dan Maret 91,5. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pelabuhan berada pada kategori sangat baik dan relatif stabil sepanjang awal tahun.



Terlihat adanya peningkatan kinerja pada Februari yang mencapai nilai tertinggi, kemudian sedikit menurun pada Maret, namun tetap berada di atas angka 90. Pola ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan fungsi pelabuhan berjalan optimal, meskipun terdapat dinamika operasional yang wajar.

Secara umum, nilai kinerja yang konsisten tinggi mencerminkan efektivitas dalam aspek pelayanan, operasional, pengelolaan fasilitas, serta administrasi pelabuhan. Selain itu, koordinasi antarunit kerja yang baik, kepatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP), serta dukungan dari para pemangku kepentingan turut berkontribusi terhadap capaian tersebut.

Dengan capaian rata-rata di atas 90, PPS Bungus menunjukkan kinerja yang solid pada Triwulan I Tahun 2026. Kondisi ini menjadi modal yang baik untuk mempertahankan bahkan meningkatkan kualitas pelayanan dan operasional pada periode berikutnya.

Tabel 9. Capaian Tingkat Operasional Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

SK 3 Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus yang Optimal dan Bertanggung Jawab									
IK 4 Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus									
Tahunan 2026			Triwulan I (Tahun 2026)			Triwulan I Tahun Sebelumnya (2025)			
Target	Capaian	%	Target	Capaian	%	Target	Capaian	%	
86,25	92,75	107,54%	86,25	92,75	107,54%	86	91,08	105,91%	

Berdasarkan Tabel 9, indikator kinerja (IK 4) yang mengukur Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bungus pada Triwulan I Tahun 2026 menunjukkan capaian sebesar 92,75 poin, melampaui target triwulan dan tahunan yang ditetapkan sebesar 86,25 poin, dengan persentase realisasi mencapai 107,54%. Capaian ini menunjukkan bahwa kinerja pelabuhan berada pada kategori sangat baik di awal tahun.

Jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya, juga terjadi peningkatan kinerja. Pada Triwulan I Tahun 2025, capaian sebesar 91,08 poin dengan target 86 poin atau 105,91%. Dengan demikian, terdapat peningkatan baik dari sisi nilai maupun persentase capaian pada tahun 2026, yang menunjukkan adanya perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan pelabuhan. Peningkatan nilai kinerja ini mengindikasikan bahwa PPS Bungus semakin optimal dalam menjalankan fungsi pengelolaan pelabuhan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Hal ini mencerminkan keberhasilan dalam aspek pelayanan, operasional, pengelolaan fasilitas, serta administrasi pelabuhan yang berjalan secara terintegrasi.

Secara keseluruhan, capaian ini menunjukkan bahwa PPS Bungus mampu mempertahankan bahkan meningkatkan kualitas kerjanya, serta menjaga konsistensi dalam memberikan pelayanan publik yang baik di sektor perikanan. Tren positif ini menjadi modal penting untuk mempertahankan kinerja hingga akhir tahun.

Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja

Kegiatan yang menunjang tercapainya IKU tingkat operasional pelabuhan perikanan adalah

pelaksanaan tata kelola dan operasional PIPP di Pelabuhan Perikanan dalam hal pengelolaan dan operasional Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP).

Indikator Kinerja (IK) 5 – Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

Indikator Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus merupakan indikator yang menunjukkan :

1. Jumlah persetujuan berlayar yang diterbitkan (SPB), yaitu jumlah persetujuan berlayar / jumlah kapal yang beraktivitas di pelabuhan
2. Jumlah surat tanda bukti lapor kedatangan (STBLK) yang diterbitkan, yaitu jumlah kapal yang diterbitkan STBLK / jumlah kapal yang beraktivitas di pelabuhan
3. Jumlah sertifikat hasil tangkapan ikan (SHTI) yang diterbitkan, yaitu jumlah permintaan verifikasi SHTI dibagi dengan jumlah SHTI yang diterbitkan.

Target dan Realisasi

Tabel 10 Capaian Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

SK 3 Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus yang Optimal dan Bertanggung Jawab								
IK 5 Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus								
Tahunan 2026			Triwulan I (Tahun 2026)			Triwulan I Tahun Sebelumnya (2025)		
Target	Capaian	%	Target	Capaian	%	Target	Capaian	%
83	-	-	-	-	-	-	-	-

Realisasi capaian indikator Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus belum dapat dihitung pada Triwulan I Tahun 2026 karena metode pengukurannya bersifat tahunan dan dilakukan secara kumulatif. Indikator ini baru akan dievaluasi pada Triwulan IV setelah seluruh data dan kegiatan operasional kesyahbandaran selama satu tahun terkumpul. Oleh karena itu, capaian indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2025, mengingat pada kedua tahun tersebut pengukuran dilakukan pada waktu yang sama, yaitu di akhir tahun. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa evaluasi dilakukan secara menyeluruh dan akurat, mencerminkan kualitas pelayanan kesyahbandaran dalam satu tahun penuh.

Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

Keberhasilan capaian indikator tingkat pelayanan kesyahbandaran pelabuhan Perikanan Samudera Bungus di dukung dengan kinerja tim kesyahbandaran dalam menghimbau para pemilik ataupun pengurus kapal perikanan yang akan melakukan docking di kolam pelabuhan untuk mengurus dan melengkapi surat perizinan dengan lengkap. Realisasi ini juga didukung dengan adanya kesadaran pemilik kapal dalam mengajukan permohonan SPB, STBLK kedatangan kapal dan SHTI yang semakin meningkat.

Sementara dalam upaya pencapaian realisasi indikator ini, yang menjadi penghambat keberhasilan adalah masih ada kapal-kapal di kolam pelabuhan yang akan Docking namun belum memiliki dokumen yang lengkap.

Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian tingkat pelayanan kesyahbandaran pelabuhan Perikanan Samudera Bungus adalah pelaksanaan tata kelola dan operasional kesyahbandaran di pelabuhan perikanan.

Indikator Kinerja (IK) 6 – Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

Sesuai dengan Permen KP Nomor 8 Tahun 2012, Pelabuhan perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan. Dalam rangka menunjang fungsi pelabuhan perikanan, setiap pelabuhan perikanan memiliki fasilitas yang terdiri dari fasilitas pokok, fasilitas fungsional dan fasilitas penunjang. Pelabuhan perikanan yang telah beroperasi dapat dilakukan pengembangan sesuai dengan kebutuhannya.

Realisasi indikator Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus dihitung dengan membandingkan jumlah pengembangan Fasilitas PPS Bungus dengan masterplan/draft perubahan masterplan PPS Bungus.

Target dan Realisasi

Tabel 11 Capaian Indikator Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

SK 3 Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus yang Optimal dan Bertanggung Jawab								
IK 6 Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus								
Tahunan 2026			Triwulan I (Tahun 2026)			Triwulan I Tahun Sebelumnya (2025)		
Target	Capaian	%	Target	Capaian	%	Target	Capaian	%
70	-	-	-	-	-	-	-	-

Realisasi capaian indikator Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus belum dapat dihitung pada Triwulan I Tahun 2026 karena metode pengukurannya bersifat tahunan dan dilakukan secara kumulatif. Indikator ini mengukur tingkat efektivitas pengendalian terhadap kegiatan pengembangan fasilitas pelabuhan sepanjang tahun, sehingga perhitungan baru dapat dilakukan pada akhir tahun atau Triwulan IV. Dengan demikian, capaian indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2025, karena pada tahun tersebut pengukurannya juga dilakukan di Triwulan IV. Pendekatan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa evaluasi pengendalian dilakukan secara komprehensif, mencakup seluruh kegiatan pengembangan yang berlangsung selama satu tahun penuh.

Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

Faktor pendukung keberhasilan realisasi indikator Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus didukung oleh pelaksanaan pengembangan fasilitas pelabuhan perikanan samudera Bungus yang telah sesuai dengan masterplan yang telah di riviui.

Faktor yang dapat menjadi penghambat keberhasilan indikator ini adalah masih terbatasnya anggaran untuk pelaksanaan pembangunan/pengembangan fasilitas pelabuhan perikanan untuk mendukung Penangkapan Ikan Terukur. Meskipun adanya permasalahan dalam upaya pencapaiannya, PPS Bungus telah berupaya mengoptimalkan kegiatan pengembangan fasilitas dengan kondisi anggaran yang tersedia.

Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian indikator Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus adalah pelaksanaan pembangunan/pengembangan fasilitas pelabuhan perikanan di UPT Pusat untuk mendukung Penangkapan Ikan Terukur.

Indikator Kinerja (IK) 7 – Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

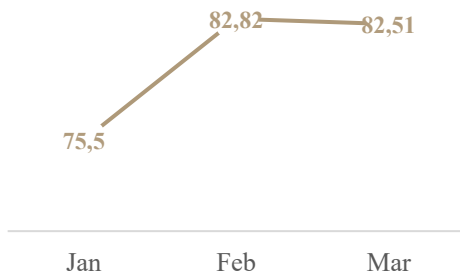
Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan, penyelenggaraan pelabuhan perikanan yang mengoperasikan pelabuhan perikanan harus 1) bertanggung jawab sepenuhnya atas pengoperasian pelabuhan perikanan yang bersangkutan; dan 2) menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan dan lingkungan. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, persetujuan lingkungan melalui penyusunan amdal dan uji kelayakan amdal atau penyusunan formulir UKL-UPL dan pemeriksaan UKL-UPL.

Penilaian pengendalian lingkungan pelabuhan perikanan berdasarkan aplikasi Sistem Informasi dan Monitoring Tata Kelola Lingkungan Pelabuhan Perikanan (SELARASKAN). SELARASKAN merupakan sistem informasi berbasis WEB yang berfungsi sebagai alat monitoring tata kelola lingkungan di pelabuhan perikanan yang berisikan program lingkungan hingga hasil pencapaian kualitas lingkungan yang di update berkala dan dicantumkan dalam bentuk skor Pelabuhan.

Target dan Realisasi

Tabel 12 Capaian Indikator Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

SK 4 Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus yang Optimal dan Bertanggung Jawab								
IK 7 Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus								
Tahunan 2026			Triwulan I (Tahun 2026)			Triwulan I Tahun Sebelumnya (2025)		
Target	Capaian	%	Target	Capaian	%	Target	Capaian	%
33	80,28	243,27	33	80,28	243,27	30,10	94,54	314,1%



Gambar 4. Skor Penilaian aplikasi SELARASKAN Triwulan I tahun 2026

Berdasarkan tabel, indikator kinerja (IK 7) Nilai Pengendalian Lingkungan di PPS Bungus pada Triwulan I Tahun 2026 menunjukkan capaian yang sangat tinggi, yaitu sebesar 80,28 poin dari target 33 poin, dengan persentase realisasi mencapai 243,27%. Capaian ini menunjukkan bahwa pengendalian lingkungan telah melampaui target yang ditetapkan, baik secara triwulanan maupun tahunan.

Namun, jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, terjadi penurunan capaian. Pada Triwulan I Tahun 2025, nilai pengendalian lingkungan mencapai 94,54 poin atau 314,1% dari target 30,10 poin. Dengan demikian, meskipun capaian tahun 2026 masih sangat tinggi, terdapat

penurunan nilai sebesar 14,26 poin atau sekitar 15,08% dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan ini dapat mengindikasikan adanya dinamika dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian lingkungan, seperti variasi intensitas kegiatan, perubahan kondisi lingkungan, atau perbedaan metode penilaian. Meskipun demikian, capaian yang tetap jauh di atas target menunjukkan bahwa pengelolaan lingkungan di PPS Bungus masih berjalan dengan baik dan efektif.

Secara keseluruhan, hasil ini mencerminkan bahwa PPS Bungus tetap mampu menjaga kualitas pengendalian lingkungan pelabuhan melalui pengelolaan limbah, kebersihan kawasan, serta pemantauan kondisi lingkungan secara rutin. Ke depan, diperlukan upaya untuk menjaga konsistensi dan meningkatkan kembali capaian agar dapat menyamai bahkan melampaui kinerja tahun sebelumnya.

Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

Keberhasilan capaian IK 7 pada Triwulan I Tahun 2026 didukung oleh penguatan koordinasi dan pengelolaan data melalui pembentukan tim kerja yang lebih terstruktur dalam penginputan aplikasi SELARASKAN. Setiap anggota tim memiliki tanggung jawab yang jelas terhadap pemenuhan data

dukung (evidence), program mandatory, serta proses validasi, sehingga pelaksanaan pengendalian lingkungan menjadi lebih terarah dan terdokumentasi dengan baik.

Berdasarkan tren bulanan, nilai kinerja menunjukkan peningkatan dari Januari (75,5) ke Februari (82,82), kemudian relatif stabil pada Maret (82,51). Hal ini mengindikasikan adanya perbaikan kinerja di awal tahun yang didukung oleh proses koordinasi dan penginputan data yang semakin optimal.

Namun demikian, masih terdapat tantangan berupa fluktuasi nilai yang dipengaruhi oleh kelengkapan data dukung serta dinamika kriteria penilaian dalam aplikasi. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi berkala terhadap kinerja tim, peningkatan pemahaman terhadap indikator penilaian, serta penguatan kualitas data yang diinput.

Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja

Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian adalah pelaksanaan layanan dukungan Aplikasi SELARASKAN.

Sasaran Kinerja (SK) 4: Pengelolaan Awak Kapal Perikanan, Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Berkelanjutan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

Sasaran kinerja kelima (SK-4) yang akan dicapai adalah “Pengelolaan Awak Kapal Perikanan, Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Berkelanjutan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus”. Pencapaian sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja berikut:

Indikator Kinerja (IK) 8 - Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan

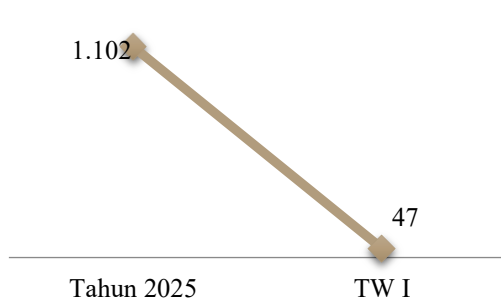
Berdasarkan Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, kewenangan penerbitan Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan dilaksanakan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan, perikanan. Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan merupakan surat kapal yang menyatakan bahwa kapal perikanan memenuhi aspek kelaiklautan, kelaiktangkapan, dan kelaiksimpanan. Setiap kapal perikanan yang akan beroperasi harus memenuhi persyaratan kelaikan kapal perikanan.

Indikator kinerja Dokumen Kapal Perikanan yang Diterbitkan merupakan jumlah dokumen kapal perikanan oleh PPS Bungus dengan formula perhitungan yaitu nilai posisi akhir jumlah dokumen kapal perikanan yang diterbitkan.

Target dan Realisasi

Tabel 13 Capaian Indikator Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan

SK 4	Pengelolaan Awak Kapal Perikanan, Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Berkelanjutan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus								
	IK 8 Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan								
Tahunan 2026			Triwulan I (Tahun 2026)			Triwulan I Tahun Sebelumnya (2025)			
Target	Capaian	%	Target	Capaian	%	Target	Capaian	%	
1.152	1.149	99,74%	1.112	1.149	103,33	695	797	114,68%	



Gambar 5. Capaian Kapal Perikanan Izin Daerah

Berdasarkan Tabel 13, capaian indikator Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan pada Tahun 2026 menunjukkan kinerja yang sangat baik. Secara tahunan, realisasi mencapai 1.149 kapal dari target 1.152 kapal atau sebesar 99,74%, yang berarti hampir seluruh target tahunan berhasil dipenuhi. Pada Triwulan I Tahun 2026, capaian bahkan melampaui target yang ditetapkan, dengan realisasi sebesar 1.149 kapal dari target 1.112 kapal atau

mencapai 103,33%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja di awal tahun sudah sangat optimal dan memberikan kontribusi signifikan terhadap pencapaian target tahunan.

Namun, jika dibandingkan dengan Triwulan I Tahun 2025, terjadi penurunan capaian secara persentase, yaitu dari 114,68% pada tahun sebelumnya menjadi 103,33% pada tahun 2026, atau turun sekitar 11,35 poin persentase. Meskipun demikian, capaian tahun 2026 tetap berada di atas target, yang menandakan bahwa tingkat kepatuhan dan efektivitas pelaksanaan pengawasan serta pembinaan perizinan kapal masih terjaga dengan baik.

Secara keseluruhan, hasil ini mencerminkan peran strategis PPS Bungus dalam memastikan kapal perikanan memenuhi ketentuan perizinan daerah. Konsistensi capaian yang tinggi ini juga menunjukkan bahwa sistem pelayanan, pengawasan, dan pembinaan yang dilakukan telah berjalan efektif dalam mendukung pengelolaan perikanan tangkap yang tertib, legal, dan berkelanjutan.

Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

Faktor pendukung tercapainya keberhasilan IK 8 antara lain 1) tingginya antusiasme pemilik kapal perikanan dalam melaporkan pengajuan pemeriksaan kaboal perikanan, sehingga realisasi untuk indikator ini tercapai dengan baik; 2) adanya dukungan anggaran yang cukup memadai terkait dengan pelaksanaan penerbitan SKKP sehingga pelaksanaan pengecekan dan pemeriksaan kapal perikanan dapat optimal.

Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian indikator Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan, yaitu adanya pelaksanaan implementasi kebijakan bidang kapal perikanan. Implementasi tersebut berupa pemeriksaan kelaikan, pengukuran, pengujian, dan inspeksi kapal perikanan. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kapal perikanan yang akan diterbitkan dokumennya memenuhi standar keamanan dan kelayakan yang ditetapkan.

Indikator Kinerja (IK) 9 – Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan

Indikator kinerja ini merupakan salah satu ukuran penting dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan awak kapal perikanan, kapal perikanan, dan alat penangkapan ikan berkelanjutan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus. IKU ini dirancang untuk mengukur sejauh mana pemenuhan terhadap persyaratan legal dan administratif bagi awak kapal perikanan yang bekerja, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2021, serta Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B.2541/MEN-KP/XII/2024.

Pelaksanaan indikator ini bertujuan untuk menjamin bahwa seluruh awak kapal perikanan telah memenuhi ketentuan yang berlaku terkait identitas, kompetensi, hubungan kerja, dan perlindungan sosial. Dengan memastikan kepatuhan terhadap regulasi tersebut, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan keselamatan kerja awak kapal secara menyeluruh, sekaligus menciptakan kondisi kerja yang manusiawi dan berkelanjutan di sektor perikanan tangkap.

Tingkat pemenuhan indikator ini diklasifikasikan ke dalam empat kategori berdasarkan capaian nilai: kategori “Kurang” apabila nilai $\leq 0,25$; kategori “Cukup” untuk nilai antara $> 0,25$ sampai $< 0,50$; kategori “Baik” untuk nilai antara $> 0,50$ sampai $< 0,75$; dan kategori “Sangat Baik” jika nilai $> 0,75$ sampai 1,00. Klasifikasi ini memberikan gambaran menyeluruh terhadap tingkat implementasi kebijakan dan komitmen para pemilik kapal serta stakeholder pelabuhan dalam memenuhi hak-hak awak kapal perikanan. Sebagai pelabuhan perikanan strategis, Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus berkomitmen untuk terus mendorong peningkatan nilai indikator ini sebagai bagian dari pengelolaan sumber daya manusia yang bertanggung jawab dan berkelanjutan dalam sektor kelautan dan perikanan.

Target dan Realisasi

Tabel 14 Capaian Indikator Persentase Peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Perlindungan Nelayan/Awak Kapal Perikanan

SK 4	Pengelolaan Awak Kapal Perikanan, Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Berkelanjutan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus								
	Tahunan 2026			Triwulan I (Tahun 2026)			Triwulan I Tahun Sebelumnya (2025)		
IK 9	Target	Capaian	%	Target	Capaian	%	Target	Capaian	%
Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan	0,28	-	-	-	-	-	-	-	-

Hingga Metode perhitungan indikator ini adalah semesteran, sehingga belum dapat dilakukan perhitungan pada triwulan I. Indikator kinerja Persentase Peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Perlindungan Nelayan/ Awak Kapal Perikanan.

Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

Faktor yang mendukung capaian indikator kinerja Persentase Peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Perlindungan Nelayan/Awak Kapal Perikanan antara lain adalah: 1) adanya kesadaran para awak kapal perikanan dan pemilik kapal perikanan dalam meningkatkan kompetensi, perlindungan (asuransi jiwa) dan melaksanakan PKL yang sudah meningkat; 2) terus melaksanakan sosialisasi dan pendekatan secara langsung kepada awak kapal perikanan dan pemilik kapal perikanan agar selalu meningkatkan kompetensi awak kapal, perlindungan (asuransi jiwa) untuk awak kapal dan melaksanakan PKL.

Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan dalam pencapaian indikator kinerja Persentase Peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Perlindungan Nelayan/Awak Kapal Perikanan adalah Pelaksanaan fasilitas dan pembinaan peningkatan pengetahuan/kompetensi nelayan.

Sasaran Kinerja (SK) 5: Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

Sasaran Kinerja ketujuh (SK-5) yang akan dicapai adalah Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus". Pencapaian sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja berikut:

Indikator Kinerja (IK) 10 – Nilai Capaian Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

Indikator ini merupakan salah satu ukuran penting dalam menilai komitmen Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bungus dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) diberikan kepada unit kerja yang dinilai berhasil melaksanakan reformasi birokrasi secara menyeluruh melalui pembangunan Zona Integritas (ZI).

Pembangunan Zona Integritas merupakan bagian dari strategi nasional pencegahan korupsi yang berfokus pada perbaikan sistem, tata kelola, serta budaya kerja organisasi. Penilaian capaian WBK di PPS Bungus didasarkan pada pemenuhan enam komponen utama, yaitu manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen sumber daya manusia, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Masing-masing komponen memiliki indikator dan bobot penilaian yang harus dipenuhi secara konsisten dan terukur. Pada aspek manajemen perubahan, misalnya, diperlukan keberadaan tim

kerja yang efektif, rencana kerja yang terarah, serta komitmen pimpinan dalam membangun budaya antikorupsi. Sementara itu, pada aspek pelayanan publik, penilaian mencakup penerapan standar layanan, keterbukaan informasi, inovasi pelayanan, serta efektivitas pengelolaan pengaduan masyarakat.

Capaian nilai pembangunan Zona Integritas menuju WBK tidak hanya mencerminkan tingkat kepatuhan terhadap prinsip reformasi birokrasi, tetapi juga menjadi indikator kepercayaan publik terhadap kualitas layanan yang diberikan. Oleh karena itu, IK ini memiliki peran strategis dalam mendorong terwujudnya PPS Bungus sebagai institusi yang profesional, berintegritas, serta berorientasi pada pelayanan prima.

Keberhasilan dalam meraih predikat WBK menjadi bukti nyata komitmen PPS Bungus dalam menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari praktik korupsi, sekaligus mendorong peningkatan kinerja organisasi secara berkelanjutan.

Target dan Realisasi

Tabel 15 Capaian Indikator Nilai Capaian Pembangunan Zona Integritas menuju WBK Pelabuhan Perikanan

SK 5 IK 10	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus		Nilai Capaian Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus						
	Tahunan 2026			Triwulan I (Tahun 2026)			Triwulan I Tahun Sebelumnya (2025)		
	Target	Capaian	%	Target	Capaian	%	Target	Capaian	%
	45,5	-	-	-	-	-	-	-	-

Hasil rekapitulasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Nilai Capaian Pembangunan Zona Integritas menuju WBK di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 belum menunjukkan capaian, karena perhitungan indikator ini dilakukan secara tahunan atau pada Triwulan IV tahun 2026.

Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

Keberhasilan dari kegiatan ini didukung dengan, 1) terlaksananya asistensi WBK yang dilakukan bersama dengan tim ortala DJPT, sehingga diperoleh hasil penilaian mandiri bersama tim asistensi; 2) adanya sinergitas antara seluruh bagian dalam upaya pelaksanaan kegiatan dan pelengkapan seluruh dokumen sesuai ketentuan; 3) adanya tim yang bekerja dengan efektif dan sesuai SOP yang telah ditetapkan, sehingga sebagian besar rekomendasi yang diberikan oleh tim asistensi dari Ortala DJPT dapat terselesaikan dengan baik. Saat ini yang menjadi kendala dalam pencapaian Indikator Kinerja Nilai Capaian Pembangunan Zona Integritas menuju WBK di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus adalah masih belum adanya inovasi yang dapat diterapkan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus.

Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja Nilai Capaian Pembangunan Zona Integritas menuju WBK Pelabuhan Perikanan Komponen kegiatan yang mendukung pencapaian IKU ini adalah adanya kegiatan persiapan penetapan zona integritas menuju WBK serta pelaksanaan evaluasi dan penetapan organisasi di Lingkungan KKP. Kegiatan persiapan penetapan zona integritas dilaksanakan dalam pada kegiatan pemenuhan dokumen WBK, penguatan komitmen bersama pembangunan zona integritas PPS Bungus. Serta adanya pelaksanaan Forum Konsultasi Publik dan Pemantauan Zona Integritas.

Indikator Kinerja (IK) 11 – Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja merupakan jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Ditjen Perikanan Tangkap berdasarkan LHP (terbatas pada audit, revidu, dan evaluasi baik bentuk surat maupun bab) yang terbit pada triwulan IV 2024 s.d. triwulan III tahun 2025 yang telah ditindaklanjuti (berstatus proses dan/atau tuntas) oleh Ditjen Perikanan Tangkap yang menjadi objek pengawasan. Formula penghitungan yaitu persentase jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti dibandingkan dengan jumlah rekomendasi yang diberikan.

Target dan Realisasi

Tabel 16 Capaian IK “Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja” Tahun 2026

SK 5 IK 11	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus								
	Tahunan 2026			Triwulan I (Tahun 2026)			Triwulan I Tahun Sebelumnya (2025)		
	Target	Capaian	%	Target	Capaian	%	Target	Capaian	%
	86	100	116,28	86	100	116,28	85	100	117,65

Berdasarkan hasil rekapitulasi laporan pengawasan sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT), tidak terdapat temuan maupun rekomendasi dalam Laporan Hasil Pengawasan Tahun 2026. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan dan tata kelola, khususnya di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bungus, telah berjalan sesuai dengan ketentuan dan standar yang berlaku tanpa adanya ketidaksesuaian yang signifikan.

Sejalan dengan kondisi tersebut, capaian indikator pada Triwulan I Tahun 2026 mencapai 100 dari target 86 atau sebesar 116,28%. Secara tahunan, capaian juga menunjukkan nilai yang sama, yaitu 100 atau 116,28% dari target yang telah ditetapkan. Hal ini mengindikasikan bahwa seluruh hasil pengawasan telah dimanfaatkan secara optimal dalam mendukung perbaikan kinerja organisasi.

Apabila dibandingkan dengan Triwulan I Tahun 2025, capaian tahun 2026 relatif stabil pada nilai realisasi (100), namun secara persentase mengalami sedikit penurunan dari 117,65% menjadi 116,28% atau turun sebesar 1,37 poin persentase. Penurunan ini disebabkan oleh adanya peningkatan target dari 85 pada tahun 2025 menjadi 86 pada tahun 2026, sehingga secara proporsional persentase capaian menjadi sedikit lebih rendah.

Secara keseluruhan, kondisi ini menegaskan bahwa pelaksanaan pengawasan di DJPT telah berjalan dengan baik dan sesuai harapan, serta menunjukkan komitmen kuat untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas tata kelola serta efektivitas tindak lanjut hasil pengawasan di masa mendatang.

Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

Keberhasilan yang paling menonjol adalah tidaknya terdapat temuan atau rekomendasi dari hasil pengawasan, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas, proses bisnis, dan tata kelola di lingkungan DJPT telah berjalan sesuai dengan standar dan regulasi yang berlaku. Hal ini mencerminkan komitmen tinggi seluruh unit kerja dalam menjalankan fungsi secara transparan, akuntabel, dan sesuai prosedur.

Selain itu, capaian indikator yang mencapai 100 persen bahkan 116,28 persen dari target tahunan mengindikasikan bahwa target yang ditetapkan tidak hanya terpenuhi, tetapi pelaksanaan pengawasan dan pengelolaan risiko juga berjalan sangat baik. Keberhasilan ini juga menunjukkan efektivitas koordinasi internal dan pengendalian mutu pelaksanaan tugas di lingkungan DJPT yang terus meningkat dari waktu ke waktu.

Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja

Analisis terhadap program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja hasil pengawasan Inspektorat Jenderal KKP Lingkup DJPT sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 menunjukkan adanya beberapa faktor pendukung dan kendala yang perlu diperhatikan.

Program penguatan sistem pengendalian internal dan manajemen risiko yang dilaksanakan secara berkelanjutan menjadi faktor utama yang mendukung keberhasilan pencapaian kinerja. Kegiatan audit internal, monitoring berkala, serta pelatihan dan pembinaan terkait kepatuhan terhadap regulasi telah berhasil meningkatkan kesadaran dan disiplin aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsi secara tepat dan akuntabel. Selain itu, sinergi yang baik antara unit kerja di lingkungan DJPT dan Inspektorat Jenderal KKP turut memperkuat proses pengawasan serta perbaikan sistem manajemen yang berjalan efektif.

Namun demikian, terdapat beberapa kendala yang masih perlu mendapat perhatian. Salah satunya adalah belum tersedianya mekanisme penetapan target yang sepenuhnya terukur dan realistis sesuai dengan kapasitas serta kondisi lapangan, sehingga terkadang target yang ditetapkan menjadi terlalu ambisius dan berpotensi menimbulkan gap antara target dan realisasi.

Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi informasi di beberapa unit kerja menjadi tantangan dalam pelaksanaan pengawasan dan pelaporan hasil kegiatan. Beberapa kegiatan pengawasan juga masih bersifat reaktif dan belum sepenuhnya didukung oleh data analitik yang komprehensif, sehingga peluang untuk mendeteksi risiko dan potensi penyimpangan secara dini masih terbatas.

Ke depan, diperlukan penguatan kapasitas SDM, pemanfaatan teknologi informasi, serta perbaikan mekanisme penetapan target agar pelaksanaan pengawasan semakin efektif, adaptif, dan mampu mendukung peningkatan kinerja organisasi secara menyeluruh.

Indikator Kinerja (IK) 12 – Nilai PM Sakip Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

Merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan pelabuhan secara mandiri. Nilai ini menjadi representasi dari komitmen dan kemampuan instansi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel. Penilaian dilakukan secara menyeluruh terhadap empat aspek utama, yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi kinerja, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP.

Setiap aspek memiliki bobot penilaian tersendiri yang menunjukkan kontribusinya terhadap keseluruhan sistem. Aspek perencanaan kinerja (30%) menilai kesesuaian antara tujuan, sasaran, dan indikator kinerja yang ditetapkan dengan rencana strategis dan prioritas nasional. Pengukuran kinerja (30%) mengevaluasi keterukuran indikator yang digunakan dan sejauh mana capaian kinerja dapat diukur secara objektif dan tepat. Pelaporan kinerja (15%) melihat kualitas penyusunan laporan kinerja, termasuk kelengkapan, ketepatan waktu, dan kesesuaian data yang disajikan. Sedangkan evaluasi kinerja (25%) berfokus pada keberadaan dan efektivitas mekanisme evaluasi internal dalam menindaklanjuti capaian dan kendala kinerja, serta pemanfaatan hasil evaluasi dalam pengambilan keputusan dan perbaikan berkelanjutan.

Nilai Penilaian Mandiri (PM) SAKIP menjadi indikator penting karena tidak hanya mencerminkan tingkat kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga menggambarkan budaya kerja berbasis kinerja di lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus. Capaian nilai ini menunjukkan tingkat kedewasaan organisasi dalam mengelola program secara terencana, terukur, transparan, dan berorientasi pada hasil. Semakin tinggi nilai PM SAKIP, maka semakin kuat pula kemampuan pelabuhan dalam menyelaraskan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan prinsip-prinsip

good governance serta pertanggungjawaban publik. Dengan demikian, indikator ini memiliki peran strategis dalam mendorong perbaikan tata kelola kelembagaan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pelayanan pemerintah, khususnya di sektor perikanan tangkap.

Target dan Realisasi

Tabel 17 Capaian Indikator Nilai PM Sakip Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

SK 5 IK 12	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus		Nilai PM Sakip Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus			Triwulan I Tahun Sebelumnya			
	Tahunan 2026		Triwulan I (Tahun 2026)			Triwulan I Tahun Sebelumnya			
	Target	Capaian	%	Target	Capaian	%	Target	Capaian	%
	88,2	-	-	-	-	-	-	-	-

Rekapitulasi capaian untuk Indikator Kinerja Nilai Penilaian Mandiri (PM) SAKIP Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus belum tersedia pada Triwulan I Tahun 2026. Hal ini disebabkan karena indikator tersebut bersifat kumulatif tahunan, sehingga pengukurannya hanya dapat dilakukan pada akhir tahun anggaran.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021, proses penilaian mandiri atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) mencakup evaluasi menyeluruh terhadap seluruh siklus manajemen kinerja selama satu tahun berjalan, meliputi aspek perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, serta evaluasi internal. Dengan demikian, penghitungan nilai PM SAKIP baru dapat dilakukan secara komprehensif pada Triwulan IV Tahun 2026, setelah seluruh data dan dokumen pendukung dari masing-masing aspek kinerja terkumpul secara lengkap.

Penundaan pengukuran pada Triwulan I ini bertujuan untuk memastikan bahwa hasil evaluasi yang diperoleh bersifat akurat, objektif, dan representatif terhadap pelaksanaan akuntabilitas kinerja PPS Bungus selama satu tahun penuh. Penilaian PM SAKIP tidak hanya merupakan pemenuhan aspek administratif, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam menilai konsistensi penerapan sistem kinerja berbasis hasil serta efektivitas pengelolaan program dan kegiatan di lingkungan pelabuhan. Oleh karena itu, hingga akhir Triwulan I Tahun 2026, belum dimungkinkan untuk menetapkan nilai capaian sementara. Nilai indikator ini akan disampaikan secara resmi pada akhir tahun anggaran setelah proses evaluasi menyeluruh selesai dilaksanakan.

Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2026, belum terdapat capaian nilai untuk Indikator Kinerja Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus, mengingat penilaiannya bersifat tahunan dan baru dilakukan secara komprehensif pada Triwulan IV. Meskipun demikian, beberapa indikator awal menunjukkan adanya progres positif yang dapat menjadi modal awal pencapaian kinerja.

Hal tersebut tercermin dari ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan seperti Renja dan Perjanjian Kinerja (PK), pelaksanaan pelaporan kinerja internal yang semakin sistematis, serta meningkatnya pemahaman pegawai terhadap prinsip akuntabilitas kinerja. Selain itu, kegiatan monitoring dan evaluasi internal yang dilakukan secara berkala turut memperkuat penerapan budaya kerja yang transparan dan akuntabel.

Namun demikian, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian. Integrasi antara perencanaan dan pengukuran kinerja belum sepenuhnya optimal, di mana sebagian indikator belum sepenuhnya selaras dengan tujuan strategis. Di samping itu, kualitas pelaporan dan kelengkapan dokumentasi masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal konsistensi data, ketepatan penyajian, serta kedalaman analisis capaian kinerja. Pemanfaatan hasil evaluasi sebagai dasar perbaikan program juga masih perlu diperkuat.

Apabila berbagai kendala tersebut tidak segera ditindaklanjuti, berpotensi memengaruhi capaian

nilai akhir PM SAKIP. Oleh karena itu, diperlukan konsistensi dalam pelaksanaan siklus manajemen kinerja, peningkatan kualitas dokumentasi, serta penguatan koordinasi antar unit kerja. Upaya perbaikan berkelanjutan dan pemantauan rutin menjadi kunci utama dalam mencapai nilai PM SAKIP yang optimal pada akhir tahun anggaran.

Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja

Pencapaian Nilai Penilaian Mandiri (PM) SAKIP sangat dipengaruhi oleh efektivitas program dan kegiatan yang dilaksanakan sepanjang tahun. Sejumlah program dan kegiatan telah secara langsung menunjang keberhasilan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus. Salah satu kegiatan yang berkontribusi besar adalah penyusunan dokumen perencanaan kinerja secara tepat waktu dan sesuai pedoman, seperti Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja (PK), serta laporan kinerja triwulanan. Kegiatan bimbingan teknis dan pendampingan penyusunan dokumen SAKIP oleh tim internal atau dari instansi pembina juga terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman pegawai terhadap prinsip-prinsip manajemen kinerja berbasis hasil (*result-based management*).

Selain itu, pelaksanaan monitoring dan evaluasi internal secara periodik serta pelaporan kinerja yang terdokumentasi dengan baik menjadi komponen penting dalam memastikan keberlangsungan siklus manajemen kinerja. Kegiatan-kegiatan ini tidak hanya mendukung keterpaduan antara perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan, tetapi juga mendorong budaya kerja yang lebih terukur, efisien, dan akuntabel. Program penguatan kapasitas SDM juga memainkan peran penting dalam membangun kompetensi teknis dalam memahami indikator, menyusun laporan, dan melakukan evaluasi secara berkualitas.

Indikator Kinerja (IK) 13 – Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

IKU ini adalah suatu instrument yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas ASN yang hasilnya digunakan untuk penilaian dan evaluasi guna pengembangan profesionalitas profesi ASN. Indeks profesionalitas diukur menggunakan standar profesionalitas ASN yang terdiri dari empat dimensi, yaitu:

- 1) **Kualifikasi**, merupakan dimensi yang menggambarkan tingkat atau jenjang pendidikan yang dicapai seseorang untuk memperoleh suatu pengetahuan dan/atau keahlian khusus, sehingga seseorang tersebut mengetahui, memahami dan dapat menjalankan pekerjaan tertentu sesuai tugas jabatannya. Alat ukur yang digunakan adalah persentase berdasarkan jenjang riwayat pendidikan terakhir yang dicapai oleh PNS;
- 2) **Kompetensi**, merupakan dimensi yang menggambarkan kemampuan seseorang yang merupakan kombinasi antara pengetahuan, keterampilan dan sikap serta didukung dengan program pengembangan kompetensi berkesinambungan yang tercermin melalui perilaku kinerja, yang dapat diamati, diukur dan dievaluasi. Alat ukur yang digunakan adalah persentase berdasarkan jenis diklat yang pernah diikuti (seperti Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional, Diklat Teknis, Kursus-kursus, dan Seminar/Workshop/Magang/Sejenis);
- 3) **Kinerja**, merupakan dimensi yang menggambarkan pencapaian sasaran kerja pegawai yang didasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit kerja atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS. Alat ukur yang digunakan adalah rata-rata kinerja individu pada suatu unit kerja;
- 4) **Disiplin**, merupakan dimensi yang menggambarkan kesanggupan seorang pegawai untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, peraturan kedisiplinan apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin

langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas jabatan. Alat ukur yang digunakan persentase jumlah PNS yang memperoleh hukuman disiplin berdasarkan tingkatan hukuman disiplin.

Target dan Realisasi

Tabel 18 Capaian Indikator Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

SK 5	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus								
	IK 13 Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus								
Tahunan 2026			Triwulan I (Tahun 2026)			Triwulan I Tahun Sebelumnya (2025)			
Target	Capaian	%	Target	Capaian	%	Target	Capaian	%	
84,5	-	-	-	-	-	-	-	-	

Pada Triwulan I, perhitungan dan pelaporan Indeks Capaian Nilai Indeks Prestasi ASN di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus tidak dilakukan, karena metode perhitungan Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk indikator ini bersifat semesteran.

Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

Upaya peningkatan Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bungus menunjukkan arah yang positif melalui pelaksanaan berbagai kegiatan pengembangan kompetensi aparatur. Langkah yang telah dilakukan antara lain pemberian akses bagi ASN untuk mengikuti berbagai bentuk pelatihan, seperti diklat kepemimpinan, diklat fungsional, diklat teknis, serta kegiatan pengembangan lainnya seperti webinar, seminar, workshop, dan magang yang relevan dengan tugas jabatan.

Selain itu, bagian kepegawaian secara aktif menyampaikan himbauan kepada pegawai, khususnya bagi yang belum memenuhi standar minimal pengembangan kompetensi sebesar 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun. Partisipasi ASN dalam berbagai kegiatan tersebut juga menunjukkan komitmen organisasi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dukungan platform pembelajaran daring turut mempermudah akses pelatihan tanpa terkendala waktu dan lokasi, sehingga mendorong peningkatan kesadaran ASN terhadap pentingnya pengembangan diri.

Namun demikian, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian. Tingkat partisipasi ASN dalam kegiatan pengembangan kompetensi belum merata, terutama bagi pegawai dengan beban kerja operasional yang tinggi. Selain itu, belum optimalnya integrasi data pelatihan ke dalam sistem informasi kepegawaian menyebabkan proses verifikasi untuk penilaian Indeks Profesionalitas menjadi kurang cepat. Aspek pendokumentasian dan pelaporan kegiatan juga masih perlu diperkuat agar seluruh aktivitas pengembangan kompetensi dapat tercatat secara akurat dan diakui secara administratif.

Secara keseluruhan, upaya yang telah dilakukan menunjukkan progres yang baik, namun masih diperlukan penguatan pada aspek pemerataan partisipasi, integrasi sistem, serta kualitas administrasi pelaporan. Langkah perbaikan yang konsisten dan berkelanjutan akan menjadi kunci dalam mencapai nilai Indeks Profesionalitas ASN yang optimal di PPS Bungus.

Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian Indikator Kinerja Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus adalah perencanaan, pengembangan dan pembinaan Disiplin Pegawai. Selain itu kegiatan monitoring pelaksanaan pengembangan kompetensi pegawai melalui seminar, diklat, maupun bimbingan teknis baik secara online maupun *offline*.

Indikator Kinerja (IK) 14 – Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

Indikator Kinerja Utama (IKU) ini mengukur tingkat transparansi dan kesiapan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui penyusunan dan publikasi Rencana Umum Pengadaan (RUP) dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP). RUP merupakan dokumen perencanaan yang menggambarkan seluruh rencana kegiatan pengadaan barang/jasa selama satu tahun anggaran. Publikasi RUP secara terbuka di SiRUP merupakan bentuk komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), khususnya dalam aspek akuntabilitas, efisiensi, dan keterbukaan informasi publik.

Pengukuran IKU ini dilakukan dengan membandingkan nilai total pengadaan barang/jasa yang telah diumumkan pada SiRUP dengan nilai total pagu pengadaan yang dikelola oleh unit kerja. Pagu pengadaan dihitung berdasarkan total anggaran program dikurangi belanja pegawai serta belanja non-pengadaan. Dengan demikian, semakin tinggi persentase RUP yang diumumkan di SiRUP, maka semakin baik kualitas perencanaan dan pengelolaan pengadaan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus.

Penilaian terhadap IKU ini berpedoman pada ketentuan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, khususnya Pasal 11 Ayat (1), yang menegaskan bahwa pengumuman RUP wajib dilakukan oleh setiap Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah untuk menjamin prinsip transparansi dan keadilan dalam proses PBJ. Dengan indikator ini, Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus dapat memantau dan mengevaluasi kinerja perencanaan pengadaan serta memastikan bahwa seluruh kegiatan PBJ direncanakan secara tepat waktu, sesuai aturan, dan terbuka untuk public.

Target dan Realisasi

Tabel 19 Capaian Indikator Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

SK 5 IK 14	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus		Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus						
	Tahunan 2026			Triwulan I (Tahun 2026)			Triwulan I Tahun Sebelumnya (2025)		
	Target	Capaian	%	Target	Capaian	%	Target	Capaian	%
	77	100	129,87%	77	100	129,87%	76	100	131,58%

Pada Triwulan I Tahun 2026, capaian indikator Persentase Rencana Umum Pengadaan (RUP) PBJ yang diumumkan pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bungus menunjukkan kinerja yang sangat baik. Realisasi capaian mencapai 100 dari target 77 atau sebesar 129,87%. Secara tahunan, capaian juga menunjukkan nilai yang sama, yaitu 100 atau 129,87% dari target yang telah ditetapkan.

Capaian ini mencerminkan bahwa proses perencanaan dan pengumuman RUP telah dilaksanakan secara tepat waktu, lengkap, dan melampaui target yang ditentukan. Hal tersebut juga menunjukkan komitmen PPS Bungus dalam menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pengadaan barang/jasa.

Jika dibandingkan dengan capaian pada Triwulan I Tahun 2025, realisasi tetap berada pada angka maksimal (100), namun secara persentase mengalami sedikit penurunan dari 131,58% menjadi 129,87% atau turun sebesar 1,71 poin persentase. Penurunan ini disebabkan oleh adanya peningkatan target dari 76 pada tahun 2025 menjadi 77 pada tahun 2026, sehingga secara proporsional persentase capaian menjadi sedikit lebih rendah.

Secara keseluruhan, capaian ini menunjukkan konsistensi kinerja yang sangat baik dalam pengelolaan perencanaan pengadaan. Optimalnya pemanfaatan SiRUP menjadi indikator bahwa

sistem pengadaan telah berjalan efektif, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta mendukung peningkatan kualitas layanan dukungan manajerial di lingkungan PPS Bungus.

Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

Keberhasilan pencapaian indikator dengan capaian 129,87% menunjukkan bahwa unit kerja memiliki efektivitas dan kesiapan tinggi dalam menyusun, mengumumkan, serta memperbarui paket-paket pengadaan secara tepat waktu. Keberhasilan ini juga mencerminkan kinerja manajerial dan koordinasi lintas unit yang baik dalam mendukung perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa.

Beberapa faktor utama yang mendukung keberhasilan ini antara lain:

1. Koordinasi efektif antara unit perencanaan, keuangan, dan tim pengelola pengadaan barang/jasa.
2. Pemahaman yang kuat terhadap regulasi terbaru tentang penyusunan dan pengumuman RUP di SiRUP.
3. Ketersediaan data perencanaan yang lengkap sejak awal tahun, sehingga proses input dan pembaruan RUP berjalan lancar.
4. Komitmen pimpinan dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan pengadaan di lingkungan pelabuhan.

Meskipun capaian sudah melampaui target, potensi tantangan tetap perlu diantisipasi, seperti perubahan pagu anggaran atau kegiatan di tengah tahun, serta keterlambatan input akibat revisi program. Oleh karena itu, monitoring berkala dan pembaruan data RUP secara dinamis menjadi langkah penting untuk menjaga konsistensi capaian indikator di triwulan berikutnya.

Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja

Keberhasilan pencapaian indikator ini sangat didukung oleh program peningkatan kualitas perencanaan pengadaan dan digitalisasi sistem informasi pengadaan.

Beberapa kegiatan yang berperan penting antara lain:

- Pelatihan dan bimbingan teknis (bimtek) bagi staf pengadaan terkait penyusunan dan pengelolaan RUP di SiRUP.
- Kegiatan koordinasi rutin antara unit perencanaan dan pengadaan untuk menyelaraskan data kebutuhan dengan anggaran yang tersedia.
- Pemanfaatan teknologi informasi terintegrasi yang mempercepat proses publikasi dan pembaruan data RUP secara real-time.
- Penguatan kapasitas SDM pengadaan agar mampu menyesuaikan dengan sistem dan regulasi baru.

Dengan capaian yang melampaui target, PPS Bungus menunjukkan peningkatan nyata dalam aspek perencanaan, koordinasi, dan akuntabilitas publik. Hasil ini diharapkan dapat menjadi model keberhasilan dalam pengelolaan RUP di lingkungan pelabuhan perikanan lainnya.

Indikator Kinerja (IK) 15 – Persentase Pengelolaan BMN di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

Indikator Kinerja Utama (IKU) ini digunakan untuk mengukur tingkat kepatuhan dan kualitas pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus, yang berada di bawah lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT). Pengelolaan BMN merupakan aspek penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik karena mencerminkan akuntabilitas pengelolaan aset negara dan efisiensi pemanfaatan sumber daya.

Capaian indikator ini dihitung berdasarkan beberapa unsur utama pengelolaan BMN yang telah ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, dengan bobot nilai berbeda untuk setiap aspek:

1. Tingkat Pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) – Bobot 12,5%
Mengukur sejauh mana kebutuhan atas BMN direncanakan dengan baik, mencakup kesesuaian antara kebutuhan dan realisasi pengadaan serta pemanfaatannya dalam mendukung operasional pelabuhan.
2. Usulan Penetapan Status Penggunaan BMN dari Belanja Modal yang Sudah BAST – Bobot 25%
Menilai ketaatan unit kerja dalam mengusulkan penetapan status penggunaan untuk BMN hasil belanja modal, khususnya yang telah diserahterimakan secara formal melalui Berita Acara Serah Terima (BAST), sebagai bentuk legalisasi penggunaan aset.
3. Usulan Penghapusan BMN dengan Kondisi Rusak Berat – Bobot 25%
Menggambarkan ketepatan dalam melakukan pemutakhiran data dan penanganan BMN yang tidak lagi dapat dimanfaatkan, terutama BMN yang dalam kondisi rusak berat. Usulan penghapusan diajukan ke pengguna dan pengelola barang untuk menghindari penumpukan aset tidak produktif.
4. Penggunaan BMN dari Hasil Pengadaan Belanja Modal yang Didukung Dokumen Resmi – Bobot 25%
Mewakili kepatuhan terhadap tata kelola penggunaan aset negara, yaitu bahwa setiap penggunaan BMN hasil belanja modal harus didukung dengan dokumen formal seperti BAST atau Berita Acara Pemakaian.
5. Penyusunan dan Penyampaian Laporan BMN secara Tepat Waktu – Bobot 12,5%
Meliputi kewajiban pelaporan pengelolaan BMN secara semesteran dan tahunan, yang harus disampaikan sesuai jadwal sebagai bagian dari akuntabilitas pelaporan keuangan negara.

Nilai akhir indikator ini merupakan agregat dari seluruh komponen di atas dan mencerminkan seberapa baik Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus dalam mengelola aset negara secara tertib administrasi, taat regulasi, dan transparan. Indikator ini tidak hanya menjadi alat ukur teknis, tetapi juga menjadi representasi dari komitmen pelabuhan dalam mendukung reformasi birokrasi melalui pengelolaan keuangan negara yang akuntabel dan professional.

Target dan Realisasi

Tabel 20 Capaian Indikator Persentase Pengelolaan BMN di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

SK 5 Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus								
IK 15 Persentase Pengelolaan BMN di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus								
Tahunan 2026			Triwulan I (Tahun 2026)			Triwulan I Tahun Sebelumnya (2025)		
Target	Capaian	%	Target	Capaian	%	Target	Capaian	%
82	-	-	-	-	-	-	-	-

Perhitungan dan rekapitulasi capaian untuk indikator kinerja Tingkat Kepatuhan Pengelola BMN Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus pada Triwulan I belum dapat dilaksanakan. Hal ini disebabkan karena metode perhitungan untuk indikator kinerja ini bersifat tahunan dan perhitungan tersebut akan dilaksanakan pada akhir Triwulan IV.

Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

Keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Tingkat Kepatuhan Pengelola BMN Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus didukung oleh pembentukan tim pengelola BMN di PPS Bungus dan melaksanakan pengelolaan BMN sesuai dengan ketentuan.

Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian IK 15 antara lain: 1) pelaporan keuangan lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.

Indikator Kinerja (IK) 16 – Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

Kinerja adalah prestasi kerja berupa keluaran dari suatu kegiatan atau hasil dari suatu program dengan kuantitas dan kualitas terukur. Guna mengetahui kinerja suatu program maka perlu dilakukan pengukuran. Pengukuran dan evaluasi kinerja yang selanjutnya disebut evaluasi kinerja adalah proses untuk menghasilkan informasi capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen RKAKL. Salah satu dasar hukum yang digunakan adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249 Tahun 2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

Indikator kinerja Nilai IKPA merupakan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran yang diperoleh dari Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara / Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran dan kepatuhan terhadap regulasi dengan berdasarkan 12 (dua belas) Indikator Pelaksanaan Anggaran yaitu Revisi DIPA, Halaman III DIPA, Pengelolaan UP, Rekon LPj Bendahara, Data Kontrak, Penyelesaian Tagihan, Penyerapan Anggaran, Retur SP2D, Perencanaan Kas, Pengembalian SPM, Dispensasi Penyampaian SPM, dan Pagu Minus.

Target dan Realisasi

Tabel 21 Capaian Kinerja Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

SK 5	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus								
	IK 16 Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus								
Tahunan 2026			Triwulan I (Tahun 2026)			Triwulan I Tahun Sebelumnya (2025)			
Target	Capaian	%	Target	Capaian	%	Target	Capaian	%	
92,1	-	-	-	-	-	-	-	-	

Rekapitulasi capaian Indikator Kinerja Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus pada Triwulan I Tahun 2026 belum tersedia, karena metode pengukuran indikator ini bersifat semesteran. Oleh karena itu, capaian indikator ini akan dianalisis setelah seluruh data semester terkumpul secara lengkap.

Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

Usaha-usaha yang dilakukan untuk mendukung keberhasilan capaian kinerja pelaksanaan anggaran PPS Bungus adalah dengan menyampaikan data kontrak ke KPPN tepat waktu; ketepatan waktu revolving UP; ketepatan penyampaian LPJ Bendahara Pengeluaran dan Penerimaan, meningkatkan ketelitian dalam penerbitan SPM untuk menghindari return SP2D, memastikan ketepatan waktu penyelesaian tagihan SPM-LS Non Belanja Pegawai.

Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja

Keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) sangat bergantung pada efektivitas perencanaan anggaran, ketepatan realisasi belanja, serta kepatuhan terhadap ketentuan administrasi pelaksanaan anggaran. Beberapa program dan kegiatan yang mendukung keberhasilan pencapaian IKPA di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus antara lain adalah peningkatan kapasitas SDM pengelola keuangan melalui pelatihan teknis, bimbingan teknis penyusunan RPD/RKAKL, dan asistensi pelaporan keuangan secara berkala.

Selain itu, pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap penyerapan anggaran serta rekonsiliasi data keuangan secara rutin setiap bulan turut berkontribusi terhadap pencapaian nilai IKPA yang optimal. Kerja sama dan komunikasi yang baik antara pejabat pembuat komitmen (PPK), bendahara, operator aplikasi, dan pihak terkait lainnya juga merupakan faktor pendukung

keberhasilan pengelolaan anggaran secara tepat waktu dan akurat.

Sebaliknya, potensi kegagalan dalam pencapaian IKPA dapat terjadi apabila terdapat keterlambatan dalam pelaksanaan kegiatan, revisi DIPA yang tidak tepat waktu, atau kendala dalam proses pengadaan barang/jasa yang menyebabkan realisasi belanja tidak sesuai rencana. Selain itu, rendahnya kualitas perencanaan kebutuhan anggaran dan kurangnya pemahaman terhadap regulasi keuangan juga dapat berdampak pada rendahnya nilai IKPA. Oleh karena itu, peningkatan koordinasi internal, pengawasan melekat, serta penguatan sistem pelaporan dan kontrol internal menjadi langkah strategis yang harus terus dilakukan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran.

Indikator Kinerja (IK) 17 – Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

Kinerja anggaran merupakan proses menghasilkan suatu nilai capaian kinerja untuk setiap indikator yang dilakukan dengan membandingkan data realisasi dengan target yang telah direncanakan sebelumnya. Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran dilakukan atas pelaksanaan RKA-KL melalui aplikasi SMART DJA.

Target dan Realisasi

Tabel 22 Capaian Indikator Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

SK 5	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus								
	IK 17 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus								
Tahunan 2025			Triwulan I (Tahun 2026)			Triwulan I Tahun Sebelumnya (2025)			
Target	Capaian	%	Target	Capaian	%	Target	Capaian	%	
71,75	-	-	-	-	-	-	-	-	

Perhitungan dan rekapitulasi capaian Indikator Kinerja Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus pada Triwulan I Tahun 2026 belum dapat dilaksanakan karena metode penilaiannya bersifat tahunan. Evaluasi indikator ini dilakukan secara menyeluruh terhadap kualitas perencanaan anggaran selama satu tahun anggaran berjalan, sehingga pengukuran baru akan dilakukan pada akhir Triwulan IV. Penilaian tahunan ini mencakup aspek perencanaan, ketepatan alokasi anggaran, serta kesesuaian antara perencanaan dan realisasi, yang hanya dapat diukur secara komprehensif setelah seluruh tahapan pelaksanaan anggaran selesai. Dengan demikian, capaian indikator ini akan tersedia setelah seluruh data tahun berjalan dikompilasi dan dianalisis secara menyeluruh.

Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

Adanya sinergitas tim pengelola anggaran dan petugas pelaporan online menjadi faktor yang mendukung keberhasilan indikator Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus. Kegiatan penginputan capaian output pada aplikasi SAKTI dilakukan secara rutin setiap awal bulan. Kegiatan sinkronisasi data capaian output juga dilaksanakan antara keuangan dan tim teknis.

Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian indikator kinerja ini adalah pelaksanaan pelaporan keuangan lingkup Ditjen Perikanan Tangkap.

Indikator Kinerja (IK) 18 – Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Lingkup Pelabuhan Perikanan Samudera

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik (Permen PAN dan RB No.14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik). Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) diukur dengan melihat hasil perhitungan 9 (sembilan) unsur pelayanan yang didapatkan dari seluruh unit penyelenggara pelayanan lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (U1 Persyaratan Layanan, U2 Kemudahan Prosedur, U3 Waktu Penyelesaian, U4 Kesesuaian Biaya, U5 Kesesuaian Produk, U6 Kecepatan Respon, U7 Kemudahan Fitur/ Kemampuan Petugas, U8 Kualitas Isi/ Sarana, U9 Layanan Konsultasi). Hasil perhitungan diperoleh dari aplikasi SISUSAN KKP, yaitu aplikasi yang dikembangkan oleh PUSDATIN KKP sebagai tindak lanjut pengisian SKM di lingkup KKP.

Target dan Realisasi

Tabel 23. Capaian Indikator Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Lingkup Pelabuhan Perikanan Samudera

SK 5	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus								
	IK 18 Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Lingkup Pelabuhan Perikanan Samudera								
Tahunan 2026			Triwulan I (Tahun 2026)			Triwulan I Tahun Sebelumnya (2025)			
Target	Capaian	%	Target	Capaian	%	Target	Capaian	%	
88,8	94,78	106,73	88,8	94,78	106,73	88,50	97,99	110,72	

Pada Triwulan I Tahun 2026, nilai capaian Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus mencapai 94,78, melampaui target yang telah ditetapkan sebesar 88,80, dengan tingkat pencapaian sebesar 106,73%. Capaian ini menunjukkan bahwa layanan dukungan manajerial di lingkungan pelabuhan telah berjalan dengan sangat baik serta mendapatkan respons positif dari masyarakat pengguna layanan.

Jika dibandingkan dengan capaian pada Triwulan I Tahun 2025, kinerja SKM mengalami sedikit penurunan. Pada periode yang sama tahun sebelumnya, nilai SKM tercatat sebesar 97,99 dengan target 88,50, atau tingkat pencapaian sebesar 110,72%. Dengan demikian, terdapat penurunan nilai SKM sebesar 3,21 poin serta penurunan persentase capaian sebesar 3,99% dibandingkan tahun sebelumnya.

Secara keseluruhan, capaian tersebut tetap menjadi indikator positif atas kinerja manajemen Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus dalam memberikan pelayanan kepada para pemangku kepentingan, khususnya nelayan, pelaku usaha, dan pengguna jasa lainnya.

Peningkatan ini mencerminkan hasil dari upaya berkelanjutan dalam peningkatan kualitas pelayanan publik, seperti:

- peningkatan kompetensi dan kinerja SDM pelayanan,
- penyempurnaan fasilitas pelayanan pelabuhan,
- peningkatan efektivitas sistem pengaduan dan umpan balik masyarakat, serta
- penguatan koordinasi manajerial dalam mendukung layanan operasional di pelabuhan.

Capaian tersebut menjadi indikator positif terhadap keberhasilan manajemen Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus dalam menjaga dan meningkatkan kualitas layanan kepada para pemangku kepentingan, terutama nelayan, pelaku usaha, dan pengguna jasa lainnya.

Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

Keberhasilan capaian indikator SKM ini antara lain disebabkan oleh:

- Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi kepada pengguna jasa terkait pentingnya partisipasi dalam pengisian Survei Kepuasan Masyarakat (SKM).
- Komitmen manajemen dalam menindaklanjuti hasil survei sebelumnya untuk memperbaiki aspek-aspek layanan yang dinilai masih kurang.
- Koordinasi internal yang baik antarunit dalam peningkatan mutu pelayanan.

Adapun faktor yang perlu diantisipasi agar tidak menurunkan capaian di periode berikutnya meliputi konsistensi pelayanan pada jam sibuk, ketersediaan fasilitas yang merata, serta keberlanjutan mekanisme evaluasi kepuasan pelanggan.

Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja

Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator ini meliputi:

- Kegiatan Pengukuran Indeks Kepuasan Pelanggan (IKP) yang dilakukan secara periodik.
- Pemantauan Key Performance Indicator (KPI) untuk menilai efektivitas pelayanan.
- Peningkatan kapasitas SDM pelayanan melalui pelatihan manajerial dan pelayanan publik.
- Kegiatan survei dan tindak lanjut hasil SKM yang menjadi dasar perbaikan berkelanjutan.

AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pada tahun 2026, Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp12.891.683.000,- sesuai dengan DIPA PPS Bungus Tahun Anggaran 2025, Nomor: SP DIPA- 032.03.2.531488/2026 tanggal 01 Desember 2025. Namun, terjadi efisiensi anggaran sehingga pagu anggaran disesuaikan menjadi sebesar Rp.12.064.781.000,-. Anggaran tersebut dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan tiga kegiatan utama, yaitu:

Anggaran tersebut dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan tiga kegiatan utama, yaitu:

1. Pengelolaan Pelabuhan Perikanan;
2. Pengelolaan Sumber Daya Ikan;
3. Dukungan Manajemen Internal lingkup Direktorat Jenderal Perikanan.

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2026, realisasi anggaran mencapai Rp2.864.193.680,- atau sebesar 23,74% dari total pagu anggaran yang telah disesuaikan

Tabel 24. Realisasi Penyerapan Anggaran Untuk Pelaksanaan Kegiatan PPS Bungus Tahun 2025

Program/Kegiatan	Pagu Anggaran 2026 (Rp.)	Realisasi Anggaran Triwulan I 2026	Persentase Realisasi Anggaran (%)
Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	575.078.000	51.869.083	9,02%
1 Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	575.078.000	51.869.083	9,02%
Program Dukungan Manajemen	11.489.703.000	2.812.324.597	24,48 %
3 Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	11.489.703.000	2.812.324.597	24,48 %
Total	12.064.781.000	2.864.193.680	23,74 %



2026

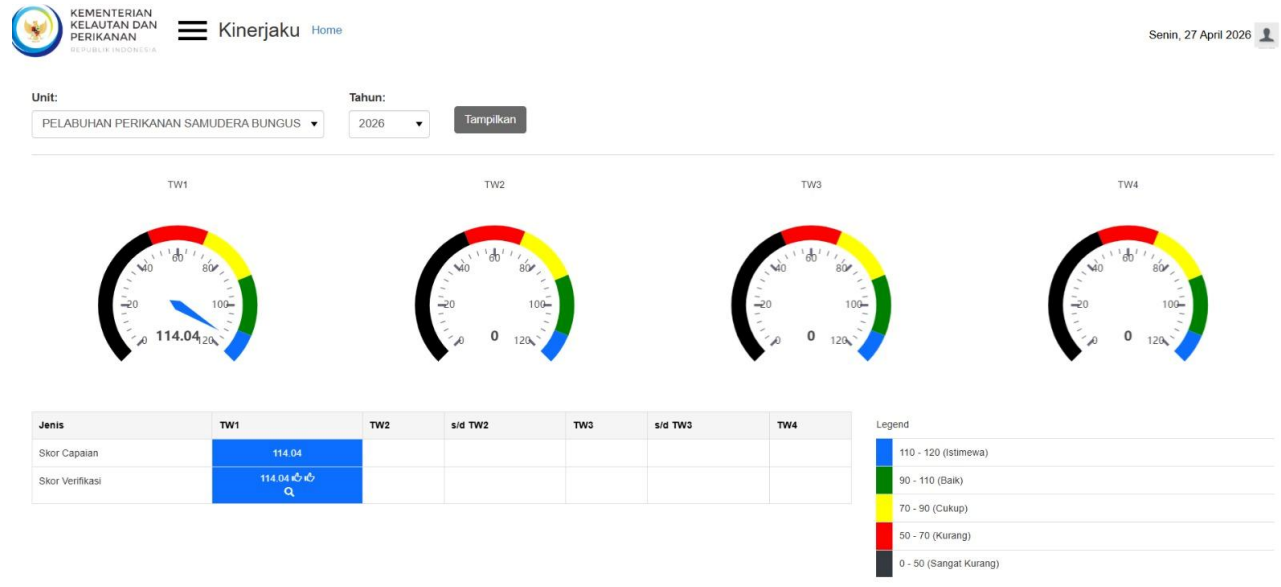
BAB 4

PENUTUP



KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja PPS Bungus pada Triwulan I tahun 2026 melalui pencapaian target indikator kinerja yang diinput kedalam Sistem Pengelolaan Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (KINERJAKU). diperoleh Nilai Pengukuran Sasaran Strategis (NPSS) Ditjen Perikanan Tangkap sebesar 114,04 persen.



Gambar 6. Nilai Pengukuran Sasaran Strategis (NPSS)

Evaluasi Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja hingga Triwulan I Tahun 2026 melalui aplikasi KINERJAKU milik Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bungus mencatat Nilai Pengukuran Sasaran Strategis (NPSS) sebesar 114,04%. Dari delapan indikator kinerja yang ditetapkan, seluruh indikator menunjukkan capaian yang melampaui target dengan nilai di atas 100%, yang menandakan kinerja sangat baik dan peningkatan signifikan dibandingkan periode sebelumnya. Beberapa capaian unggulan antara lain:

1. Penerimaan PNBPN Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus mencapai 144,27%, mencerminkan optimalisasi penerimaan negara yang signifikan.
2. Volume Produksi Perikanan Tangkap mencapai 131%, menunjukkan peningkatan produktivitas sektor perikanan tangkap di wilayah kerja PPS Bungus.
3. Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus sebesar 107,54%, mengindikasikan pengelolaan pelabuhan yang cukup efektif.
4. Nilai Pengendalian Lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus mencapai 243,27%, menunjukkan kinerja pengelolaan lingkungan yang sangat tinggi (namun perlu dikaji apakah target awal terlalu rendah).
5. Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan sebesar 103,33%, mencerminkan tingkat kepatuhan yang baik terhadap regulasi.
6. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan mencapai 116,28%, menunjukkan adanya tindak lanjut terhadap hasil pengawasan.
7. Persentase Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang Diumumkan pada SiRUP sebesar 129,87%, menandakan transparansi dan kesiapan pengadaan yang baik.
8. Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) mencapai 106,73%, yang mengindikasikan kepuasan pengguna layanan berada di atas target.

Ke depan, PPS Bungus perlu mempertahankan tren positif ini dengan terus memperkuat koordinasi

lintas bidang, melakukan inovasi pelayanan, serta memastikan seluruh kegiatan operasional berjalan sesuai prinsip efisiensi, transparansi, dan keberlanjutan.

Permasalahan dan Kendala yang Dihadapi

Dalam pelaksanaan kegiatan dan pencapaian target kinerja, PPS Bungus menghadapi beberapa kendala berikut:

1. Fluktuasi aktivitas ekonomi perikanan yang berdampak pada penerimaan PNBP.
2. Keterbatasan sarana dan prasarana pelabuhan, yang memengaruhi optimalisasi pelayanan.
3. Kepatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban PNBP yang masih perlu ditingkatkan.
4. Koordinasi antar-stakeholder yang belum sepenuhnya efektif dalam mendukung kelancaran operasional pelabuhan.
5. Tidak Terumumkan di aplikasi SiRUP karena kegiatan tidak terlaksana

REKOMENDASI TINDAK LANJUT

Sebagai tindak lanjut untuk mengoptimalkan kinerja di triwulan berikutnya dan keseluruhan tahun 2026, direkomendasikan beberapa upaya strategis berikut:

1. Penguatan sistem penarikan dan monitoring PNBP, melalui digitalisasi dan pelibatan pihak ketiga (misal: lembaga verifikator).
2. Peningkatan sarana pelabuhan dan fasilitas layanan publik, guna mendorong produktivitas dan kepuasan pengguna jasa.
3. Pembinaan dan sosialisasi intensif kepada pelaku usaha perikanan, khususnya terkait kepatuhan kewajiban PNBP.
4. Peningkatan sinergi dan koordinasi lintas sektor, baik di internal KKP maupun dengan pemerintah daerah dan pihak swasta.
5. Monitoring berkala terhadap indikator kinerja, agar potensi deviasi dapat diantisipasi lebih awal.

Dengan komitmen yang kuat serta pelaksanaan upaya tindak lanjut yang terencana, diharapkan PPS Bungus dapat mempertahankan bahkan meningkatkan kinerja positif di sisa tahun 2026, serta memberikan kontribusi optimal terhadap target nasional sektor perikanan tangkap.

LAMPIRAN

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BUNGUS

NOTA DINAS
NOMOR 155/PPSB/RC.610/IV/2026

Yth. : Direktur Jenderal Perikanan Tangkap
Dari : Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : Penyampaian Capaian Indikator Kinerja Utama Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus pada Triwulan I Tahun 2026
Tanggal : 15 April 2026

Sehubungan dengan telah selesainya penghitungan Indikator Kinerja Triwulan I Tahun 2026, maka dengan ini kami sampaikan capaian Indikator Kinerja Utama Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus sebagai berikut:

Tabel 1. Rekap Capaian IKU PPS Bungus Triwulan I Tahun 2026

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA		Triwulan I		% Capaian
				Target	Capaian	
1	Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	1	Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	400	577,08	144,27
2	Produktivitas perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus meningkat	2	Volume Produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	2.018,14	2.643,86	131
3	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus yang optimal dan bertanggung jawab	3	Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	86,25	92,75	107,54
		4	Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	33	80,28	243,27
4	Pengelolaan awak kapal perikanan, kapal perikanan dan alat penangkapan ikan berkelanjutan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	5	Kapal perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan.	1.112	1.149	103,33

5	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus.	6	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	86	100	116,28
		7	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	77	100	129,87
		8	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	88,8	94,78	106,73

Demikian disampaikan, atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.



Ditandatangani
Secara Elektronik

Widodo

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BUNGUS

NOTA DINAS
NOMOR 134/PPSB/KU.340/IV/2026

Yth. : Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus
Dari : Ketua Tim Kerja Pelayanan Usaha
Hal : Penyampaian Capaian IKU Penerimaan PNBP Non SDA di
Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus pada Triwulan I Tahun 2026
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Tanggal : 09 April 2026

Sehubungan dengan telah selesainya penghitungan IKU Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus sebagai salah satu Indikator Kinerja Utama Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus Tahun 2026, maka dengan ini kami sampaikan capaian IKU Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus pada Triwulan I Tahun 2026 sebesar Rp. 577,08 Juta atau 144,27% dari target Triwulan I, yakni sebesar Rp. 400 Juta.

Maka dengan demikian, capaian Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 adalah sebesar 25,90% dari total target Tahun 2026 sebesar Rp. 2.227,89 Juta. *(Rincian terlampir).*

Demikian disampaikan, atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.



Ditandatangani
Secara Elektronik

Herdani Widi Supriyo

**REALISASI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)
PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BUNGUS TAHUN 2026**

No.	AKUN	URAIAN	TARGET	BULAN												JUMLAH
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGUS	SEPT	OKT	NOV	DES	
I		PENERIMAAN FUNGSIONAL														
A	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan														
1	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	-	5.000.000	13.971.000	182.565.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	201.536.000
		JUMLAH	-	5.000.000	13.971.000	182.565.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	201.536.000
	425131	TOTAL AKUN 425131	-	5.000.000	13.971.000	182.565.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	201.536.000
B.	425132	Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin														
1	425132	Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		JUMLAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		TOTAL AKUN 425132	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A	425151	Pelayanan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan														
1	425151	Sewa Rumah Dinas Negara	29.568.000	1.679.954	1.679.954	1.779.977	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.139.885
		JUMLAH	29.568.000	1.679.954	1.679.954	1.779.977	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.139.885
B.	425151	Pelayanan Penggunaan Tanah dan Bangunan														
1	425151	Penggunaan Tanah by. Pengembangan klaster 1	80.000.000	-	2.498.659	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.498.659
2	425151	Penggunaan Tanah by. Pemeliharaan Prasarana	40.000.000	240.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	240.000
3	425151	Penumpukan Barang Terbuka Beratap	24.000.000	744.000	744.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.488.000
4	425151	Penumpukan Barang Terbuka Tidak Beratap	11.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	425151	Penggunaan Bangunan Permanen	120.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	425151	Penggunaan Mess Non AC	2.000.000	200.000	200.000	200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600.000
		JUMLAH	277.000.000	1.184.000	3.442.659	200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.826.659
C	425151	Pelayanan Penggunaan Peralatan dan Mesin														
1	425151	Pembekuan (Freezer)	36.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	425151	Gedung Beku (Cold Storage)	21.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	425151	Pelayanan Tangki BBM dan Instalasinya	30.000.000	9.416.625	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.416.625
4	425151	Sewa Meja Sortir	1.600.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	425151	Sewa Peti Ikan (Coolbox)	8.750.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	425151	Penggunaan Kendaraan/Pengangkut Forklift	2.375.000	375.000	250.000	125.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	750.000
		JUMLAH	99.725.000	9.791.625	250.000	125.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.166.625
	425151	JUMLAH. I. AKUN. 425151	406.293.000	12.655.579	5.372.613	2.104.977	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.133.169
		AKUN 425621														
A	425621	Pelayanan Tambat untuk Kapal Perikanan														
1	425621	Kapal berukuran > 5 - 30 GT	105.000.000	19.557.395	10.199.310	6.591.345	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36.348.050
		Pelayanan Tambat untuk Kapal Non Perikanan														
2	425621	Kapal Non Perikanan Non Penunjang Kegiatan Kapal Perikanan	1.050.000.000	13.600.000	14.274.500	6.450.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34.324.500
		JUMLAH	1.155.000.000	33.157.395	24.473.810	13.041.345	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70.672.550
B.	425621	Pelayanan Docking dengan Pekerjaan														
1	425621	Naik atau Turun Kapal Perikanan	50.000.000	3.560.000	1.840.000	4.400.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.800.000
2	425621	Naik atau Turun Kapal Non Perikanan	150.000.000	4.000.000	6.200.000	9.600.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.800.000
		Pelayanan Perbaikan Kapal														
1	425621	Perbaikan Kapal Kerusakan Ringan	11.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	425621	Perbaikan Kapal Kerusakan Sedang	37.500.000	90.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90.000

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BUNGUS

NOTA DINAS
NOMOR 135/PPSB/PI.310/IV/2026

Yth : Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus
Dari : Ketua Tim Kerja Operasional Pelabuhan
Hal : Penyampaian Capaian IKU Volume Produksi Perikanan Tangkap di
Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus pada Triwulan I Tahun 2026
Tanggal : 09 April 2026

Sehubungan dengan telah selesainya penghitungan IKU Volume Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus sebagai salah satu Indikator Kinerja Utama Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus Tahun 2026, maka dengan ini kami sampaikan Capaian Volume Produksi di PPS Bungus sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 sebagai berikut:

Tabel 1. Volume Produksi Perikanan Tangkap PPS Bungus Triwulan I Tahun 2026

No	Bulan	Total (Ton)
1	Januari	824,07
2	Februari	866,93
3	Maret	952,86
Total		2.643,86

Berdasarkan data perhitungan hasil volume produksi pada Tabel satu diatas, maka dengan ini kami sampaikan Capaian IKU Volume Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus sampai dengan Triwulan I adalah sebesar **2.643,86 ton** atau sebesar **131%** dari target sampai Triwulan I sebesar **2.018,14 ton**.

Dengan demikian persentase capaian sampai dengan Triwulan I tahun 2026 adalah sebesar **26,20%** dari target tahun 2026 sebesar **10.090,69 ton**. (*Rincian Terlampir*).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.



Ditandatangani
Secara Elektronik

Yora Arungla'bi

Produksi dan Nilai perjenis Ikan Bulan Januari - Maret 2026
Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

Nama Jenis Ikan	Januari		Februari		Maret		TOTAL KESELURUHAN	
	Total (Kg)	Nilai (Rp)	Total (Kg)	Nilai (Rp)	Total (Kg)	Nilai (Rp)	Total (Kg)	Nilai (Rp)
Madidihang	72,965	3,064,530,000	46,741	1,963,122,000	41,285	1,745,503,000	160,991	6,773,155,000
Bigeye	5,104	214,368,000	2,459	103,278,000	5,068	215,907,000	12,631	533,553,000
Cakalang	17,241	240,076,000	25,523	432,454,000	15,527	304,220,000	58,291	976,750,000
Tongkol Pisang Balaki	23,842	363,050,000	10,850	242,100,000	11,345	197,000,000	46,037	802,150,000
Tongkol Abu-abu	65,562	813,544,000	70,949	879,476,000	93,281	1,117,760,000	229,792	2,810,780,000
Ikan Pedang/Meka	894	14,304,000	177	2,832,000	195	3,120,000	1,266	20,256,000
Layang Deles	19,561	257,914,000	22,457	229,784,000	43,207	409,898,000	85,225	897,596,000
Layang Benggol							-	-
Lemadang	182	2,184,000	132	1,584,000	145	1,740,000	459	5,508,000
Japuh							-	-
Layaran	70	1,120,000	49	784,000			119	1,904,000
Kakap							-	-
Teri	265,653	1,603,880,000	369,885	1,884,986,000	352,234	1,928,837,000	987,772	5,417,703,000
Cumi	5,941	89,115,000	5,515	71,523,000	13,313	178,815,000	24,769	339,453,000
Kembung Lelaki	38,562	496,148,000	30,272	403,199,000	41,414	559,545,000	110,248	1,458,892,000
Kembung Perempuan	500	24,000,000						24,000,000
Tenggiri							-	-
Tenggiri Batang							-	-
Tenggiri Papan	1,300	51,500,000	538	18,830,000	1,875	67,825,000	3,713	138,155,000
Selar Kuning							-	-
Selar Hijau							-	-
Selar Bentong	59,321	730,519,000	46,123	556,954,000	55,154	651,047,000	160,598	1,938,520,000
Tembang	129,224	599,458,000	157,969	640,874,000	157,899	647,237,000	445,092	1,887,569,000
Peperek							-	-

Siro	74,622	362,406,000	38,570	205,600,000	74,214	410,500,000	187,406	978,506,000
Bawal Hitam	1,485	51,975,000	1,078	36,230,000	2,434	92,610,000	4,997	180,815,000
Layur	308	2,156,000	474	3,318,000	331	2,317,000	1,113	7,791,000
Sotong							-	-
Layaran							-	-
Kuwe			650	16,250,000			650	16,250,000
Kakap Hitam	82	1,066,000	120	1,555,000	66	858,000	268	3,479,000
Kerapu Balong							-	-
Kerapu Sunu							-	-
Kerapu Minyak							-	-
Kerapu Karang							-	-
Gurita							-	-
Teripang							-	-
Sunglir							-	-
Tetengkek	38,734	475,126,000	34,611	419,836,000	41,640	493,442,000	114,985	1,388,404,000
Kakatua							-	-
Alu-alu/Barakuda	2,917	46,913,000	1,791	26,468,000	2,229	34,029,000	6,937	107,410,000
Semar							-	-
	824,070	9,505,352,000	866,933	8,141,037,000	952,856	9,062,210,000	2,643,359	26,708,599,000

**Kepala Pelabuhan Perikanan
Samudera Bungus**



Widodo

**Padang, 2 April 2026
Ketua Tim Kerja
Kelompok Operasional Pelabuhan**

Yona Arungla'bi

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BUNGUS

NOTA DINAS
NOMOR 136/PPSB/RC.610/IV/2026

Yth : Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus
Dari : Ketua Tim Kerja Operasional Pelabuhan
Hal : Penyampaian Capaian IKU Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan
Samudera Bungus pada Triwulan I Tahun 2026
Tanggal : 09 April 2026

Sehubungan dengan telah selesainya perhitungan Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus sebagai salah satu Indikator Kinerja Utama Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus Tahun 2026, maka dengan ini kami sampaikan rincian capaian Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus pada Triwulan I Tahun 2026 sebagai berikut:

Tabel 1. Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus Triwulan I Tahun 2026

No	Bulan	Nilai
1	Januari	92,25
2	Februari	94,50
3	Maret	91,50
Jumlah		278,25
Rata-Rata		92,75

Berdasarkan data diatas, maka diketahui capaian tingkat kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus dengan nilai rata-rata sebesar **92,75** atau **107,54%** dari target Triwulan I sebesar **86,25**. Dengan demikian persentase capaian sampai dengan Triwulan I adalah sebesar **107,54%** dari total target **86,25** untuk tahun 2026. (***Rincian Terlampir***).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.



Ditandatangani
Secara Elektronik

Yora Arungla'bi

INDIKATOR KINERJA PELABUHAN PERIKANAN
PPS. Bungus

No.	Jenis Kriteria	Unit Satuan	Bulan Januari		Keterangan
			Realisasi	Nilai	
1	Frekuensi Pengiriman Data (PIPP)	Kali	28,00	5,00	Lebih dari 20 kali
2	E-Logbook	Ya/Tidak	Ya	2,00	---
3	Aplikasi SPB-online	Ya/Tidak	Ya	2,00	---
4	SHTI	Ya/Tidak	Ya	2,00	---
5	Realisasi Penyerapan Anggaran	%	100,00	4,00	Antara 75 - 100%
6	Pendapatan Pelabuhan	%	99,33	4,00	Diatas 90% dari target
7	Ketersediaan SDM Pengelola Pelabuhan Perikanan	Kelengkapan	Lengkap	4,00	---
8	Kapasitas Daya Tampung Kolam Pelabuhan	GT	4480,00	3,00	Antara 4000 - 6000 GT
9	Panjang Dermaga	m	390,00	4,00	Diatas 300m
10	Kedalaman Kolam	cm	1500,00	4,00	Diatas 3 m
11	Sarana Perbaikan (Docking, bengkel)	Ada/Tidak Ada	Ada	2,00	---
12	Kelengkapan Fasilitas Pemasaran & Distribusi Ikan	Kelengkapan	Lengkap	2,00	---
13	Ketersediaan Lahan Pelabuhan	ha	22,00	4,00	Diatas 20 ha
14	Pelayanan Tambat Labuh	GT	182,00	5,00	Lebih dari 60 GT
15	Produksi Perikanan	Ton/Hari	26,94	2,50	Dibawah 30 ton
16	Frekuensi Kunjungan Kapal	Unit	182,00	5,00	Lebih dari 14 unit
17	STBLKK	%	104,44	5,00	Kapal yang masuk 100%
18	Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis	Jumlah Kegiatan	13,00	4,00	Diatas 3 kali
19	Fasilitasi Penyuluhan, Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Ikan, Perkarantinaan Ikan, Publikasi	Jumlah Kegiatan	16,00	4,00	Diatas 4 kali
20	Pelaksanaan K5	Hasil	Baik	4,00	---
21	Penyaluran Air Bersih (kapal dan industri pengolahan)	%	100,00	4,00	Sesuai kebutuhan (100%)
22	Penyaluran Es (kapal)	%	100,00	4,00	Sesuai kebutuhan (100%)
23	Penyaluran BBM (kapal)	%	90,20	3,75	Antara 75 - 99% dari kebutuhan
24	Pelayanan Pengolahan Hasil Perikanan di WKOPP	Unit	2,00	1,00	Kurang dari 10 unit
25	Pemanfaatan Lahan Pelabuhan	%	602,59	3,00	Sangat Optimal (80 - 100%)
26	Penyerapan Tenaga Kerja	Orang/Bulan	5084,41	3,00	Lebih dari 3000 orang
27	Perubahan Jumlah Investor di Pelabuhan Perikanan	Perusahaan/Bulan	2 (7)	2,00	---
Jumlah				92,25	
Kesimpulan dan Rekomendasi				SANGAT BAIK	

KATEGORI KINERJA PELABUHAN PERIKANAN:

a. **SANGAT BAIK** jika NK = (86 - 100)

b. **BAIK** jika NK = (66 - 85)

c. **SEDANG** jika NK = (46 - 65)

d. **KURANG** jika NK = (0 - 45)

INDIKATOR KINERJA PELABUHAN PERIKANAN
PPS. Bungus

No.	Jenis Kriteria	Unit Satuan	Bulan Februari		Keterangan
			Realisasi	Nilai	
1	Frekuensi Pengiriman Data (PIPP)	Kali	24,00	5,00	Lebih dari 20 kali
2	E-Logbook	Ya/Tidak	Ya	2,00	---
3	Aplikasi SPB-online	Ya/Tidak	Ya	2,00	---
4	SHTI	Ya/Tidak	Ya	2,00	---
5	Realisasi Penyerapan Anggaran	%	103,93	4,00	Antara 75 - 100%
6	Pendapatan Pelabuhan	%	106,63	4,00	Diatas 90% dari target
7	Ketersediaan SDM Pengelola Pelabuhan Perikanan	Kelengkapan	Lengkap	4,00	---
8	Kapasitas Daya Tampung Kolam Pelabuhan	GT	3966,00	2,00	Antara 2000 - 4000 GT
9	Panjang Dermaga	m	390,00	4,00	Diatas 300m
10	Kedalaman Kolam	cm	1500,00	4,00	Diatas 3 m
11	Sarana Perbaikan (Docking, bengkel)	Ada/Tidak Ada	Ada	2,00	---
12	Kelengkapan Fasilitas Pemasaran & Distribusi Ikan	Kelengkapan	Lengkap	2,00	---
13	Ketersediaan Lahan Pelabuhan	ha	22,00	4,00	Diatas 20 ha
14	Pelayanan Tambat Labuh	GT	778,00	5,00	Lebih dari 60 GT
15	Produksi Perikanan	Ton/Hari	30,85	3,75	Antara 30 - 50 ton
16	Frekuensi Kunjungan Kapal	Unit	159,00	5,00	Lebih dari 14 unit
17	STBLKK	%	94,33	3,75	Kapal yang masuk antara 75 - 99%
18	Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis	Jumlah Kegiatan	7,00	4,00	Diatas 3 kali
19	Fasilitasi Penyuluhan, Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Ikan, Perkarantinaan Ikan, Publikasi	Jumlah Kegiatan	5,00	4,00	Diatas 4 kali
20	Pelaksanaan K5	Hasil	Baik	4,00	---
21	Penyaluran Air Bersih (kapal dan industri pengolahan)	%	100,00	4,00	Sesuai kebutuhan (100%)
22	Penyaluran Es (kapal)	%	100,00	4,00	Sesuai kebutuhan (100%)
23	Penyaluran BBM (kapal)	%	100,00	5,00	Sesuai kebutuhan (100%)
24	Pelayanan Pengolahan Hasil Perikanan di WKOPP	Unit	2,00	1,00	Kurang dari 10 unit
25	Pemanfaatan Lahan Pelabuhan	%	602,59	3,00	Sangat Optimal (80 - 100%)
26	Penyerapan Tenaga Kerja	Orang/Bulan	5069,65	3,00	Lebih dari 3000 orang
27	Perubahan Jumlah Investor di Pelabuhan Perikanan	Perusahaan/Bulan	8 (15)	4,00	---
Jumlah				94,50	
Kesimpulan dan Rekomendasi				SANGAT BAIK	

KATEGORI KINERJA PELABUHAN PERIKANAN:

a. SANGAT BAIK jika NK = (86 - 100)

b. BAIK jika NK = (66 - 85)

c. SEDANG jika NK = (46 - 65)

d. KURANG jika NK = (0 - 45)

INDIKATOR KINERJA PELABUHAN PERIKANAN
PPS. Bungus

No.	Jenis Kriteria	Unit Satuan	Bulan Maret		Keterangan
			Realisasi	Nilai	
1	Frekuensi Pengiriman Data (PIPP)	Kali	22,00	5,00	Lebih dari 20 kali
2	E-Logbook	Ya/Tidak	Ya	2,00	---
3	Aplikasi SPB-online	Ya/Tidak	Ya	2,00	---
4	SHTI	Ya/Tidak	Ya	2,00	---
5	Realisasi Penyerapan Anggaran	%	97,30	4,00	Antara 75 - 100%
6	Pendapatan Pelabuhan	%	163,75	4,00	Diatas 90% dari target
7	Ketersediaan SDM Pengelola Pelabuhan Perikanan	Kelengkapan	Lengkap	4,00	---
8	Kapasitas Daya Tampung Kolam Pelabuhan	GT	4273,00	3,00	Antara 4000 - 6000 GT
9	Panjang Dermaga	m	390,00	4,00	Diatas 300m
10	Kedalaman Kolam	cm	1500,00	4,00	Diatas 3 m
11	Sarana Perbaikan (Docking, bengkel)	Ada/Tidak Ada	Ada	2,00	---
12	Kelengkapan Fasilitas Pemasaran & Distribusi Ikan	Kelengkapan	Lengkap	2,00	---
13	Ketersediaan Lahan Pelabuhan	ha	22,00	4,00	Diatas 20 ha
14	Pelayanan Tambat Labuh	GT	607,00	5,00	Lebih dari 60 GT
15	Produksi Perikanan	Ton/Hari	30,66	3,75	Antara 30 - 50 ton
16	Frekuensi Kunjungan Kapal	Unit	164,00	5,00	Lebih dari 14 unit
17	STBLKK	%	77,94	3,75	Kapal yang masuk antara 75 - 99%
18	Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis	Jumlah Kegiatan	7,00	4,00	Diatas 3 kali
19	Fasilitasi Penyuluhan, Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Ikan, Perkarantinaaan Ikan, Publikasi	Jumlah Kegiatan	4,00	3,00	Antara 3 - 4 kali
20	Pelaksanaan K5	Hasil	Baik	4,00	---
21	Penyaluran Air Bersih (kapal dan industri pengolahan)	%	100,00	4,00	Sesuai kebutuhan (100%)
22	Penyaluran Es (kapal)	%	100,00	4,00	Sesuai kebutuhan (100%)
23	Penyaluran BBM (kapal)	%	100,00	5,00	Sesuai kebutuhan (100%)
24	Pelayanan Pengolahan Hasil Perikanan di WKOPP	Unit	2,00	1,00	Kurang dari 10 unit
25	Pemanfaatan Lahan Pelabuhan	%	602,59	3,00	Sangat Optimal (80 - 100%)
26	Penyerapan Tenaga Kerja	Orang/Bulan	5068,82	3,00	Lebih dari 3000 orang
27	Perubahan Jumlah Investor di Pelabuhan Perikanan	Perusahaan/Bulan	0 (15)	1,00	---
Jumlah				91,50	
Kesimpulan dan Rekomendasi				SANGAT BAIK	

KATEGORI KINERJA PELABUHAN PERIKANAN:

a. **SANGAT BAIK** jika NK = (86 - 100)

b. **BAIK** jika NK = (66 - 85)

c. **SEDANG** jika NK = (46 - 65)

d. **KURANG** jika NK = (0 - 45)

**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BUNGUS**

NOTA DINAS
NOMOR 150/PPSB/RC.610/IV/2026

Yth : Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus
Dari : Ketua Tim Kerja Tata Kelola Sarana dan Prasarana
Hal : Penyampaian Capaian Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Tanggal : 14 April 2026

Sehubungan dengan telah selesainya pelaksanaan Indikator Kinerja Utama (IKU) Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus untuk Triwulan I Tahun 2026, bersama ini kami sampaikan bahwa capaian nilai yang diperoleh adalah sebesar 80,28.

Berdasarkan hasil tersebut, dapat kami informasikan bahwa capaian Nilai Pengendalian Lingkungan pada Triwulan I Tahun 2026 telah mencapai 243,27% dari target tahunan yang ditetapkan, yaitu sebesar 33. **(Rincian capaian terlampir).**

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.



Ditandatangani
Secara Elektronik

Melly Masrul



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3521782
LAMAM www.kkp.go.id SUREL djpt@kkp.go.id

Nomor : B.1661/DJPT.4/PI.310/IV/2026 14 April 2026
Sifat : Segera
Lampiran : Satu berkas
Hal : Capaian dan Hasil Evaluasi Implementasi SELARASKAN Triwulan I TA. 2026 di Pelabuhan Perikanan UPT Pusat

Yth. (Daftar Terlampir)
di Tempat

Sehubungan dengan implementasi Sistem Pelaporan Ragam Informasi Lingkungan Pelabuhan Perikanan (SELARASKAN) Versi 2.1, bersama ini kami sampaikan capaian dan hasil evaluasi SELARASKAN triwulan I TA. 2026 di Pelabuhan Perikanan sebagai berikut :

1. Capaian implementasi SELARASKAN bulan Januari s.d Maret 2026 yang dievaluasi pada bulan Januari 2026 dengan skor setelah koreksi *evidence* oleh Tim Evaluasi SELARASKAN sebagai berikut:

NO	NAMA PELABUHAN	2026			SKOR KUMULATIF	SKOR RATA-RATA	KETERANGAN
		JAN	FEB	MAR			
1	PPN Pemangkat	96,42	94,98	95,67	287,06	95,69	Sangat Baik
2	PPN Sibolga	93,45	92,12	90,65	276,22	92,07	Sangat Baik
3	PPN Tanjung Pandan	91,22	91,17	93,44	275,83	91,94	Sangat Baik
4	PPN Kejawanan	86,27	86,37	89,85	262,48	87,49	Sangat Baik
5	PPS Cilacap	85,85	86,12	88,84	260,82	86,94	Sangat Baik
6	PPN Kwandang	85,38	86,72	84,91	257,01	85,67	Sangat Baik
7	PPN Pengambengan	86,54	85,28	84,24	256,06	85,35	Sangat Baik
8	PPN Prigi	88,09	79,53	86,19	253,81	84,6	Sangat Baik
9	PPN Ternate	80,75	85,31	85,94	252	84	Sangat Baik
10	PPN Palabuhan Ratu	78,86	83,72	82,02	244,6	81,53	Sangat Baik
11	PPN Sungai Liat	83,25	80,19	80,96	244,4	81,47	Sangat Baik
12	PPS Bungus	75,5	82,82	82,51	240,83	80,28	Sangat Baik

NO	NAMA PELABUHAN	2026			SKOR KUMULATIF	SKOR RATA-RATA	KETERANGAN
		JAN	FEB	MAR			
13	PPP Teluk Batang	78,44	80,04	82,21	240,7	80,23	Sangat Baik
14	PPN Ambon	81,39	80,29	77,73	239,41	79,8	Baik
15	PPN Pekalongan	76,52	77,82	69,29	223,63	74,54	Baik
16	PPS Nizam Zachman	78,08	72,91	69,54	220,53	73,51	Baik
17	PPS Bitung	66,41	76,44	69,13	211,98	70,66	Baik
18	PPN Karangantu	56,01	71,01	77,97	204,99	68,33	Cukup
19	PPN Tual	58,2	68,23	74,71	201,14	67,05	Cukup
20	PPS Kendari	80,36	70,87	49,86	201,09	67,03	Cukup
21	PPS Belawan	67,29	60,26	68,81	196,36	65,45	Cukup
22	PPN Brondong	0	0,01	9,44	9,46	4,73	Kurang

2. Hasil evaluasi implementasi SELARASKAN bulan Januari s.d Maret 2026 secara detail dapat dilihat melalui akun SELARASKAN masing-masing UPT.
3. Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan dengan capaian nilai SELARASKAN SANGAT BAIK agar mempertahankan kinerjanya di bidang kebersihan dan lingkungan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terimakasih.

a.n. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap
Direktur Kepelabuhanan Perikanan,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Ady Candra

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap

Lampiran

Nomor : B.1661/DJPT.4/PI.310/IV/2026

Tanggal : 14 April 2026

DAFTAR PELABUHAN PERIKANAN

1. Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta
2. Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap
3. Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan
4. Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung
5. Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari
6. Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus
7. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon
8. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga
9. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan
10. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu
11. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual
12. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate
13. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong
14. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi
15. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjung Pandan
16. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawan
17. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat
18. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambangan
19. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Sungailiat
20. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu
21. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Kwandang
22. Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang

a.n. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap
Direktur Kepelabuhanan Perikanan,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Ady Candra

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BUNGUS

NOTA DINAS
NOMOR 138/PPSB/PI.410/IV/2026

Yth : Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus
Dari : Ketua Tim Kerja Kesyahbandaran
Hal : Penyampaian Capaian IKU Jumlah Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan
Tanggal : 09 April 2026

Sehubungan dengan telah selesainya pelaksanaan kegiatan penerbitan sertifikat Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus sebagai salah satu Indikator Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus Tahun 2026, maka dengan ini kami sampaikan jumlah dokumen kapal perikanan yang telah diterbitkan di PPS Bungus sampai dengan Triwulan I tahun 2026 sebagai berikut :

No	Periode	Jumlah Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan (SKKP)
1	Tahun 2025	1.102
2	Triwulan I	47
	Jumlah	1.149

Berdasarkan data diatas, maka dapat diketahui capaian jumlah dokumen kapal perikanan yang telah diterbitkan di PPS Bungus sampai dengan Triwulan I tahun 2026 sebanyak **1.149** Sertifikat atau sebesar **103,33%** dari target Triwulan I sebesar **1.112**. ***(Rincian Terlampir)***.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.



Ditandatangani
Secara Elektronik

Yulian Toni



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BUNGUS

JL. RAYA PADANG – PAINAN KM. 16, 25245 PADANG SUMATERA BARAT

TELEPON/FAX: (0751) 751122

LAMAN www.kkp.go.id SUREL pps.bungus@kkp.go.id

Nomor : B.358/PPSB/PI.210/III/2026 3 Februari 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu berkas
Hal : Penyampaian Rekapitulasi Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan
Periode Januari 2026 (SKKP)

Yth. Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan
di Jakarta

Dengan ini kami sampaikan Laporan Rekapitulasi Penerbitan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan (SKKP) di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus periode Bulan Januari 2026, yaitu sejumlah 11 (Sebelas) Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan.

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Pelabuhan Perikanan
Samudera Bungus,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Widodo

Lampiran

Nomor : B.358/PPSB/PI.210/II/2026

Tanggal : 3 Februari 2026

**REKAPITULASI SERTIFIKAT KELAIKAN KAPAL PERIKANAN
PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BUNGUS
PERIODE BULAN JANUARI 2026**

NO	NAMA KAPAL	NAMA PEMILIK	UKURAN KAPAL (GT)	JENIS API	NO. SKKP	TANGGAL TERBIT	MASA BERLAKU
1	DILLA DE VICKY 03	AFDAL SURYA	30	BAGAN BERPERAHU TERI	02-01/PPSB/PI.210/II/2025	02 Januari 2026	01 Januari 2027
2	AEKEN	JON SAHMINANDA	12	BAGAN BERPERAHU TERI	07-02/PPSB/PI.210/II/2025	07 Januari 2026	06 Januari 2027
3	JEBEL 01	EMI	28	BAGAN BERPERAHU TERI	12-03/PPSB/PI.210/II/2025	12 Januari 2026	11 Januari 2027
4	RIDHO 02	RUSLAN	25	BAGAN BERPERAHU TERI	12-04/PPSB/PI.210/II/2025	12 Januari 2026	11 Januari 2027
5	SHINTIA	RAMBUN SP	10	Rawai Dasar	15-05/PPSB/PI.210/II/2025	15 Januari 2026	14 Januari 2027
6	SHINTIA 04	RAMBUN SP	10	Rawai Dasar	20-06/PPSB/PI.210/II/2025	20 Januari 2026	19 Januari 2027
7	SHINTIA - 01	RAMBUN SP	12	Rawai Dasar	20-07/PPSB/PI.210/II/2025	20 Januari 2026	19 Januari 2027
8	MULYA 03	MUH DARWIS	10	Jaring Hela Dasar	20-08/PPSB/PI.210/II/2025	20 Januari 2026	19 Januari 2027
9	SHINTIA 05	RAMBUN SP	8	Rawai Dasar	23-09/PPSB/PI.210/II/2025	23 Januari 2026	22 Januari 2027
10	IMIL 01	ILHAMDI	30	BAGAN BERPERAHU TERI	26-10/PPSB/PI.210/II/2025	26 Januari 2026	25 Januari 2027

NO	NAMA KAPAL	NAMA PEMILIK	UKURAN KAPAL (GT)	JENIS API	NO. SKKP	TANGGAL TERBIT	MASA BERLAKU
11	RADID	PETRI YENTI	10	BAGAN BERPERAHU TERI	28-11/PPSB/PI.210/I/2025	28 Januari 2026	27 Januari 2027

Kepala Pelabuhan Perikanan
Samudera Bungus,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Widodo



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BUNGUS

JL. RAYA PADANG – PAINAN KM. 16, 25245 PADANG SUMATERA BARAT

TELEPON/FAX: (0751) 751122

LAMAN www.kkp.go.id SUREL pps.bungus@kkp.go.id

Nomor : B.610/PPSB/PI.210/III/2026 2 Maret 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu berkas
Hal : Penyampaian Rekapitulasi Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan
Periode Februari 2026 (SKKP)

Yth. Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan
di Jakarta

Dengan ini kami sampaikan Laporan Rekapitulasi Penerbitan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan (SKKP) di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus periode Bulan Februari 2026, yaitu sejumlah 29 (Dua Puluh Sembilan) Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan Izin daerah.

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Pelabuhan Perikanan
Samudera Bungus,



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Widodo

Lampiran

Nomor : B.610/PPSB/PI.210/III/2026

Tanggal : 2 Maret 2026

**REKAPITULASI SERTIFIKAT KELAIKAN KAPAL PERIKANAN
PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BUNGUS
PERIODE BULAN FEBRUARI 2026**

NO	NAMA KAPAL	NAMA PEMILIK	UKURAN KAPAL (GT)	JENIS API	NO. SKKP	TANGGAL TERBIT	MASA BERLAKU
1	LLB 032	HAMDAN ARDIANSYAH	20	PANCING ULUR TUNA	B.012/PPSB/PI.210/II/2026	03 Februari 2026	02 Februari 2027
2	SORGA	BADIUS	10	BAGAN BERPERAHU TERI	B.013/PPSB/PI.210/II/2026	05 Februari 2026	04 Februari 2027
3	SORGA 02	BADIUS	13	BAGAN BERPERAHU TERI	B.014/PPSB/PI.210/II/2026	09 Februari 2026	08 Februari 2027
4	SETIA MURNI - 08	DEDI SUHENDRA	28	BAGAN BERPERAHU TERI	B.015/PPSB/PI.210/II/2026	09 Februari 2026	08 Februari 2027
5	SEPASANG MERPATI	MARTA JAYA	18	BAGAN BERPERAHU TERI	B.016/PPSB/PI.210/II/2026	09 Februari 2026	08 Februari 2027
6	VELLA 06	RAFLI	29	BAGAN BERPERAHU TERI	B.017/PPSB/PI.210/II/2026	09 Februari 2026	08 Februari 2027
7	MUHSI 02	WIDOYO HERMANTO	25	BAGAN BERPERAHU TERI	B.018/PPSB/PI.210/II/2026	09 Februari 2026	08 Februari 2027
8	SEPASANG MERPATI 02	MARTA JAYA	18	BAGAN BERPERAHU TERI	B.019/PPSB/PI.210/II/2026	09 Februari 2026	08 Februari 2027
9	VELLA 07	RAFLI	30	BAGAN BERPERAHU TERI	B.020/PPSB/PI.210/II/2026	09 Februari 2026	08 Februari 2027
10	CANTIKA 03	RASDIMAN	24	BAGAN BERPERAHU TERI	B.021/PPSB/PI.210/II/2026	09 Februari 2026	08 Februari 2027
11	FIKRI AKBAR 01	RORI SAPUTRA	21	BAGAN BERPERAHU TERI	B.022/PPSB/PI.210/II/2026	09 Februari 2026	08 Februari 2027

NO	NAMA KAPAL	NAMA PEMILIK	UKURAN KAPAL (GT)	JENIS API	NO. SKKP	TANGGAL TERBIT	MASA BERLAKU
12	HELLO KITTY 03	TAMRIN	10	BAGAN BERPERAHU TERI	B.023/PPSB/PI.210/II/2026	10 Februari 2026	09 Februari 2027
13	ZAHY	JONDRI NOFERIZAL	12	BAGAN BERPERAHU TERI	B.024/PPSB/PI.210/II/2026	11 Februari 2026	10 Februari 2027
14	PANGLIMA 02	OKIAWARMAN	26	BAGAN BERPERAHU TERI	B.025/PPSB/PI.210/II/2026	11 Februari 2026	10 Februari 2027
15	QONITA RADAR LAUT	KORNELIS	20	BAGAN BERPERAHU TERI	B.026/PPSB/PI.210/II/2026	11 Februari 2026	10 Februari 2027
16	P C P	YASRI	13	BAGAN BERPERAHU TERI	B.027/PPSB/PI.210/II/2026	11 Februari 2026	10 Februari 2027
17	TIGA PUTRA 06	RIHANDES PUTRA	27	BAGAN BERPERAHU TERI	B.028/PPSB/PI.210/II/2026	12 Februari 2026	11 Februari 2027
18	ARCELIO 04	BINTANG FEBRIAN	30	BAGAN BERPERAHU TERI	B.029/PPSB/PI.210/II/2026	12 Februari 2026	11 Februari 2027
19	SETIA MURNI 11	BAHTIAR	30	BAGAN BERPERAHU TERI	B.030/PPSB/PI.210/II/2026	13 Februari 2026	12 Februari 2027
20	RIDHO ILAHI 06	RIDHO ILAHI	27	BAGAN BERPERAHU TERI	B.031/PPSB/PI.210/II/2026	13 Februari 2026	12 Februari 2027
21	SURYA PURNAMA 04	JETRI	30	BAGAN BERPERAHU TERI	B.032/PPSB/PI.210/II/2026	18 Februari 2026	17 Februari 2027
22	TIA 04	CHAIRUL	30	BAGAN BERPERAHU TERI	B.033/PPSB/PI.210/II/2026	18 Februari 2026	17 Februari 2027
23	GHITA BEACH 01	SYAMSIR	16	BAGAN BERPERAHU TERI	B.035/PPSB/PI.210/II/2026	19 Februari 2026	18 Februari 2027
24	AUA SARUMPUN	ARDIANTO	7	BAGAN BERPERAHU TERI	B.036/PPSB/PI.210/II/2026	19 Februari 2026	18 Februari 2027
25	HARAPAN BASAMO 01	DELFIAN SATRIA	9	PANCING ULUR TUNA	B.037/PPSB/PI.210/II/2026	20 Februari 2026	19 Februari 2027
26	GILANG RAMADHAN 03	RAMADANIS	10	PANCING TONDA	B.038/PPSB/PI.210/II/2026	20 Februari 2026	19 Februari 2027
27	ARDANI FAMILY	SAIDANI ROSMAN	30	BAGAN BERPERAHU TERI	B.039/PPSB/PI.210/II/2026	20 Februari 2026	19 Februari 2027

NO	NAMA KAPAL	NAMA PEMILIK	UKURAN KAPAL (GT)	JENIS API	NO. SKKP	TANGGAL TERBIT	MASA BERLAKU
28	FARREL 01	RAMADANIS	11	PANCING TONDA	B.040/PPSB/PI.210/II/2026	20 Februari 2026	19 Februari 2027
29	NAN TONGGA	MARTIS	30	BAGAN BERPERAHU TERI	B.041/PPSB/PI.210/II/2026	20 Februari 2026	19 Februari 2027

Kepala Pelabuhan Perikanan
Samudera Bungus,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Widodo



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BUNGUS

JL. RAYA PADANG – PAINAN KM. 16, 25245 PADANG SUMATERA BARAT

TELEPON/FAX: (0751) 751122

LAMAN www.kkp.go.id SUREL pps.bungus@kkp.go.id

Nomor : B.808/PPSB/PI.210/IV/2026 1 April 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu berkas
Hal : Penyampaian Rekapitulasi Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan Izin Daerah Periode Maret 2026 (SKKP)

Yth. Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan
di Jakarta

Dengan ini kami sampaikan Laporan Rekapitulasi Penerbitan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan (SKKP) izin daerah di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus periode Bulan Maret 2026, yaitu sejumlah 7 (Tujuh) Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan.

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Pelabuhan Perikanan
Samudera Bungus,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Widodo

Lampiran Surat Dinas

Nomor : B.808/PPSB/PI.210/IV/2026

Tanggal : 1 April 2026

**REKAPITULASI SERTIFIKAT KELAIKAN KAPAL PERIKANAN
PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BUNGUS
PERIODE BULAN MARET 2026**

NO	NAMA KAPAL	NAMA PEMILIK	UKURAN KAPAL (GT)	JENIS API	NO. SKKP	TANGGAL TERBIT	MASA BERLAKU
1	EMPAT SAUDARA 04	PENDI GUSTIAWAN	11	PANCING TONDA	B.042/PPSB/PI.210/III/2026	05 Maret 2026	04 Maret 2027
2	EMPAT SAUDARA 01	PENDI GUSTIAWAN	9	PANCING TONDA	B.043/PPSB/PI.210/III/2026	05 Maret 2026	04 Maret 2027
3	EMPAT SAUDARA 03	PENDI GUSTIAWAN	10	PANCING TONDA	B.044/PPSB/PI.210/III/2026	05 Maret 2026	04 Maret 2027
4	FATHINA	RIKO EFFENDI	11	PANCING ULUR TUNA	B.044/PPSB/PI.210/III/2027	17 Maret 2026	16 Maret 2027
5	EMPAT SAUDARA 02	PENDI GUSTIAWAN	12	PANCING TONDA	B.046/PPSB/PI.210/III/2026	27 Maret 2026	26 Maret 2027
6	GILANG RAMADAN 01	RAMADANIS	11	PANCING TONDA	B.047/PPSB/PI.210/III/2026	27 Maret 2026	26 Maret 2027
7	ELOK BUDI 02	KARDINAS	18	BAGAN BERPERAHU TERI	B.048/PPSB/PI.210/III/2026	27 Maret 2026	26 Maret 2027

Kepala Pelabuhan Perikanan
Samudera Bungus,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Widodo

**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BUNGUS**

NOTA DINAS
NOMOR 154/PPSB/RC.610/IV/2026

Yth : Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus
Dari : Ketua Tim Kerja Dukungan Manajerial
Hal : Penyampaian Capaian IKU Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus
Tanggal : 15 April 2026

Sehubungan dengan telah selesainya perhitungan capaian indikator kinerja Triwulan I tahun 2026, kami informasikan bahwa tidak terdapat temuan/rekomendasi dalam Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan di Lingkup Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus pada Triwulan I tahun 2026. Dengan demikian, capaian IKU Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus pada Triwulan I tahun 2026 adalah sebesar **100%**.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.



Ditandatangani
Secara Elektronik

Abdul Razak

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

INSPEKTORAT JENDERAL

NOTA DINAS
NOMOR 582/ITJ.0/TU.140/IV/2026

Yth. : 1. Para Kepala Biro Lingkup Sekretariat Jenderal KKP
2. Para Sekretaris Ditjen lingkup KKP
3. Para Sekretaris Badan lingkup KKP
Dari : Sekretaris Inspektorat Jenderal
Lampiran : Satu Lembar
Hal : Capaian IKU "Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Unit Eselon I Lingkup KKP" Triwulan I Tahun 2026
Tanggal : 13 April 2026

Dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja (LKj) lingkup KKP periode Triwulan I Tahun 2025, bersama ini disampaikan capaian IKU "Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Unit Eselon I Lingkup KKP" sebagai berikut:

1. Capaian IKU diperoleh dari jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang terbit pada periode 1 Oktober 2025 s.d. 31 Desember 2025 (Triwulan IV Tahun 2025) yang telah ditindaklanjuti secara tuntas oleh unit eselon I sampai dengan 31 Maret Tahun 2026 (Triwulan I Tahun 2026).
2. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang telah ditindaklanjuti (tuntas) pada periode Triwulan I Tahun 2026 lingkup KKP sebesar 92,78% (tuntas 604 dari 651 rekomendasi).
3. Rincian capaian tindak lanjut hasil pengawasan Itjen dari masing-masing unit eselon I disampaikan pada lampiran.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Ditandatangani
Secara Elektronik

Lina Herlina

Tembusan:

1. Plt. Sekretaris Jenderal
2. Inspektur Jenderal
3. Para Direktur Jenderal lingkup KKP
4. Para Kepala Badan lingkup KKP
5. Para Inspektur lingkup Inspektorat Jenderal KKP

Lampiran
 Nomor : 582/ITJ.0/TU.140/IV/2026
 Tanggal : 13 April 2026

Data Rekapitulasi Capaian IKU
“Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan
Kinerja Lingkup KKP” Periode Triwulan I Tahun 2026

No	Unit Kerja	Jumlah Rekomendasi	Tindak Lanjut (Tuntas)	% Tuntas	Sisa Rekomendasi	Sisa Rekomendasi (%)
1	Setjen	39	39	100,00%	0	0,00%
2	Ditjen PK	103	88	85,44%	15	14,56%
3	Ditjen PRL	2	2	100,00%	0	0,00%
4	Ditjen Perikanan Tangkap	84	63	75,00%	21	25,00%
5	Ditjen PSDKP	73	73	100,00%	0	0,00%
6	Ditjen Perikanan Budi Daya	118	115	97,46%	3	2,54%
7	BPPSDMKP	49	49	100,00%	0	0,00%
8	Ditjen PDSPKP	28	25	89,29%	3	10,71%
9	BPPMHKP	150	145	96,67%	5	3,33%
10	Itjen	5	5	100%	0	0,00%
TOTAL		651	604	92,78%	47	7,22%



Ditandatangani
Secara Elektronik

Lina Herlina

PERHITUNGAN IKU TW I 2026

IKU TW I

OKTOBER 2025 - Desember 2025

JML REKOM	TL REKOM	%
84	63	75,00%

-

30 84 - 27 63 - 3 21 -

No	Pengawasan	Satker	Nomor LHP	Laporan Hasil Pengawasan	Sebelum Tindak Lanjut			Tindak Lanjut			Setelah Tindak Lanjut			Ket
					Temuan	Rekomendasi	Nilai Keuangan (Rp)	Temuan	Rekomendasi	Nilai Keuangan (Rp)	Temuan	Rekomendasi	Nilai Keuangan (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
OKTOBER 2025														
1	Evaluasi	SEKRETARIAT DJPT	T.413/ITJ.2/HP.470/X/2025	Hasil Evaluasi Pengelolaan Barang Milik Negara pada Ditjen Perikanan Tangkap di Provinsi DKI Jakarta	5	16	-	3	11	-	2	5	-	PROSES
2	Reviu	SEKRETARIAT DJPT	T.417/ITJ.2/HP.380/X/2025	Hasil Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan Bantuan Kampung Nelayan Merah Putih berupa Kapal Penangkap Ikan Ukuran Kurang dari 5 GT Tahun Anggaran 2025	1	4	-	1	4	-	-	-	-	TUNTAS
3	Evaluasi	SEKRETARIAT DJPT	T.418/ITJ.2/HP.470/X/2025	Hasil Evaluasi Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap dan Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap pada Ditjen Perikanan Tangkap Tahun 2024-2025	5	25	-	5	10	-	-	15	-	PROSES
4	Pemantauan	SEKRETARIAT DJPT	T.450/ITJ.2/HP.550/X/2025	Hasil Pemantauan Implementasi Manajemen Risiko TA 2025 pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap di Provinsi DKI Jakarta	2	4	-	2	4	-	-	-	-	TUNTAS
5	Reviu	SEKRETARIAT DJPT	T.482/ITJ.2/HP.380/X/2025	Hasil Reviu Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-K/L) Pagu Alokasi Anggaran Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap TA 2026	4	7	-	3	6	-	1	1	-	PROSES
NOVEMBER 2025														
6	Reviu	SEKRETARIAT DJPT	T.505/ITJ.2/HP.380/XI/2025	Hasil Reviu atas Rencana Perbaikan Ulang Kapal Hasil Rampasan yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemerintah Daerah.	2	4	-	2	4	-	-	-	-	TUNTAS
7	Reviu	SEKRETARIAT DJPT	T.507/ITJ.2/HP.380/XI/2025	Hasil Reviu Penghapusan Sebab-sebab Lain dan Penjualan atas 24 Unit BMN Gedung dan Bangunan pada PPN Pengembangan.	1	2	-	1	2	-	-	-	-	TUNTAS
8	Reviu	DIT KAPI	T.508/ITJ.2/HP.380/XI/2025	Hasil Reviu Dokumen Pengadaan Jasa Konsultansi Perencanaan Desain Kapal Penangkap Ikan dalam Rangka Mendukung Program Bantuan KNMP TA 2025 pada Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan	2	2	-	2	2	-	-	-	-	TUNTAS
9	Reviu	SEKRETARIAT DJPT	T.510/ITJ.2/HP.380/XI/2025	Hasil Reviu atas Aset yang Tidak Ditemukan pada Satker Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual Provinsi Maluku	1	3	-	1	3	-	-	-	-	TUNTAS
10	Reviu	SEKRETARIAT DJPT	T.517/ITJ.2/HP.380/XI/2025	Hasil Reviu Penghapusan Sebab-sebab Lain atas 28 Unit BMN Gedung dan Bangunan pada PPN Pengembangan	1	2	-	1	2	-	-	-	-	TUNTAS
11	Reviu	SEKRETARIAT DJPT	T.519/ITJ.2/HP.380/XI/2025	Hasil Reviu Usulan Penghapusan Sebab-sebab Lain atas 2 (dua) Unit BMN Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan Provinsi Bali.	1	2	-	1	2	-	-	-	-	TUNTAS
12	Reviu	PPP TELUK BATANG	T.545/ITJ.2/HP.380/XI/2025	Hasil Reviu Draft Perjanjian Penggunaan Tanah di PPP Teluk Batang Provinsi Kalimantan Barat	1	1	-	1	1	-	-	-	-	TUNTAS
DESEMBER 2025														
13	Reviu	SEKRETARIAT DJPT	T.590/ITJ.2/HP.380/XII/2025	Hasil Reviu Laporan Pengawasan Pasar Ikan Tiakur Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan SKPT Moea	1	2	-	1	2	-	-	-	-	TUNTAS
14	Reviu	SEKRETARIAT DJPT	T.631/ITJ.2/HP.380/XII/2025	Hasil Reviu atas Usulan Tambahan Rincian Output/RO Kegiatan Sector Loan For Integrated Fishing Ports and International Fish Market Phase I Pada Ditjen Perikanan Tangkap TA 2025	1	2	-	1	2	-	-	-	-	TUNTAS
15	Reviu	SEKRETARIAT DJPT	T.761/ITJ.2/HP.380/XII/2025	Hasil Reviu Usulan Revisi Anggaran penambahan Rincian Output (RO) Khusus lingkup Ditjen Perikanan Tangkap TA 2025 di Prov. DKI Jakarta	1	4	-	1	4	-	-	-	-	TUNTAS
16	Reviu	SEKRETARIAT DJPT	T.793/ITJ.2/HP.380/XII/2025	Hasil Reviu terhadap Usulan Penghapusan BMN yang berdampak rencana Pembangunan Pelabuhan Perikanan di PPN Kejawanan melalui PHLN Lender Islamic Development Bank (IsDB)	1	4	-	1	4	-	-	-	-	TUNTAS

**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BUNGUS**

NOTA DINAS
NOMOR 149/PPSB/RC.410/IV/2026

Yth : Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus
Dari : Ketua Tim Kerja Dukungan Manajerial
Hal : Penyampaian Capaian IKU Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan Pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Tanggal : 13 April 2026

Sehubungan dengan telah selesainya perhitungan capaian indikator kinerja pada Triwulan I tahun 2026, maka bersama ini kami sampaikan capaian indikator kinerja Persentase Rencana Umum Pengadaan (RUP) PBJ yang diumumkan pada aplikasi SiRUP di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus pada Triwulan I Tahun 2026 sebesar **100%**, atau setara dengan **129,87%** dari target tahun 2026 sebesar **77. (Rincian terlampir).**

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.



Ditandatangani
Secara Elektronik

Abdul Razak

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

SEKRETARIAT JENDERAL

NOTA DINAS
NOMOR 283/SJ.7/PL.410/IV/2026

Yth. : 1. Para Kepala Biro/Pusat di Lingkungan Sekretariat Jenderal
2. Sekretaris Inspektorat Jenderal
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
6. Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya
7. Sekretaris Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
8. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
9. Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan
10. Sekretaris Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
11. Direktur Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan

Dari : Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa

Hal : Penyampaian Hasil Perhitungan Capaian Indikator Kinerja Rencana Umum Pengadaan di Lingkungan KKP yang Diumumkan pada SIRUP Triwulan 1 Tahun Anggaran 2026

Lampiran : Satu berkas

Tanggal : 7 April 2026

Sehubungan dengan Rencana Umum Pengadaan (RUP) Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2026, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengumuman RUP dalam aplikasi SiRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan) merupakan kewajiban Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana diubah dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Hasil rekapitulasi Capaian IKU Persentase RUP Terumumkan dari 156 (seratus lima puluh enam) Satuan Kerja Pengelola DIPA Aktif sesuai pagu anggaran yang tersedia lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2026 periode Triwulan 1 sampai dengan waktu *cut off* tanggal 7 April 2025 pukul 22:00 WIB sebesar **99,75%**. (daftar rekapitulasi terampir);

3. Berkenaan dengan hal tersebut, diminta kepada Saudara berkenan untuk melakukan perbaikan/penyesuaian data sesuai ketersediaan anggaran.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Teguh Wibowo

Tembusan:
Sekretaris Jenderal

Lampiran 1

Nomor : 283/SJ.7/PL.410/IV/2026

Tanggal : 7 April 2026

**REKAPITULASI DATA HASIL PERHITUNGAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UNTUK PERSENTASE RENCANA UMUM
PENGADAAN TRIWULAN 1 TAHUN ANGGARAN 2026 LINGKUP KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

No	Kode E1	Nama Unit Eselon I	Σ Satker	Persentase RUP Terumumkan					% Target IKU TW 1	Capaian IKU TW - 1 TA. 2026	
				Σ Pagu Pengadaan	Σ Pagu Terumumkan	Σ Selisih Terumumkan	% RUP Terumumkan	Keterangan		% Capaian	Keterangan
1	01	Sekretariat Jenderal	3	470,068,437,000	470,068,437,000	0	100.0000%	Sesuai	85.00	100.00%	Capaian target maksimal
2	13	Badan Pengawasan dan Pengendalian Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	47	304,871,258,000	304,871,258,000	0	100.0000%	Sesuai	77.00	100.00%	Capaian target maksimal
3	08	Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut	1	50,518,334,000	50,518,334,000	0	100.0000%	Sesuai	75.00	100.00%	Capaian target maksimal
4	05	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	15	758,474,978,000	758,474,978,000	0	100.0000%	Sesuai	77.00	100.00%	Capaian target maksimal
5	12	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	42	326,938,554,000	326,938,554,000	0	100.0000%	Sesuai	77.00	100.00%	Capaian target maksimal
6	03	Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap	24	6,234,837,443,000	6,234,837,443,000	0	100.0000%	Sesuai	77.00	100.00%	Capaian target maksimal
7	02	Inspektorat Jenderal	1	15,127,914,000	15,127,743,000	(171,000)	99.9989%	Kurang Terumumkan	77.00	99.99%	Capaian melebihi target
8	06	Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	2	158,066,570,000	158,069,244,000	2,674,000	100.0017%	Lebih Terumumkan	77.00	99.99%	Capaian melebihi target
9	07	Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan	5	1,172,905,904,000	1,166,768,126,000	(6,137,778,000)	99.4767%	Kurang Terumumkan	76.00	99.48%	Capaian melebihi target
10	04	Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya	16	917,960,850,000	897,634,697,000	(20,326,153,000)	97.7857%	Kurang Terumumkan	77.00	97.79%	Capaian melebihi target
TOTAL			156	10,409,770,242,000	10,383,308,814,000	(26,461,428,000)	99.7458%	KURANG TERUMUMKAN		99.75%	CAPAIAN MELEBIH TARGET



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Teguh Wibowo

Lampiran 2

Nomor : 283/SJ.7/PL.410/IV/2026

Tanggal : 7 April 2026

**REKAPITULASI DATA HASIL PERHITUNGAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UNTUK PERSENTASE RENCANA UMUM
PENGADAAN TRIWULAN 1 TAHUN ANGGARAN 2026 PER SATUAN KERJA**

(01) Sekretariat Jenderal – 3 Satker.

No	Kode E1 / Satker	Nama Satker	PAKET RUP TERUMUMKAN	STATISTIK MONER PAGU PENGADAAN	SELISIH (PAKET RUP - STATISTIK MONER)	% RUP Terumumkan	Keterangan
			TOTAL	TOTAL			
	01	SEKRETARIAT JENDERAL	470,068,437,000	470,068,437,000			
1	632004	Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	14,473,809,000	14,473,809,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
2	622081	BIRO UMUM SETJEN KKP	447,214,323,000	447,214,323,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
3	660056	LEMBAGA PENGELOLA MODAL USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN	8,380,305,000	8,380,305,000	0	100.00%	Sudah Sesuai

(13) Badan Pengawasan dan Pengendalian Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan – 47 Satker.

No	Kode E1 / Satker	Nama Satker	PAKET RUP TERUMUMKAN	STATISTIK MONER PAGU PENGADAAN	SELISIH (PAKET RUP - STATISTIK MONER)	% RUP Terumumkan	Keterangan
			TOTAL	TOTAL			
13		BADAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN	304,871,258,000	304,871,258,000			
1	427598	BALAI BESAR KIPM DAN KHP MAKASSAR	19,484,769,000	19,484,769,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
2	567610	BALAI KIPM DAN KHP BALIKPAPAN	1,143,921,000	1,143,921,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
3	649615	BALAI KIPM DAN KHP LAMPUNG	1,029,385,000	1,029,385,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
4	649750	BALAI KIPM DAN KHP AMBON	1,339,462,000	1,339,462,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
5	649593	BALAI KIPM DAN KHP BANJARMASIN	1,057,310,000	1,057,310,000	0	100.00%	Sudah Sesuai

No	Kode E1 / Satker	Nama Satker	PAKET RUP TERUMUMKAN	STATISTIK MONER	SELISIH (PAKET RUP - STATISTIK MONER)	% RUP Terumumkan	Keterangan	
			TOTAL	PAGU PENGADAAN				TOTAL
13	BADAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN		304,871,258,000		304,871,258,000			
6	427624	BALAI KIPM DAN KHP DENPASAR	2,030,406,000		2,030,406,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
7	649568	BALAI KIPM DAN KHP ENTIKONG	526,628,000		526,628,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
8	649682	BALAI KIPM DAN KHP JAKARTA II	2,027,441,000		2,027,441,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
9	567812	BALAI KIPM DAN KHP JAYAPURA	942,893,000		942,893,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
10	567631	BALAI KIPM DAN KHP MANADO	1,141,041,000		1,141,041,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
11	567758	BALAI KIPM DAN KHP MATARAM	922,433,000		922,433,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
12	427567	BALAI KIPM DAN KHP MEDAN I	1,053,502,000		1,053,502,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
13	649661	BALAI KIPM DAN KHP SEMARANG	1,436,067,000		1,436,067,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
14	427542	BALAI KIPM DAN KHP SURABAYA I	2,120,230,000		2,120,230,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
15	649788	BALAI KIPM DAN KHP SURABAYA II	3,290,509,000		3,290,509,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
16	649640	BALAI KIPM DAN KHP TJ. PINANG	388,074,000		388,074,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
17	649572	BALAI KIPM DAN KHP TARAKAN	872,480,000		872,480,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
18	662897	BALAI UJI STANDAR KIPM DAN KHP	23,387,383,000		23,387,383,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
19	440807	SEKRETARIAT BPPMKHP	222,620,591,000		222,620,591,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
20	567694	STASIUN KIPM DAN KHP KENDARI	228,306,000		228,306,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
21	645691	STASIUN KIPM DAN KHP MAMUJU	132,060,000		132,060,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
22	649711	STASIUN KIPM DAN KHP SORONG	264,756,000		264,756,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
23	649589	STASIUN KIPM DAN KHP ACEH	1,094,470,000		1,094,470,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
24	645693	STASIUN KIPM DAN KHP BANDUNG	753,105,000		753,105,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
25	427649	STASIUN KIPM DAN KHP BATAM	683,227,000		683,227,000	0	100.00%	Sudah Sesuai

No	Kode E1 / Satker	Nama Satker	PAKET RUP TERUMUMKAN	STATISTIK MONER	SELISIH (PAKET RUP - STATISTIK MONER)	% RUP Terumumkan	Keterangan	
			TOTAL	PAGU PENGADAAN				TOTAL
13	BADAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN		304,871,258,000		304,871,258,000			
26	649792	STASIUN KIPM DAN KHP BAUBAU	160,800,000		160,800,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
27	649622	STASIUN KIPM DAN KHP BENGKULU	574,268,000		574,268,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
28	649814	STASIUN KIPM DAN KHP BIMA	784,570,000		784,570,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
29	649732	STASIUN KIPM DAN KHP CIREBON	928,366,000		928,366,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
30	649678	STASIUN KIPM DAN KHP GORONTALO	493,789,000		493,789,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
31	649636	STASIUN KIPM DAN KHP JAMBI	195,176,000		195,176,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
32	649551	STASIUN KIPM DAN KHP KUPANG	380,500,000		380,500,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
33	649771	STASIUN KIPM DAN KHP LUWUK BANGGAI	171,170,000		171,170,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
34	649684	STASIUN KIPM DAN KHP MEDAN II	978,651,000		978,651,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
35	649688	STASIUN KIPM DAN KHP MERAK	996,270,000		996,270,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
36	649704	STASIUN KIPM DAN KHP MERAUKE	903,509,000		903,509,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
37	567432	STASIUN KIPM DAN KHP PADANG	748,892,000		748,892,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
38	649657	STASIUN KIPM DAN KHP PALANGKARAYA	858,250,000		858,250,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
39	567481	STASIUN KIPM DAN KHP PALEMBANG	390,073,000		390,073,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
40	649601	STASIUN KIPM DAN KHP PALU	397,648,000		397,648,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
41	649699	STASIUN KIPM DAN KHP PANGKAL PINANG	1,284,545,000		1,284,545,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
42	567453	STASIUN KIPM DAN KHP PEKANBARU	754,512,000		754,512,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
43	567538	STASIUN KIPM DAN KHP PONTIANAK	833,020,000		833,020,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
44	649800	STASIUN KIPM DAN KHP TAHUNA	508,760,000		508,760,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
45	649746	STASIUN KIPM DAN KHP TJ. BALAI ASAHAN	726,335,000		726,335,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
46	649767	STASIUN KIPM DAN KHP TERNATE	705,319,000		705,319,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
47	649725	STASIUN KIPM DAN KHP YOGYAKARTA	1,126,386,000		1,126,386,000	0	100.00%	Sudah Sesuai

(08) Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut – 1 Satker.

No	Kode E1 / Satker	Nama Satker	PAKET RUP TERUMUMKAN	STATISTIK MONER	SELISIH (PAKET RUP - STATISTIK MONER)	% RUP Terumumkan	Keterangan
			TOTAL	PAGU PENGADAAN			
08	DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG LAUT		50,518,334,000				
1	417154	Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut	50,518,334,000		0	100.00%	Sudah Sesuai

(05) Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan – 15 Satker.

No	Kode E1 / Satker	Nama Satker	PAKET RUP TERUMUMKAN	STATISTIK MONER	SELISIH (PAKET RUP - STATISTIK MONER)	% RUP Terumumkan	Keterangan
			TOTAL	PAGU PENGADAAN			
05	DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN		758,474,978,000				
1	440822	PANGKALAN PENGAWASAN SDKP BITUNG	20,299,569,000		0	100.00%	Sudah Sesuai
2	440816	PANGKALAN PENGAWASAN SDKP JAKARTA	16,681,384,000		0	100.00%	Sudah Sesuai
3	440853	PANGKALAN PENGAWASAN SDKP TUAL	20,840,752,000		0	100.00%	Sudah Sesuai
4	325156	PANGKALAN PENGAWASAN SDKP BATAM	18,809,471,000		0	100.00%	Sudah Sesuai
5	225135	PANGKALAN PENGAWASAN SDKP BENOA	15,211,781,000		0	100.00%	Sudah Sesuai
6	065135	PANGKALAN PENGAWASAN SDKP LAMPULO	21,461,321,000		0	100.00%	Sudah Sesuai
7	449520	SETDITJEN PENGAWASAN SDKP	549,904,060,000		0	100.00%	Sudah Sesuai
8	440831	STASIUN PENGAWASAN SDKP BELAWAN	16,852,683,000		0	100.00%	Sudah Sesuai
9	440847	STASIUN PENGAWASAN SDKP PONTIANAK	18,740,296,000		0	100.00%	Sudah Sesuai
10	215141	STASIUN PENGAWASAN SDKP AMBON	9,711,004,000		0	100.00%	Sudah Sesuai
11	250263	STASIUN PENGAWASAN SDKP BIAK	7,617,665,000		0	100.00%	Sudah Sesuai
12	031665	STASIUN PENGAWASAN SDKP CILACAP	13,622,708,000		0	100.00%	Sudah Sesuai
13	245160	STASIUN PENGAWASAN SDKP KUPANG	12,492,975,000		0	100.00%	Sudah Sesuai
14	170445	STASIUN PENGAWASAN SDKP TAHUNA	9,671,447,000		0	100.00%	Sudah Sesuai
15	355105	STASIUN PENGAWASAN SDKP TARAKAN	6,557,862,000		0	100.00%	Sudah Sesuai

 (12) Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan – 42 Satker.

No	Kode E1 / Satker	Nama Satker	PAKET RUP TERUMUMKAN	STATISTIK MONER	SELISIH (PAKET RUP - STATISTIK MONER)	% RUP Terumumkan	Keterangan
			TOTAL	PAGU PENGADAAN			
12	BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM KELAUTAN DAN PERIKANAN		326,938,554,000	326,938,554,000			
1	352595	AKADEMI KOMUNITAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	990,954,000	990,954,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
2	403827	BBR BUDIDAYA LAUT DAN PENYULUHAN PERIKANAN	6,529,483,000	6,529,483,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
3	403835	BBR PENGOLAHAN PRODUK DAN BIOTEKNOLOGI KP	4,985,346,000	4,985,346,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
4	403836	BBR SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN	1,643,813,000	1,643,813,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
5	238755	BPPP AMBON	16,013,469,000	16,013,469,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
6	238762	BPPP BANYUWANGI	6,245,814,000	6,245,814,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
7	239260	BPPP BITUNG	12,257,656,000	12,257,656,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
8	238741	BPPP MEDAN	4,518,648,000	4,518,648,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
9	239188	BPPP TEGAL	39,950,140,000	39,950,140,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
10	653526	BALAI DIKLAT APARATUR SUKAMANDI	5,196,446,000	5,196,446,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
11	403830	BALAI RISET BUDIDAYA IKAN HIAS	2,868,988,000	2,868,988,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
12	403832	BALAI RISET PEMULIAAN IKAN	3,231,545,000	3,231,545,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
13	403824	BALAI RISET PEMULIHAN SUMBER DAYA IKAN	2,104,748,000	2,104,748,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
14	403828	BRP BUDIDAYA AIR PAYAU DAN PENYULUHAN PERIKANAN	6,817,145,000	6,817,145,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
15	403829	BRP BUDIDAYA AIR TAWAR DAN PENYULUHAN PERIKANAN	7,759,499,000	7,759,499,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
16	403822	BALAI RISET PERIKANAN LAUT	1,093,050,000	1,093,050,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
17	403823	BRP PERAIRAN UMUM DAN PENYULUHAN PERIKANAN	6,931,859,000	6,931,859,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
18	403820	LOKA PEREKAYASAAN TEKNOLOGI KELAUTAN	1,466,192,000	1,466,192,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
19	403833	LOKA RISET BUDIDAYA RUMPUT LAUT	1,219,765,000	1,219,765,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
20	403834	LOKA RISET MEKANISASI PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN	928,933,000	928,933,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
21	403826	LOKA RISET PERIKANAN TUNA	1,701,958,000	1,701,958,000	0	100.00%	Sudah Sesuai

No	Kode E1 / Satker	Nama Satker	PAKET RUP TERUMUMKAN	STATISTIK MONER PAGU PENGADAAN	SELISIH (PAKET RUP - STATISTIK MONER)	% RUP Terumumkan	Keterangan
			TOTAL	TOTAL			
12	BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM KELAUTAN DAN PERIKANAN		326,938,554,000	326,938,554,000			
22	403817	LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESISIR	1,730,900,000	1,730,900,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
23	427511	POLITEKNIK AHLI USAHA PERIKANAN	57,281,778,000	57,281,778,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
24	238010	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BITUNG	2,633,984,000	2,633,984,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
25	403839	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BONE	3,306,385,000	3,306,385,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
26	403875	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN DUMAI	12,655,559,000	12,655,559,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
27	440013	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN JEMBRANA	2,047,982,000	2,047,982,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
28	403837	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN KARAWANG	19,357,989,000	19,357,989,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
29	403838	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN KUPANG	1,823,939,000	1,823,939,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
30	403879	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN PANGANDARAN	2,467,483,000	2,467,483,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
31	622035	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN SIDOARJO	18,089,136,000	18,089,136,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
32	634146	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN SORONG	5,759,647,000	5,759,647,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
33	403821	Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	7,980,873,000	7,980,873,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
34	652009	SUPM KOTA AGUNG LAMPUNG	4,715,445,000	4,715,445,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
35	427551	SUPM LADONG	2,407,153,000	2,407,153,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
36	427573	SUPM PARIAMAN	4,821,203,000	4,821,203,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
37	427582	SUPM PONTIANAK	1,668,251,000	1,668,251,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
38	427630	SUPM SORONG	1,336,284,000	1,336,284,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
39	237373	SUPM TEGAL	4,040,473,000	4,040,473,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
40	427618	SUPM WAEHERU	2,018,843,000	2,018,843,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
41	626402	SEKRETARIAT BADAN RISET PPSDM KP	34,580,706,000	34,580,706,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
42	389090	PUSAT STANDARDISASI DAN SERTIFIKASI SDM KP	1,759,090,000	1,759,090,000	0	100.00%	Sudah Sesuai

(03) Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap – 24 Satker.

No	Kode E1 / Satker	Nama Satker	PAKET RUP TERUMUMKAN	STATISTIK MONER	SELISIH (PAKET RUP - STATISTIK MONER)	% RUP Terumumkan	Keterangan
			TOTAL	PAGU PENGADAAN			
			TOTAL	TOTAL			
03	DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP		6,234,837,443,000	6,234,837,443,000			
1	239150	BBPI SEMARANG	4,266,256,000	4,266,256,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
2	622461	PPN AMBON	2,888,215,000	2,888,215,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
3	427692	PPN BRONDONG	5,550,267,000	5,550,267,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
4	239146	PPN KARANGANTU	4,975,865,000	4,975,865,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
5	622482	PPN KEJAWANAN	76,447,767,000	76,447,767,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
6	310719	PPN KWANDANG	3,808,313,000	3,808,313,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
7	239171	PPN PEKALONGAN	2,624,978,000	2,624,978,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
8	560393	PPN PELABUHAN RATU	4,966,852,000	4,966,852,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
9	239991	PPN PEMANGKAT	2,169,663,000	2,169,663,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
10	633693	PPN PENGAMBENGAN	277,833,054,000	277,833,054,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
11	427670	PPN PRIGI	2,946,640,000	2,946,640,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
12	560401	PPN SIBOLGA	3,526,343,000	3,526,343,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
13	239214	PPN SUNGAILIAT	3,715,198,000	3,715,198,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
14	239221	PPN TANJUNG PANDAN	1,437,176,000	1,437,176,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
15	427661	PPN TERNATE	4,335,453,000	4,335,453,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
16	622475	PPN TUAL	2,121,021,000	2,121,021,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
17	239235	PPP TELUK BATANG	2,044,222,000	2,044,222,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
18	427655	PPS BELAWAN	8,432,114,000	8,432,114,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
19	633707	PPS BITUNG	10,659,664,000	10,659,664,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
20	531488	PPS BUNGUS	1,676,910,000	1,676,910,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
21	518117	PPS CILACAP	10,461,664,000	10,461,664,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
22	537695	PPS KENDARI	43,633,886,000	43,633,886,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
23	537611	PPS NIZAM ZACHMAN	29,534,068,000	29,534,068,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
24	238720	SETDITJEN PERIKANAN TANGKAP	5,724,781,854,000	5,724,781,854,000	0	100.00%	Sudah Sesuai

(02) Inspektorat Jenderal – 1 Satker.

No	Kode E1 / Satker	Nama Satker	PAKET RUP TERUMUMKAN	STATISTIK MONER	SELISIH (PAKET RUP - STATISTIK MONER)	% RUP Terumumkan	Keterangan
			TOTAL	PAGU PENGADAAN			
02	INSPEKTORAT JENDERAL		15,127,743,000				
1	622098	INSPEKTORAT JENDERAL	15,127,743,000		15,127,914,000	(171,000)	99.9989% Kurang Terumumkan

(06) Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan – 2 Satker.

No	Kode E1 / Satker	Nama Satker	PAKET RUP TERUMUMKAN	STATISTIK MONER	SELISIH (PAKET RUP - STATISTIK MONER)	% RUP Terumumkan	Keterangan
			TOTAL	PAGU PENGADAAN			
06	DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN		158,069,244,000		158,066,570,000		
1	427686	BALAI BESAR PENGUJIAN PENERAPAN HASIL PERIKANAN	7,347,589,000		7,347,589,000	0	100.0000% Sudah Sesuai
2	622131	SETDITJEN PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN	150,721,655,000		150,718,981,000	2,674,000	100.0018% Lebih Terumumkan

(07) Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan – 5 Satker.

No	Kode E1 / Satker	Nama Satker	PAKET RUP TERUMUMKAN	STATISTIK MONER	SELISIH (PAKET RUP - STATISTIK MONER)	% RUP Terumumkan	Keterangan
			TOTAL	PAGU PENGADAAN			
07	DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN		1,170,166,198,000		1,169,007,198,000		
1	499352	BALAI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL BKKPN KUPANG	6,455,753,000		6,455,753,000	0	100.00% Sudah Sesuai
2	477419	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT DENPASAR	3,199,403,000		3,199,403,000	0	100.00% Sudah Sesuai
3	477425	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK	2,736,010,000		2,736,010,000	0	100.00% Sudah Sesuai
4	477456	Loka Pengelolaan Kelautan Pekanbaru	2,970,613,000		2,970,613,000	0	100.00% Sudah Sesuai
5	622145	SETDITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT	1,154,804,419,000		1,153,645,419,000	1,159,000,000	100.10% Lebih Terumumkan

(04) Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya – 16 Satker.

No	Kode E1 / Satker	Nama Satker	PAKET RUP TERUMUMKAN	STATISTIK MONER PAGU PENGADAAN	SELISIH (PAKET RUP - STATISTIK MONER)	% RUP Terumumkan	Keterangan
			TOTAL	TOTAL			
04	DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA		897,634,697,000	917,960,850,000			
1	239192	BBPB AIR PAYAU JEPARA	33,776,312,000	33,776,312,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
2	238734	BBPB AIR TAWAR SUKABUMI	26,301,351,000	26,301,351,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
3	427706	BBPB LAUT LAMPUNG	17,815,644,000	17,815,644,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
4	445393	BLU PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA KARAWANG	126,396,102,000	126,396,102,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
5	567800	BPKIL SERANG	3,287,862,000	3,287,862,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
6	567350	BPB AIR PAYAU SITUBONDO	48,941,145,000	48,941,145,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
7	567680	BPB AIR PAYAU TAKALAR	15,771,406,000	15,771,406,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
8	567385	BPB AIR PAYAU UJUNG BATEE	10,567,720,000	10,567,720,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
9	567584	BPB AIR TAWAR MANDIANGIN	16,416,369,000	16,416,369,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
10	237657	BPB AIR TAWAR SUNGAI GELAM	19,225,478,000	19,225,478,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
11	538911	BPB AIR TAWAR TATELU	11,923,306,000	11,923,306,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
12	567720	BPB LAUT AMBON	14,325,630,000	14,325,630,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
13	567474	BPB LAUT BATAM	9,292,277,000	9,292,277,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
14	567762	BPB LAUT LOMBOK	13,441,592,000	13,441,592,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
15	445394	BPI UDANG UNGGUL DAN KEKERANGAN KARANGASEM	6,052,854,000	6,052,854,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
16	632462	SETDITJEN PERIKANAN BUDI DAYA	524,099,649,000	544,425,802,000	(20,326,153,000)	96.27%	Kurang Terumumkan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Teguh Wibowo

**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BUNGUS**

NOTA DINAS
NOMOR 139/PPSB/RC.610/IV/2026

Yth : Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus
Dari : Ketua Tim Kerja Dukungan Manajerial
Hal : Penyampaian Capaian IKU Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Lingkup
Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Tanggal : 09 April 2026

Sehubungan dengan telah selesainya proses rekapitulasi Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di lingkup Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus untuk Triwulan I Tahun 2026, bersama ini kami sampaikan bahwa capaian nilai SKM pada periode tersebut adalah sebesar **94,78** atau setara dengan **106,73%** dari target tahun 2026 yang telah ditetapkan, yaitu sebesar **88,8**. (*Rincian hasil terlampir*).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.



Ditandatangani
Secara Elektronik

Abdul Razak

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

NOTA DINAS
NOMOR 968/DJPT.1/OT.710/IV/2026

Yth. : 1. Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan
2. Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan
3. Direktur Kepelabuhanan Perikanan
4. Direktur Usaha Penangkapan Ikan
5. Kepala Unit Pelaksana Teknis lingkup Ditjen Perikanan Tangkap

Dari : Sekretaris Ditjen Perikanan Tangkap

Lampiran : Satu berkas

Hal : Penyampaian Perubahan Hasil Validasi Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Ditjen Perikanan Tangkap Periode Triwulan I Tahun 2026

Tanggal : 9 April 2026

Menindaklanjuti nota dinas Sekretaris Ditjen Perikanan Tangkap, nomor 939/DJPT.1/OT.710/IV/2026, tanggal 7 April 2026 perihal Penyampaian Hasil Validasi Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Ditjen Perikanan Tangkap Periode Triwulan I Tahun 2026, bersama ini kami sampaikan perubahan hasil validasi SKM Triwulan I Tahun 2026 sebagai berikut:

1. Validasi dilaksanakan oleh Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap selaku admin eselon I dan Pusdatin selaku super admin pada Tools SKM KKP;
2. Hasil SKM diambil berdasarkan validasi data SKM Triwulan I Tahun 2026 yang dilakukan tanggal 1 s.d. 7 April 2026;
3. Hasil penyelenggaraan SKM Ditjen Perikanan Tangkap periode Triwulan I Tahun 2026 per Unit Pelayanan Publik (UPP) terlampir (lampiran II).
4. Analisis atas hasil SKM Ditjen Perikanan Tangkap dijabarkan berikut:
 - a. Target nilai SKM sebagaimana IKU Ditjen Perikanan Tangkap adalah 88,80;
 - b. Jumlah responden sebanyak 4.088 dengan hasil SKM **93,57** (kategori mutu pelayanan **Sangat Baik**);
 - c. Jumlah layanan yang dilaksanakan sebanyak 41 layanan berdasarkan Kepmen KP Nomor 20 Tahun 2025. Jumlah layanan yang diselenggarakan oleh UPP Ditjen Perikanan Tangkap merupakan yang terbanyak di lingkungan KKP;
 - d. Nilai SKM tertinggi diperoleh PPN Sibolga dengan nilai sebesar 97,58. Sedangkan, nilai terendah diperoleh Direktorat Usaha Penangkapan Ikan dengan nilai 89,02
 - e. Seluruh unsur pelayanan (U1 Persyaratan Layanan, U2 Kemudahan Prosedur, U3 Waktu Penyelesaian, U4 Kesesuaian Biaya, U5 Kesesuaian Produk, U6 Kecepatan Respon/Kompetensi Petugas, U7 Kemudahan

- Fitur/Perilaku, U8 Layanan Konsultasi, U9 Kualitas Isi/Sarana) mendapatkan nilai lebih dari 3 (tiga) dengan nilai rata-rata 3,74;
5. Atas hasil SKM tersebut, Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap menghimbau agar masing-masing UPP untuk dapat:
 - a. Mengidentifikasi 3 (tiga) unsur terendah dari U1 s.d. U9 dan menjadikan unsur tersebut sebagai bahan dalam menyusun rencana tindak lanjut hasil SKM dalam laporan;
 - b. Upaya yang dapat dilakukan oleh UPP untuk dijadikan rencana tindak lanjut atas unsur terendah tersebut antara lain dengan memberikan sosialisasi terkait waktu pemberian layanan, meningkatkan waktu respon petugas dalam melaksanakan pelayanan dengan memberikan in-house training, melakukan sosialisasi di berbagai media terkait fasilitas konsultasi dan pengaduan yang dimiliki UPP, dan melakukan perbaikan/peningkatan aplikasi dan/atau sarana prasarana yang mendukung pelayanan publik di masing-masing UPP;
 - c. Memperhatikan kecukupan jumlah responden per UPP, dengan mengacu tabel sampel dari *Krejcie and Morgan* sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.
 - d. Menindaklanjuti hasil validasi dengan penyusunan laporan, inventarisasi saran dan masukan, penyusunan rencana tindak lanjut, serta publikasi hasil SKM Triwulan I Tahun 2026 melalui media sosial dan sarana prasarana yang tersedia paling lambat tanggal **14 April 2026**.
 - e. memastikan kesesuaian format penyusunan laporan pelaksanaan SKM per UPP mengacu Pedoman Kementerian PANRB yang dapat diunduh pada menu Download pada Tools SKM KKP.
 6. Rincian data SKM berdasarkan hasil validasi Triwulan I Tahun 2026 dapat diunduh secara mandiri melalui menu Laporan Data Detail pada Tools SKM KKP.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara , kami mengucapkan terima kasih.



Ditandatangani
Secara Elektronik

Ridwan Mulyana

Tembusan
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

Lampiran

Nomor : 968/DJPT.1/OT.710/IV/2026

Tanggal : 9 April 2026

Hasil Penyelenggaraan SKM Triwulan I tahun 2026 lingkup Ditjen Perikanan Tangkap

Unit Pelayanan Publik	Jumlah Responden	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	Hasil SKM
Balai Besar Penangkapan Ikan Semarang	83	3,687	3,675	3,723	3,759	3,711	3,675	3,699	3,711	3,711	92,64
Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan	68	3,735	3,809	3,765	3,750	3,706	3,603	3,779	3,824	3,794	93,79
Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan	14	3,857	3,857	3,857	3,857	3,857	3,786	3,714	3,857	3,714	95,44
Direktorat Usaha Penangkapan Ikan	242	3,595	3,587	3,562	3,562	3,558	3,562	3,554	3,537	3,529	89,02
PPN Ambon	98	3,776	3,878	3,765	3,806	3,755	3,867	3,837	3,765	3,816	95,18
PPN Brondong	210	3,776	3,738	3,710	3,695	3,724	3,629	3,686	3,519	3,429	91,40
PPN Karangantu	228	3,746	3,737	3,719	3,807	3,702	3,719	3,741	3,627	3,526	92,57
PPN Kejawanan	153	3,654	3,725	3,686	3,654	3,634	3,699	3,706	3,634	3,614	91,68
PPN Kwandang	450	3,878	3,896	3,816	3,842	3,776	3,782	3,809	3,789	3,773	95,44
PPN Palabuhanratu	173	3,711	3,723	3,665	3,642	3,717	3,676	3,711	3,682	3,723	92,36
PPN Pekalongan	86	3,907	3,837	3,860	3,907	3,814	3,884	3,907	3,849	3,663	96,19
PPN Pemangkat	141	3,801	3,801	3,794	3,844	3,809	3,780	3,830	3,837	3,823	95,33
PPN Pengambang	164	3,652	3,652	3,591	3,683	3,659	3,549	3,659	3,616	3,579	90,67
PPN Prigi	129	3,744	3,705	3,674	3,690	3,690	3,659	3,713	3,682	3,698	92,38

Unit Pelayanan Publik	Jumlah Responden	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	Hasil SKM
PPN Sibolga	443	3,910	3,901	3,901	3,901	3,907	3,901	3,907	3,896	3,905	97,58
PPN Sungailiat	179	3,832	3,849	3,816	3,782	3,810	3,721	3,743	3,754	3,782	94,69
PPN Tanjung Pandan	52	3,942	3,865	3,788	3,904	3,846	3,827	3,885	3,846	3,808	96,42
PPN Ternate	129	3,760	3,736	3,729	3,713	3,729	3,736	3,791	3,744	3,744	93,56
PPN Tual	42	3,786	3,619	3,619	3,595	3,667	3,595	3,667	3,524	3,548	90,61
PPP Teluk Batang	46	3,761	3,783	3,761	3,804	3,870	3,783	3,804	3,870	3,826	95,17
PPS Belawan	123	3,650	3,634	3,634	3,667	3,602	3,626	3,634	3,626	3,553	90,63
PPS Bitung	313	3,757	3,728	3,700	3,693	3,719	3,684	3,706	3,684	3,677	92,63
PPS Bungus	133	3,917	3,639	3,917	3,647	3,902	3,632	3,902	3,677	3,887	94,78
PPS Cilacap	111	3,901	3,901	3,847	3,874	3,838	3,838	3,874	3,856	3,883	96,70
PPS Kendari	63	3,857	3,841	3,841	3,825	3,841	3,762	3,825	3,794	3,794	95,50
PPS Nizam Zachman	215	3,698	3,670	3,656	3,600	3,637	3,595	3,660	3,633	3,595	90,96
DJPT	4088	3,781	3,767	3,747	3,749	3,745	3,717	3,758	3,717	3,705	93,57

1.